

## KARYA TULIS ILMIAH

### FAKTA DAN PROSPEK PEMANFAATAN JENDELA KESEMPATAN DAN BONUS DEMOGRAFIS: SUATU STUDI BANDING DI SULAWESI UTARA DAN NUSA TENGGARA TIMUR



WILSON RAJAGUGUK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

OMAS BULAN SAMOSIR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS INDONESIA



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOVEMBER 2015

## KATA PENGANTAR

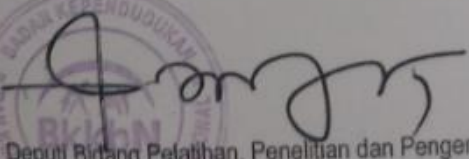
Pada tahun 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat kembali menyediakan dukungan dana penulisan karya tulis ilmiah (KTI) program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi Pusat Studi Kependudukan/Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi. Salah satu penulisan karya tulis ilmiah adalah penelitian yang berjudul **“Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan Dan Bonus Demografis: Suatu Studi Banding Di Sulawesi Utara Dan Nusa Tenggara Timur.”**

Bonus Demografi (*demographic dividend*) adalah akselerasi/percepatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan dampak positif dari transisi demografi. Transisi demografi terjadi dan dinikmati sebagai hasil dari pembangunan dalam bidang kependudukan. Transisi demografi tidak terjadi terus menerus, tetapi pada suatu jenjang waktu. Jenjang waktu ini kemudian dinamai sebagai jendela kesempatan (*window opportunity*). Jendela kesempatan perlu dimanfaatkan oleh pengambil keputusan dan pemangku kepentingan supaya transisi demografi yang merupakan hasil pembangunan kependudukan dapat dikonversi menjadi bonus, khususnya dalam bidang ekonomi, demi kesejahteraan penduduk.

Hasil penelitian dalam studi ini menunjukkan bahwa bonus demografi terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, walau percepatan dan momentumnya berbeda-beda. Jika bonus demografi dapat dibagi atas dua periode; periode pertama dan periode kedua, terdapat beberapa provinsi yang telah mengalami periode pertama dan sedang menyongsong periode kedua. Di sisi lain, terdapat provinsi yang sedang mengalami bonus demografi periode pertama, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal jendela kesempatan, terdapat provinsi dimana rentang waktunya pendek, dan terdapat provinsi yang rentang waktunya lebih panjang.

Karya tulis ilmiah ini ditulis atas kerjasama BKKBN Pusat, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Indonesia, Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara, Universitas Nusa Cendana Kupang, dan Universitas Sam Ratulangi Manado. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Peneliti yang dipimpin oleh Dr. Wilson Rajagukguk M.A., M.Si., dengan anggota Omas Bulan Samosir Ph.D., Dra. Brigitte Inez Maitimo M.Kes., Ir. Oktavianus Porajow M.S., Dahamiaz Arnold Koda, dan Yacobus Yakob, atas terselesaikannya penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Jakarta, 30 November 2015



Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan  
Dr. Sanjoyo M.Ec.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab 1   Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3. Sistematika Pembahasan	6
Bab 2   Tinjauan Literatur	7
2.1. Landasan Teoretis Hubungan antara Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	7
2.2. Bonus Demografi	13
2.3. Tinjauan Empiris Hubungan antara Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi	16
2.4. Kerangka Pikir Analisis dan Hipotesis Penelitian	22
Bab 3   Metode Penelitian	24
3.1. Sumber Data	24
3.2. Definisi Operasional Variabel	25
3.3. Metode Analisis Data	26
Bab 4   Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara	29
4.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur	29
4.2. Profil Kabupaten Kupang	35
4.3. Profil Provinsi Sulawesi Utara	44
4.4. Profil Kota Tomohon	71
Bab 5   Fakta Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan	77
5.1. Provinsi Nusa Tenggara Timur	77
5.2. Kabupaten Kupang	82
5.3. Provinsi Sulawesi Utara	85
5.4. Kota Tomohon	88
Bab 6   Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi	91
6.1. Statistik Deskriptif Variabel	91
6.2. Analisis Bivariat antara Variabel-variabel dalam Analisis	92
6.3. Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi	93
Bab 7   Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	96
7.1. Kesimpulan	96
7.2. Rekomendasi Kebijakan	97

Daftar Pustaka	99
Lampiran	100
1. Pedoman Wawancara Mendalam	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota: Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014	31
Tabel 4.2	Proyeksi Penduduk: Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2020	34
Tabel 4.3	Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah: Kabupaten Kupang	37
Tabel 4.4	Perkembangan Penduduk menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2009-2014	49
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2000-2010	51
Tabel 4.6	Distribusi Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur: Sulawesi Utara 1990-2010	53
Tabel 4.7	Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 2010	54
Tabel 4.8	Kepadatan dan Distribusi Penduduk: Sulawesi Utara 2010	56
Tabel 4.9	Angka Kematian Bayi: Sulawesi Utara dan Indoensia 1971-2010	59
Tabel 4.10	Angka Kematian Anak Balita: Sulawesi Utara dan Indonesia 1971-2010	60
Tabel 4.11	Status Migrasi Penduduk: Sulawesi Utara 2010	61
Tabel 4.12	Migrasi Seumur Hidup: Sulawesi Utara 1971-2010	61
Tabel 4.13	Migrasi Risen: Sulawesi Utara 1980-2010	62
Tabel 4.14	Harapan Hidup Saat Lahir menurut Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 1971-2010	64
Tabel 4.15	Harapan Hidup Saat Lahir menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013	65
Tabel 4.16	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013	66
Tabel 4.17	Lama Sekolah Rata-rata menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013	67
Tabel 4.18	Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013	68
Tabel 4.19	Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	69
Tabel 4.20	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013	70
Tabel 5.1	Perbandingan beberapa Makroagregat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia	77
Tabel 6.1	Statistik Deskriptif Variabel-variabel dalam Analisis	91
Tabel 6.2	Koefisien Korelasi antara Variabel-variabel dalam Analisis	92
Tabel 6.3	Estimasi Parameter, Kesalahan Baku, dan Statistik Uji $t$ Model Regresi Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (452 kabupaten/kota)	94
Tabel 6.4	Estimasi Parameter, Kesalahan Baku, dan Statistik Uji $t$ Model Regresi Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (428 kabupaten/kota)	95

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rasio Ketergantungan Umur: Indonesia, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur 2010-2035	3
Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Indeks Pembangunan Manusia 2013 menurut Provinsi di Indonesia	3
Gambar 1.3 Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Produk Domestik Regional Bruto 2013 menurut Provinsi di Indonesia	4
Gambar 1.4 Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 2013 menurut Provinsi di Indonesia	4
Gambar 2.1. Transisi Demografi dan Lingkungan yang Mendukung untuk Bonus Demografi	16
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Analisis Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	23
Gambar 4.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	30
Gambar 4.2 Lima Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi (%): Indonesia September 2014	32
Gambar 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tren PDRB: Provinsi Nusa Tenggara Timur 1983-2010	32
Gambar 4.4 Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (% total persalinan): Provinsi Nusa Tenggara Timur 1996-2013	33
Gambar 4.5 Angka Fertilitas Total: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2010-2035 (anak per 1.000 perempuan)	35
Gambar 4.6 Peta Kabupaten Kupang	36
Gambar 4.7 PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan: Kabupaten Kupang 2010 dan 2013	38
Gambar 4.8 Piramida Penduduk Kabupaten Kupang: 2016 dan 2020	39
Gambar 4.9 Penduduk yang Bekerja dan Jumlah Angkatan Kerja: Kabupaten Kupang 2007-2013	40
Gambar 4.10 Angka Partisipasi Murni: Kabupaten Kupang 1996-2013	40
Gambar 4.11 Garis Kemiskinan (rupiah) dan Angka Kemiskinan (%): Kabupaten Kupang, 2002-2013	41
Gambar 4.12 Nilai Ujian Nasional SD, SMTP, dan SMTA Rata-rata: Kabupaten Kupang 2009	41
Gambar 4.13 Indeks Pembangunan Manusia: Kabupaten Kupang 2004-2011	42
Gambar 4.14 Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%): Kabupaten Kupang 1996-2013	43
Gambar 4.15 Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Sanitasi Sehat, dan Air Bersih (%): Kabupaten Kupang 1996-2013	43
Gambar 4.16 <i>Poverty Gap Index</i> (%): Kabupaten Kupang 2002-2013	44

Gambar 4.17	Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara	45
Gambar 4.18	Perkembangan Jumlah Penduduk: Sulawesi Utara 1961-2010	48
Gambar 4.19	Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara 1961-2010	50
Gambar 4.20	Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara: 1990, 2000, dan 2010	52
Gambar 4.21	Rasio Ketergantungan Umur: Sulawesi Utara 1990-2010	53
Gambar 4.22	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 1961-2010	54
Gambar 4.23	Angka Fertilitas Total: Sulawesi Utara 1971-2010	57
Gambar 4.24	Angka Fertilitas Total: Sulawesi Utara dan Indonesia 1971-2010	58
Gambar 4.25	Angka Fertilitas Total menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2010	58
Gambar 4.26	Peta Kota Tomohon dalam Provinsi Sulawesi Utara	71
Gambar 4.27	Luas Kota Tomohon Menurut Kecamatan (km <sup>2</sup> )	72
Gambar 4.28	Piramida Penduduk Kota Tomohon: 2010, 2015, dan 2020	74
Gambar 4.29	Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas: Kota Tomohon 2010-2020	74
Gambar 4.30	Rasio Ketergantungan Umur: Kota Tomohon 2010-2020	75
Gambar 4.31	Rasio Jenis Kelamin: Kota Tomohon 2010-2020	75
Gambar 4.32	Rasio Jenis Kelamin menurut Umur: Kota Tomohon 2010-2020	76

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Secara global Indonesia menempati urutan yang ke-110 dalam pencapaian pembangunan manusia dan berada dalam kelompok negara dengan pencapaian pembangunan manusia menengah (UNDP 2015). Pencapaian pembangunan manusia Indonesia jauh lebih rendah daripada pencapaian pembangunan manusia Singapura dan Malaysia, yang masing-masing berada di urutan ke-11 dan ke-62. Pencapaian pembangunan manusia Indonesia juga lebih rendah daripada pencapaian pembangunan negara-negara kecil di Asia dan Pasifik, seperti Mongolia (urutan 90), Maladewa (urutan 104), Fiji (urutan 90) dan Tonga (urutan 100).

Ketertinggalan Indonesia dalam pencapaian pembangunan manusia antara lain disebabkan karena pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih rendah daripada pencapaian pembangunan ekonomi di negara-negara lain. UNDP (2015) juga melaporkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar 2,3 kali lebih rendah daripada pendapatan per kapita penduduk Malaysia dan hampir delapan kali lebih rendah daripada pendapatan per kapita penduduk Singapura. Ketertinggalan Indonesia dalam pencapaian pembangunan ekonomi dapat disebabkan karena Indonesia belum memanfaatkan secara optimal dinamika kependudukan untuk mendorong pencapaian pembangunan. Singapura memanfaatkan jendela kesempatan turunnya tingkat kelahiran dan tinggi yang mengakibatkan dominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam struktur umur penduduk dengan cara berinvestasi pada modal manusia penduduk, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga negara ini menikmati bonus demografis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1980an.

Dinamika kependudukan meliputi perubahan dalam banyak, struktur umur dan persebaran penduduk. Dalam lima dekade terakhir Indonesia mengalami dinamika kependudukan yang berarti dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi menuju tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang rendah. Hasil Sensus Penduduk (SP) menunjukkan bahwa angka fertilitas total (*total fertility rate*/TFR) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*/IMR) Indonesia masing-masing telah turun dari 5,6 anak per perempuan dan 145 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurut SP 1971 menjadi 2,4 dan 26 menurut SP 2010. Transisi demografis ini telah berdampak pada perubahan struktur umur penduduk Indonesia dimana penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif.

Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia akan bertambah dari 238,5 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta jiwa pada tahun 2035 (Bappenas dkk 2012). Pada periode ini penduduk usia muda (0-14 tahun) akan turun dari 28,6% menjadi 21,5%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan meningkat dari 66,5% menjadi 68,085% pada tahun 2029 dan kemudian akan turun menjadi 67,9% pada tahun 2035 dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) akan meningkat dari 5,0% menjadi 10,6%. Akibatnya,



rasio ketergantungan umur (rasio antara jumlah penduduk usia muda dan usia lanjut dengan jumlah penduduk usia produktif) Indonesia diproyeksikan akan menurun dari 50,5 penduduk usia muda dan usia lanjut per 100 penduduk usia produktif pada tahun 2010 menjadi 46,876 pada tahun 2029 dan kemudian akan meningkat menjadi 47,3 pada tahun 2035.

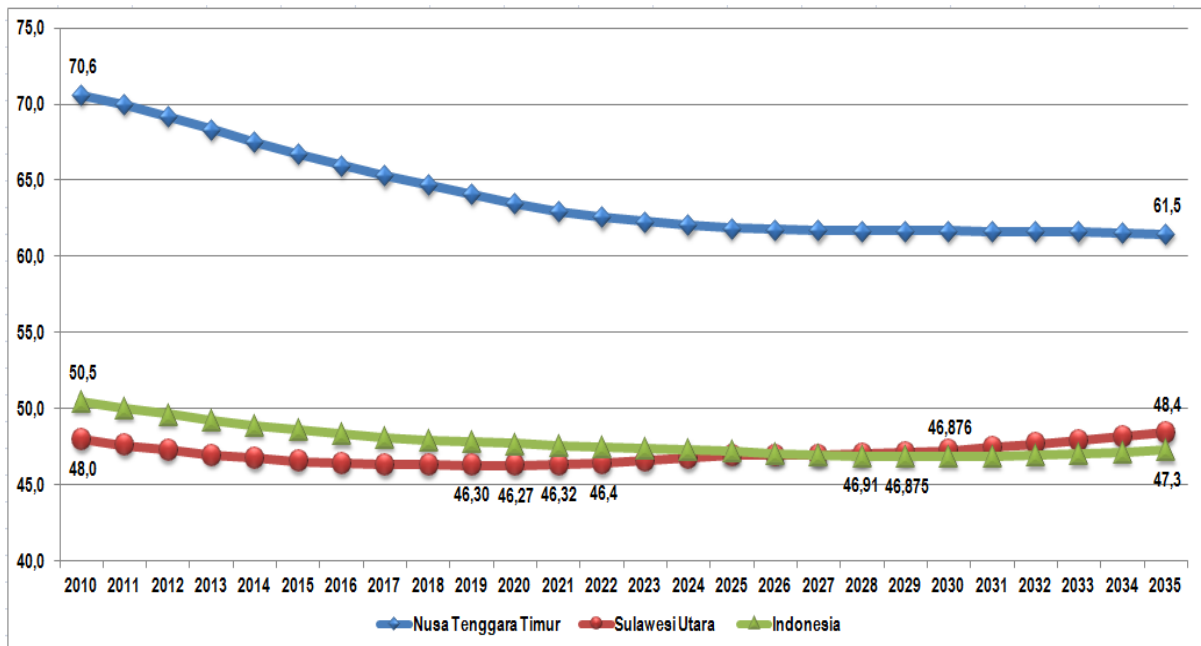
Dinamika struktur umur penduduk akan membawa konsekuensi terhadap pencapaian pembangunan termasuk pembangunan ekonomi. Pemanfaatan dinamika struktur umur melalui kebijakan kesehatan publik, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi yang mendorong investasi pada modal manusia, peningkatan investasi, dan peningkatan jaminan sosial akan meningkatkan peluang untuk menikmati bonus demografis. Bonus demografis adalah keuntungan ekonomi yang disebabkan karena penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang dapat berupa peningkatan tabungan, modal manusia, investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bonus demografis terdiri dari dua tahap. Bonus demografis tahap 1 terjadi ketika persentase penduduk usia produktif meningkat sehingga rasio ketergantungan umur (RKU) menurun yang jika dikelola dengan optimal akan mempercepat dan meningkatkan pencapaian pembangunan. Bonus demografis tahap 2, terjadi ketika persentase penduduk usia produktif menurun sehingga RKU jika penduduk usia lanjut sehat, terdidik, produktif, dan berinvestasi.

Rasio ketergantungan umur Indonesia telah turun dari 87 menurut Sensus Penduduk (SP) 1971 menjadi 51 menurut SP 2010 (Gambar 1.1). Struktur umur penduduk bervariasi nyata antarprovinsi di Indonesia. Akibatnya, jendela kesempatan untuk menuai bonus demografis berbeda antarprovinsi, paling pendek di DKI Jakarta dan paling panjang di Nusa Tenggara Timur. RKU Nusa Tenggara Timur 86 pada tahun 1971 dan turun menjadi 71 pada tahun 2010. Secara khusus, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan transisi demografis yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah tengah dan timur dan bahkan barat Indonesia. RKU Sulawesi Utara 93 pada tahun 1971 dan turun menjadi 48 pada tahun 2010.

Variasi dalam RKU menjelaskan variasi dalam pencapaian pembangunan antarprovinsi di Indonesia. RKU menjelaskan variasi ( $R^2$ ) dalam pencapaian pembangunan manusia sebesar 30% (Gambar 1.2). Jika RKU turun satu unit maka indeks pembangunan manusia (IPM) akan naik sebesar 0,221. RKU juga menjelaskan variasi dalam pembangunan ekonomi sekitar 27% (Gambar 1.3). Jika RKU turun satu unit maka produk domestik regional bruto (PDRB) akan naik sekitar 0,10%. Akan tetapi, pengaruh struktur umur penduduk jauh lebih nyata pada kesejahteraan penduduk dimana RKU menjelaskan variasi dalam PDRB per kapita sekitar 49% (Gambar 1.4). Kenaikan RKU sebesar satu unit akan meningkatkan PDRB per kapita sekitar 0,06%. Dengan RKU paling rendah, IPM, PDRB, dan PDRB per kapita paling tinggi di DKI Jakarta. Sementara itu, dengan RKU paling tinggi, PDRB per kapita paling di Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengindikasikan peran penting dinamika kependudukan dalam pencapaian pembangunan ekonomi.

Gambar 1.1

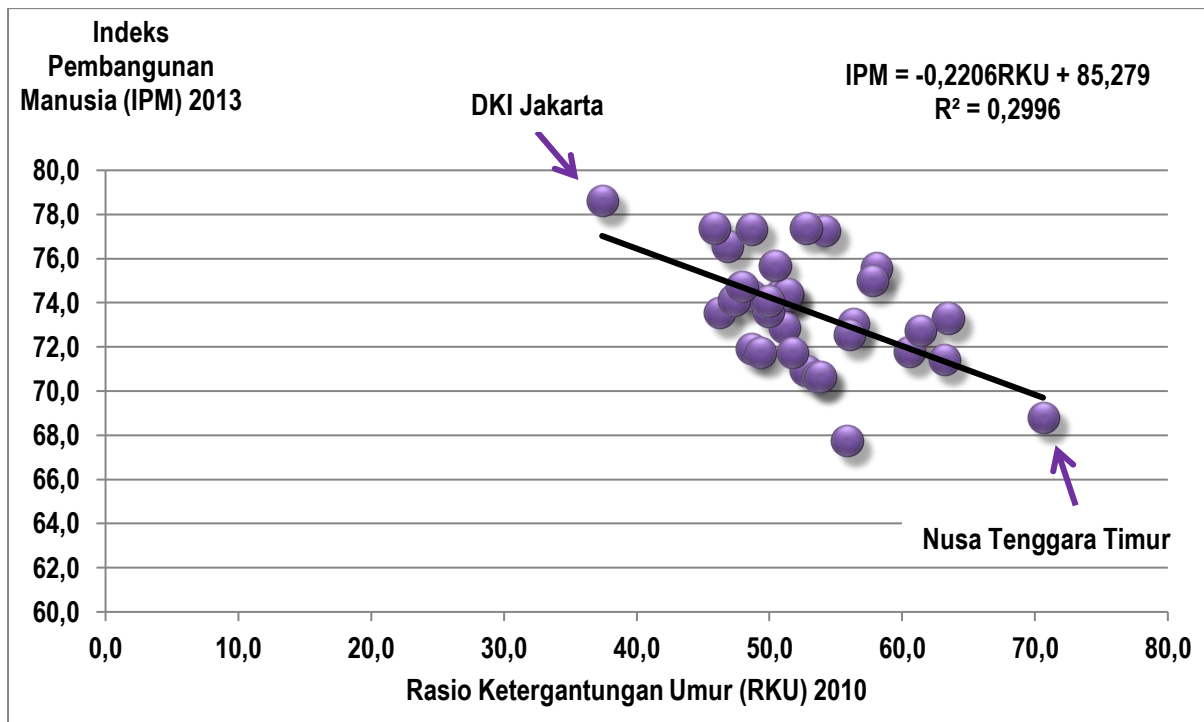
Rasio Ketergantungan Umur: Indonesia, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur 2010-2035



Sumber: Bappenas dkk (2012).

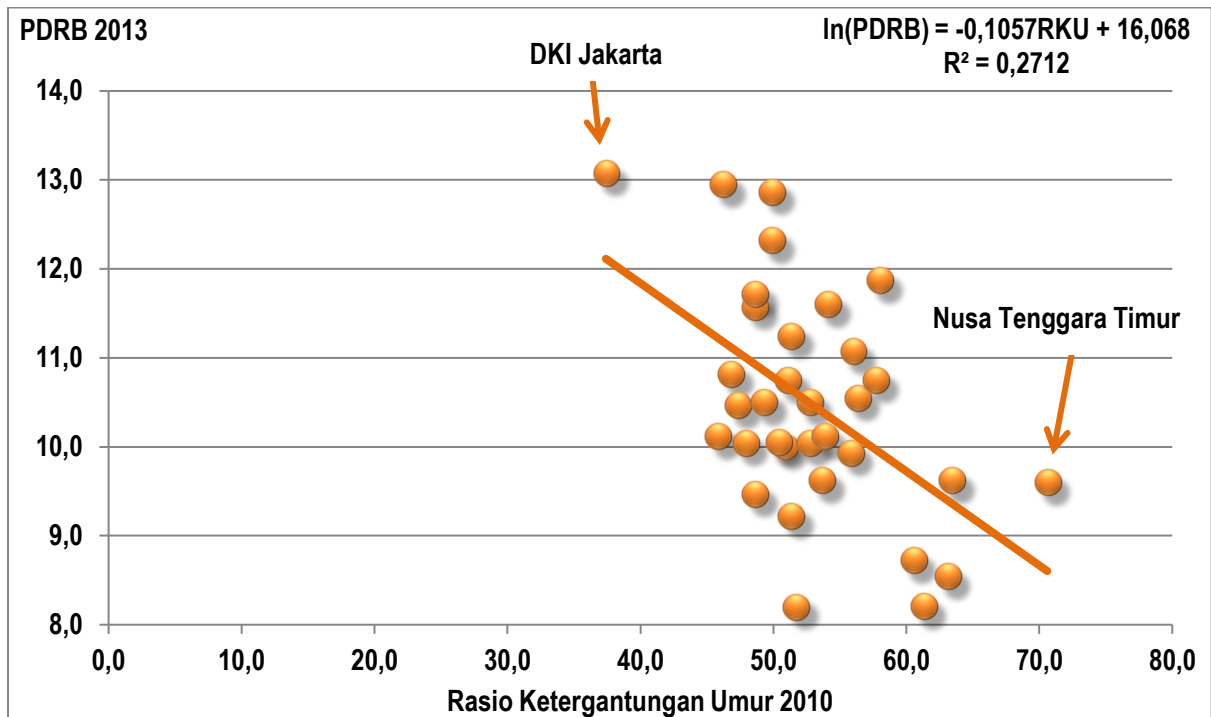
Gambar 1.2

Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Indeks Pembangunan Manusia 2013 menurut Provinsi di Indonesia



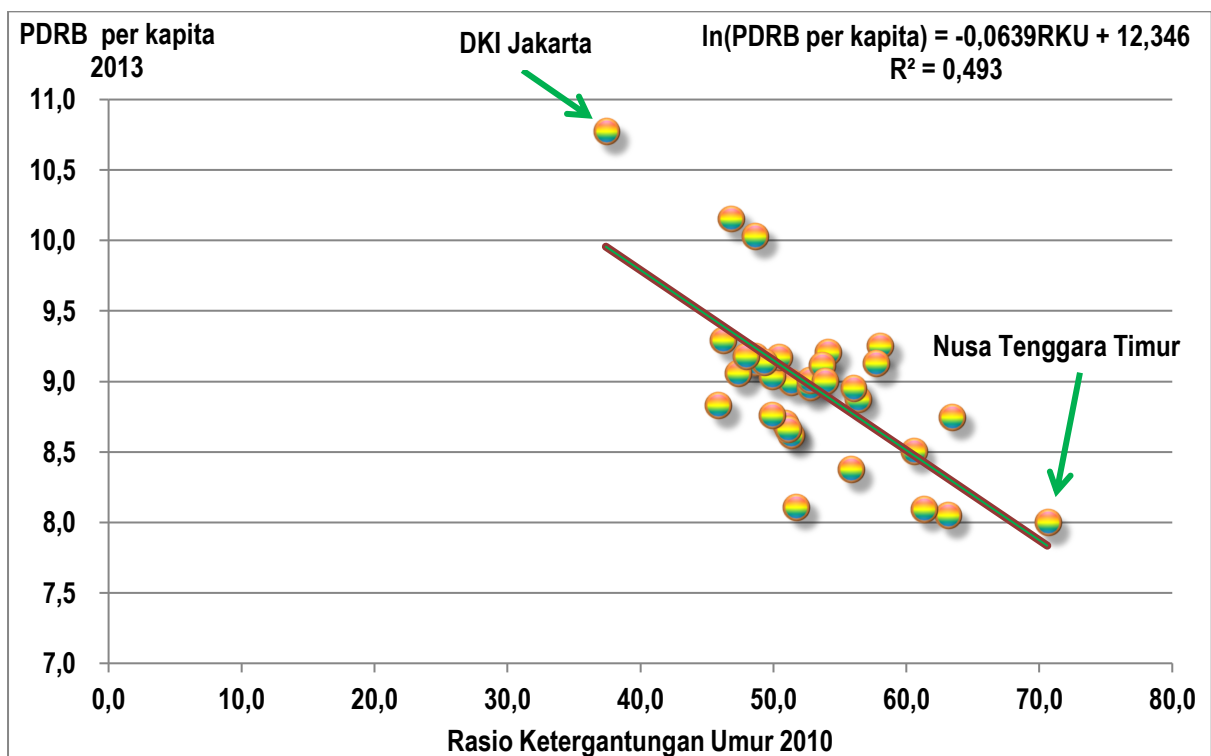
Gambar 1.3

Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Produk Domestik Regional Bruto 2013 menurut Provinsi di Indonesia



Gambar 1.4

Rasio Ketergantungan Umur 2010 dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 2013 menurut Provinsi di Indonesia



Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik dan modal manusia (Young 1995; Ray 1998). Modal fisik dapat berupa investasi, sementara modal manusia terdiri dari pendidikan, angkatan kerja, dan penduduk. Dalam hal ini, struktur umur penduduk dapat digunakan sebagai indikator penduduk. Akan tetapi, analisis tentang pengaruh struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas di Indonesia. Analisis ini penting dalam upaya untuk mempelajari fakta dan pemanfaatan jendela kesempatan dan bonus demografis di Indonesia dan secara khusus di Sulawesi Utara dan di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (i) Bagaimana pengaruh modal fisik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- (ii) Bagaimana pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- (iii) Bagaimana fakta dan pemanfaatan jendela kesempatan dan bonus demografis di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur?

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian adalah mempelajari fakta dan pemanfaatan jendela kesempatan dan bonus demografis di Indonesia.

Tujuan khusus dari penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Mengestimasi pengaruh pertumbuhan investasi, angkatan kerja, pendidikan, dan struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- b. Menganalisis bonus demografis di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
- c. Mengkaji pemanfaatan jendela kesempatan demografis di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
- d. Mengidentifikasi strategi pemanfaatan jendela kesempatan demografis di Indonesia.
- e. Memprediksi prospek bonus demografis di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan untuk pemanfaatan jendela kesempatan demografis untuk menuai bonus demografis di Indonesia dan secara khusus di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

### **1.3. Sistematika Pembahasan**

Laporan Karya Tulis Ilmiah ini terdiri dari tujuh (7) bab. Latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian disampaikan pada Bab 1. Pada Bab 2 dibahas landasan teoretis, tinjauan empiris, kerangka pikir analisis, dan hipotesis penelitian. Sumber data, definisi operasional, dan metode analisis data penelitian didiskusikan pada Bab 3. Pada Bab 4 disajikan profil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Fakta bonus demografis dan pemanfaatan jendela kesempatan demografis di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara dibahas pada Bab 5. Pada Bab 6 disajikan hasil analisis pengaruh modal fisik dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan disajikan pada Bab 7.

## BAB 2

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1. Landasan Teoretis Hubungan antara Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Peranan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak diperdebatkan (misal: Phelps (1968) dalam Henderson, 2006; Simon, 1977; Hayek, 1988; Jones, 1995; Birdsall dan Sinding, 2001). Phelps (1968) dan Jones (1995) berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada masa lalu diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Simon (1977) dengan tegas mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk adalah baik (*population growth is good*). Sementara itu, Hayek (1988) mengajukan tidak pernah terjadi bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat tiga aliran pemikiran dan periode waktu perkembangan pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Aliran tradisional yang pesimis, yang muncul pada tahun 1950-1970an, mengajukan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi (Malthusian dan Neo-Malthusian). Sementara itu, aliran revisionis meragukan pendapat aliran tradisional pesimis karena tidak menemukan cukup bukti empiris yang mendukung pendapat negatif itu. Aliran ketiga adalah aliran yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk memang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi (*population does matter*, Birdsall dan Sindings, 2001) dengan menggunakan metode kuantitatif, berwawasan pengamatan jangka panjang, dengan berbagai dimensi dan data empiris. Ketiga aliran di atas menguji pandangan mereka dengan menggunakan alat uji ekonometri pada data empiris.

Pertumbuhan penduduk sesungguhnya adalah sebuah fenomena yang mempengaruhi keseluruhan perekonomian. Interaksi antara pertumbuhan penduduk dan ekonomi berjalan dalam dan ke dua arah. Jadi, ketika mencoba mempelajari hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk maka perlu dipelajari hubungan timbal balik di antara keduanya. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilaksanakan dengan membalikkan saja model matematika yang didapat.

Sebagai contoh, peningkatan harapan hidup pada saat lahir Indonesia dari 45,7 tahun pada tahun 1967 menjadi 70,2 tahun pada tahun 2008 pasti berdampak pada situasi perekonomian. Akan tetapi, efek dari tren demografi masa lalu dan masa depan pada pertumbuhan ekonomi belum banyak diulas dalam studi-studi perekonomian dan demografi. Salah satu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan demografi adalah melalui kuantitas dan kualitas dari angkatan kerja yang merupakan hasil dari pertumbuhan penduduk. Inilah yang disebut dengan bonus demografi.

David Romer (2006) mempostulatkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan sebuah variabel eksogen dalam pertumbuhan ekonomi dalam model pertumbuhan neoklasikal. Dalam model ini pertumbuhan *output*

hanya dipengaruhi oleh faktor demografi (angka pertumbuhan penduduk) dan angka perkembangan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan teknologi eksogen sehingga tidak menjelaskan mekanisme yang menggerakkan pertumbuhan itu sendiri. Model ini tidak melakukan sebuah evaluasi dari mekanisme dimana kebijakan pemerintah atau *welfare* dari penduduk secara potensial dapat mempengaruhi proses pertumbuhan. Literatur baru tentang pertumbuhan menekankan keterbatasan dari teori neoklasikal ini dengan mengusulkan sebuah variasi mesin pertumbuhan dimana variabel pertumbuhan diperlakukan secara endogen: datang dari dalam perekonomian itu sendiri dan bukan turun dari langit, seperti yang dikemukakan Joanna Robinson (1903-1983).

Peranan faktor perekonomian dalam kependudukan adalah hal pokok dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Malthus (1798). Teori tersebut tidak bertahan karena prediksi bahwa peningkatan kemakmuran tidak dapat dihindarkan dari pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari peningkatan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kenyataannya adalah bahwa, baik antar- maupun dalam suatu negara, angka fertilitas berhubungan negatif dengan tingkat pendapatan per kapita, kecuali pada tingkat pendapatan per kapita yang sangat rendah. Walau demikian, hal mendasar dari teori itu adalah bahwa terjadi hubungan yang penting antara variabel perekonomian dan variabel demografi.

Pendekatan modern pada model demografi ekonomi telah dilakukan antara lain oleh Barro dan Becker (1989), Becker dan Barro (1988) dalam Barro dan Sala-i-Martin (1995), Raut dan Srinivasan (1991), Palivos dan Yip (1993), Portner (1996), serta Erlich dan Kim (2005). Literatur ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya oleh karena akumulasi kapital, tetapi juga melalui investasi terhadap anak. Tujuan dari analisis ini adalah integrasi dari model kependudukan dengan sebuah model perekonomian untuk menghasilkan determinan bersama dari *outcome* perekonomian dan *outcome* demografi. Hasil yang didapat akan menghasilkan lagi sebuah isu yang lebih luas termasuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, pengaruh program pajak dan program keamanan sosial pada fertilitas, implikasi dari pertambahan usia dan penduduk usia lanjut pada pertumbuhan, dan kemungkinan dari keseimbangan ganda (*multiple equilibrium*).

Jones (2001), yang memodifikasi model Romer (1994), mengatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi adalah proporsional pada ukuran penduduk. Dalam modelnya ditunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tergantung pada angka pertumbuhan penduduk. Model Jones mengendogenkan angka pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan politik, permintaan terhadap anak, serta persepsi terhadap kepuasan sebagai determinan angka pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pengaruhnya pada fertilitas.

### 2.1.1. Teori Tidak Ada Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi (Teori Revisionis)

*Ketakutan yang paling menipu tentang kekayaan dari sebuah negara adalah peningkatan jumlah penduduknya.*  
Adam Smith

Von Hayek (1988) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan bahwa ketakutan Malthusian, yakni ketakutan akan kelebihan penduduk, sesungguhnya tidak berdasar. Suatu ketakutan yang berlebihan. Dijelaskan bagaimana tingkat yang lebih tinggi dari hubungan antara manusia telah mengembangkan banyak hal untuk mengatasi ketidakpastian Malthus. Walaupun penduduk dunia terus bertumbuh, suka atau tidak suka, nyatanya saat ini penduduk dunia tetap bertahan dan cenderung lebih sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi datang dari kekuatan yang mengubah dan yang memberikan kesempatan pada pembagian tenaga kerja (*division of labor*). Pertumbuhan dan pengembangan datang dari perkembangan pasar (satu dari pemikiran awal Adam Smith). Praktek pasar yang kompetitif mengakibatkan mereka bertumbuh dalam jumlah dan kualitas produksi. Menggantikan sesuatu dengan yang lain yang diikuti oleh kebiasaan yang berbeda terbukti mempengaruhi pertumbuhan, seperti apa yang dinyatakan oleh John Locke dalam *Second Treatise* (1690/1887) pada tahun 1795. Setelah penduduk asli Amerika digeser oleh kolonis Eropa, dari wilayah tanah yang sama mereka dapat menjadi kaya, padahal mereka hanyalah mengolah sebuah wilayah yang dahulu menjadi tempat perburuan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kalau secara mendalam dipikirkan bahwa kepadatan penduduk merupakan sebuah bencana dan mimpi buruk maka hal ini merupakan ketakutan dari sosialisme.

Ide modern bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan pemiskinan di seluruh dunia adalah merupakan sebuah kesalahan. Hal itu adalah konsekuensi besar dari terlalu menyederhanakan teori Malthus tentang kependudukan. Teori Malthus membuat sebuah pendekatan pertama yang dapat diterima akal pada persoalan ini pada waktu itu. Akan tetapi, kondisi modern membuatnya tidak relevan. Asumsi Malthus bahwa tenaga kerja manusia dapat diperlakukan sebagai faktor produksi yang homogen, yakni bahwa upah tenaga kerja sama, bekerja pada bidang pertanian, dengan perlengkapan yang sama dan kesempatan yang sama, mendekati kebenaran sehingga menghasilkan sebuah teori perekonomian dua faktor.

Bagi Malthus (yang juga merupakan seorang penemu pertama dari hukum *decreasing returns*) bahwa setiap peningkatan dalam jumlah tenaga kerja akan mendorong pada penurunan produktivitas marginal. Akan tetapi, dalam kenyataannya tenaga kerja tidaklah homogen, melainkan terdiversifikasi dan terspesialisasi. Dengan intensifikasi mata uang dan perbaikan teknik komunikasi dan transportasi, sebuah peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk membuat pendivisian lanjutan dari tenaga kerja, mendorong pada diversifikasi radikal,



pembagian radikal dan spesialisasi radikal yang memungkinkan pengembangan sebuah faktor produksi yang baru, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini membuat para pekerja untuk mendapatkan keahlian baru yang akan mendapatkan harga pasar yang berbeda. Akhirnya, tenaga kerja mendapatkan *increasing returns* dan bukan *decreasing*. Populasi yang lebih padat dapat menggunakan teknologi dan teknik yang bersumber dari kreativitas atas kompetisi sumber daya yang ada. Jadi, kepadatan penduduk dapat menciptakan teknologi. Bahkan jika teknologi tersebut dikembangkan entah dimana saja dapat saja diimpor dan diadopsi oleh daerah lain.

Ketika tenaga kerja tidak lagi menjadi faktor produksi yang homogen, kesimpulan Malthus tidak dapat digunakan. Jadi, sebuah peningkatan penduduk, karena diferensiasi lanjutan, masih dapat membuat peningkatan lanjutan dari penduduk itu sendiri dan bukan mengurangi produktivitasnya. Untuk periode yang tidak terbatas, peningkatan penduduk dapat menghasilkan peningkatan materil maupun peningkatan peradaban rohani.

### **2.1.2. Teori Ada Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi**

Mankiw–Romer–Weil, Blanchard, teori neoklasik dan teori *endogenous growth* berkata bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Produktivitas sebuah negara dan standar hidup dibangkitkan sebagian oleh pertumbuhan penduduknya. Jelasnya, penduduk adalah satu determinan kunci dari angkatan kerja. Hal ini menyebabkan negara-negara dengan penduduk besar, seperti Amerika Serikat dan Jepang, cenderung menghasilkan produk domestik bruto (PDB) yang lebih besar dibandingkan dengan negara berpenduduk kecil, seperti Luksemburg dan Belanda. Akan tetapi, PDB total bukanlah merupakan sebuah alat ukur yang baik bagi perekonomian. Untuk pembuat kebijakan yang menaruh perhatian pada standar hidup, PDB per kapita lebih penting, karena hal itu berkata tentang kuantitas dari barang dan jasa yang tersedia untuk individu tertentu dalam perekonomian.

Bagaimana pertumbuhan dalam jumlah orang berakibat pada jumlah PDB per kapita? Jawabannya adalah bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi mengurangi PDB per kapita. Ketika angka pertumbuhan populasi tinggi, akan lebih sulit memperlengkapinya karena harus memerlukan sejumlah besar kapital. Sebuah angka kapital per kapita yang lebih kecil akan menghasilkan produktivitas yang lebih rendah dan berujung pada PDB per kapita yang lebih rendah.

Persoalan ini lebih jelas terlihat dalam kasus modal manusia. Negara-negara dengan angka pertumbuhan penduduk yang besar mempunyai jumlah penduduk usia sekolah besar yang besar. Hal ini memerlukan pembiayaan yang besar dalam bidang pendidikan. Akibatnya, tingkat pendidikan cenderung rendah di negara-negara dengan angka pertumbuhan yang lebih tinggi.

Perbedaan angka pertumbuhan penduduk di seluruh dunia besar. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, angka pertumbuhan penduduk sekitar 1% dalam dekade terakhir dan diperkirakan akan naik lebih lambat lagi pada masa mendatang. Berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa negara Afrika, pertumbuhan penduduk sekitar 3% per tahun. Pada angka ini, jumlah penduduk akan dua kali lipat setiap 23 tahun. Mengurangi angka pertumbuhan penduduk menjadi satu cara (khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang) untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi? Apakah positif atau negatif? Debraj Ray (1988) dan Claus Christian Portner (1996) berkata bisa kedua-duanya: positif dan negatif. Portner berkata adalah penting untuk menyadari bahwa pertumbuhan penduduk tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, tetapi melalui variabel lain. Pengaruh positif mungkin akibat sebuah peningkatan dari ukuran pasar (*an increased market size*) atau *scale effect*, pengaruh *technological progress*, dan peningkatan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Pengaruh negatif mungkin akibat sebuah rasio ketergantungan yang lebih tinggi (misal, lebih banyak anak per pekerja dewasa) dan akibat penambahan kapital dan sumber daya. Beberapa pengaruh perubahan tergantung pada kerangka waktu. Misalnya, fertilitas mempunyai efek negatif jangka pendek melalui pengeluaran yang lebih besar pada membesarkan dan merawat anak dan efek positif melalui angkatan kerja kemudian hari.

Bagi Malthus (1798), pengaruh dari faktor perekonomian pada fertilitas dan mortalitas merupakan sebuah elemen sentral dalam teori pertumbuhan ekonomi. Ide ini hanya memberikan sedikit pengaruh pada teori pembangunan modern. Mungkin karena prediksinya tidak tepat yang mengatakan bahwa peningkatan kekayaan (secara tidak terelakkan) akan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Bukti empiris mengatakan – kecuali untuk negara-negara atau rumah tangga yang sangat miskin – peningkatan pendapatan cenderung menurunkan fertilitas. Studi lanjutan dari ide Malthus telah menemukan hubungan antara variabel perekonomian dengan, seperti pendapatan per kapita, tingkat upah, tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan dan urbanisasi, fertilitas dan mortalitas (Wahl (1985), Behrman (1990), Schultz (1989), serta Barro dan Lee (1994)).

#### **a. Pertumbuhan Penduduk Berpengaruh Negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Aliran tradisional, Pesimis atau Alarmis)**

Sebuah pandangan standar dari Malthus berkata bahwa pertumbuhan penduduk mempunyai efek negatif pada kesejahteraan per kapita. Menurutnya, ketika upah meningkat di atas *subsistence*, upah tersebut digunakan untuk prokreasi. Penduduk menikah lebih awal dan mempunyai lebih banyak anak. Jadi, dalam jangka panjang (*long run*) endogenitas dari penduduk mengakibatkan pendapatan per kapita tetap pada angka *subsistence*. Hal ini tidak sepenuhnya salah. Nampaknya pandangan tersebut cocok pada abad keempat belas hingga abad

kedelapan belas. Peningkatan dalam produktivitas, seperti yang terjadi dalam bidang pertanian, meningkatkan *carrying capacity* dari bumi ini, namun penduduk juga meningkat untuk mengisi jurang (*gap*) tersebut.

Pertanyaan yang timbul sebagai reaksi terhadap pandangan Malthus ini adalah apakah perekonomian umat manusia bereaksi secara spontan setelah mempunyai lebih banyak anak? Pengalaman modern menyarankan hasil yang berseberangan (Ray, 1998). Seseorang sesungguhnya telah mengerti bahwa mempunyai anak membutuhkan biaya mahal sehingga mungkin adalah benar bahwa biaya meningkat dalam perkembangan perekonomian, sementara keuntungannya menurun. Pertumbuhan ekonomi nampaknya menggeser norma masyarakat dari sebuah sistem keluarga besar (*extended family*) kepada sebuah sistem keluarga kecil (*nuclear family*). Sementara itu, TPAK meningkat nampaknya akan memberi pengaruh pada semua anggota keluarga *extended family* untuk mencari pekerjaannya sendiri. Di sisi lain, akibat jaminan oleh karena bekerja mendorong anggota keluarga untuk keluar dari keanggotaan *extended family*. Dengan keluarga nuklir, biaya merawat anak diinternalisasi pada tingkat yang lebih besar, yang akan menurunkan fertilitas.

Aspek lain adalah sebuah peningkatan usia perempuan atau penurunan angka kematian bayi dengan pembangunan. Semuanya mempunyai sebuah dampak pada fertilitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori Malthus tidaklah merupakan sebuah teori yang buruk pada abad keempat belas di Eropa. Akan tetapi, pada masyarakat miskin adalah sangat sulit membedakan beberapa determinan dari fertilitas. Fertilitas mungkin cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita. Jadi, bukanlah ide yang buruk bila memikirkan bahwa pertumbuhan penduduk sebagai sebuah variabel eksogen yang didorong oleh hal lain selain pendapatan per kapita. Dalam sebuah masyarakat yang tidak terlalu miskin, mungkin saja jika diperlakukan sebagai variabel endogen, bahwa pertumbuhan penduduk merupakan sebuah fungsi penurun dari pendapatan per kapita. Dalam modelnya, Robert Barro dan Sala-i-Martin (1995, hal. 309) menyatakan hubungan negatif antara fertilitas dan pendapatan per kapita kecuali pada tingkat pendapatan per kapita yang sangat rendah.

#### **b. Pertumbuhan Penduduk Berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

*Population growth is good* (Julian Simon, dalam The Asian Wall Street Journal, Fr-Su, Oct 13-15, 2006, hal. 13)

Dalam model Harrod-Domar terlihat bahwa pertumbuhan penduduk mengakibatkan sebuah angkatan kerja yang lebih besar, yang berkontribusi pada tambahan produksi sehingga terjadi pertentangan antara kapabilitas produksi dari sebuah penduduk yang bertumbuh dan permintaan konsumsinya. Model Solow menangkap hal ini dengan baik. Pertumbuhan per kapita jangka panjang tidak berubah karena pertumbuhan penduduk dan permintaan konsumsi saling seimbang. Sebuah angka yang lebih tinggi dari rasio pekerja-kapital menurunkan produk rata-ratanya.

Apakah seluruh tenaga kerja – bersifat baik – untuk produksi? Dalam beberapa hal, jawabannya adalah 'ya', namun perlu diperhatikan apa yang terjadi dalam produksi. Produksi yang menggunakan teknik yang sama

(terlihat dalam fungsi produksi) disebut dengan *technical progress*. *Technical progress* dapat bersifat endogen karena dipengaruhi oleh ukuran penduduk (*population size*). Pengaruh pertumbuhan penduduk pada *technical progress* dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, pertumbuhan penduduk dapat memacu *technical progress* melalui kepadatan penduduk. Boserup (1981) menyebutnya sebagai "*demand-driven*". Kedua, pertumbuhan penduduk menciptakan inovator potensial dan oleh karenanya sebuah stok ide dan inovasi dapat terjadi untuk pemakaian perekonomian. Inilah '*supply-driven*' yang disebut oleh Simon (1977) dan Kutznets (1960).

Salah satu hasil langsung dari Model Romer (2006) adalah jika penduduk sebuah negara bertumbuh maka pendapatan per kapita juga akan bertumbuh. Semakin banyak orang berinvestasi maka semakin besar pasar untuk penemuan, semakin besar angka penemuan. Sepintas lalu, hal ini nampak membingungkan, karena negara sekecil Luksemburg mempunyai angka pendapatan per kapita sepuluh kali dibandingkan dengan negara berpenduduk besar India. Kremer (1993) dalam Obstfeld (1996) berargumentasi bahwa perkiraan ukuran penduduk harus ditempatkan ke dalam model lebih serius, walau menurut pendapatnya ukuran yang paling cocok adalah penduduk dunia secara keseluruhan. Argumennya didasarkan atas argumen Hayek yang berkata bahwa dalam jangka panjang, keunggulan teknologi (*technological advance*) tersebar tanpa batasan.

## **2.2. Bonus Demografi**

Bonus demografi (*demographic dividend*) didapatkan melalui sejumlah mekanisme. Mekanisme yang paling penting adalah penawaran tenaga kerja (*labor supply*), tabungan (*savings*) dan modal manusia (*human capital*).

### **Penawaran Tenaga Kerja (*Labor Supply*)**

Transisi demografi mempengaruhi penawaran tenaga kerja (*labor supply*) dalam dua cara. Pertama, terdapat sebuah efek mekanikal esensial didasarkan atas generasi ledakan bayi. Ketika generasi ini berumur 15-64 tahun, diasumsikan mereka cenderung bekerja. Hal ini menurunkan rasio penduduk yang tergantung pada yang tidak tergantung. Pada tahun puncak kerja (*peak working years*) usia 25-59 tahun, dampak ini sangat kuat. Jumlah orang yang ingin bekerja (*labor supply*) semakin besar, dan menyediakan pasar tenaga kerja yang dapat menampung pekerja sehingga produksi per kapita meningkat. Kedua, perempuan akan cenderung memasuki lapangan kerja (*workforce*) ketika ukuran keluarga (*family size*) menurun. Dampak ini diperbesar oleh fakta bahwa perempuan dewasa dalam sebuah keluarga kecil, mereka cenderung semakin berpendidikan. Hal ini meningkatkan produktivitas mereka dalam pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, keluarga yang semakin kecil mendorong angkatan kerja yang lebih produktif.

### **Tabungan**

Transisi demografi juga mendorong pertumbuhan tabungan. Tabungan ini kemudian memperbaiki sebuah prospek investasi dan pertumbuhan sebuah negara<sup>1</sup>. Penduduk cenderung menabung lebih banyak pada umur 40-65 tahun. Pada usia ini mereka kurang berinvestasi pada anak-anak mereka, tetapi menabung untuk persiapan pensiun (Paxson, C.H. 1996; Deaton dan Paxson 1997).

Ketika generasi ledakan bayi mencapai umur 40-an tahun, tabungan nasional cenderung meningkat. Terdapat insentif untuk melakukan pilihan yang dapat memperkuat kecenderungan menabung di antara generasi ini. Kondisi lebih sehat dan umur panjang membuat mereka lebih cenderung menabung. Penduduk yang lebih sehat harus merencanakan ekonominya jauh ke depan jika ingin mempertahankan standar hidup setelah memasuki masa pensiun. Dana pensiun lebih penting bagi keluarga kecil dan tinggal di daerah urban. Sebuah keluarga besar sering memelihara keluarga mereka yang lebih tua dan anggota keluarga lanjut usia ini dapat hidup walau tanpa dana pensiun. Semakin modern, keluarga perkotaan cenderung menjadi hanya keluarga inti. Selanjutnya, keluarga inti dimana kedua orang tua bekerja, lebih cenderung menabung untuk masa tua sehingga tabungan keluarga dapat menjadi akumulasi modal (*capital accumulation*) bagi pembangunan sebuah bangsa.

### **Modal Manusia (*Human Capital*)**

Ketiga, transisi demografi mempunyai dampak signifikan terhadap investasi pada modal manusia (*human capital*). Dampak investasi inilah yang paling tidak kelihatan, tetapi mungkin yang paling signifikan dan sulit dijangkau. Transisi demografi dimulai dari perubahan dalam mortalitas yang berdampak pada penduduk hidup lebih lama dan lebih sehat. Sebuah angka harapan hidup yang lebih panjang mengakibatkan perubahan fundamental dalam hal bagaimana penduduk hidup. Sikap dan cara pandang pada pendidikan, keluarga, masa tua, peranan perempuan dan kerja cenderung bergeser. Sebuah masyarakat, khususnya jika dapat mengambil sepenuhnya keuntungan dari bonus demografi, akan mengalami perubahan dalam budaya karena memandang manusia sebagai aset yang semakin berharga.

Sebagai contoh: pendidikan. Terdapat korelasi positif antara pendidikan dan pendapatan. Hausmann dan Székely (1999) melakukan penelitian mengenai dampak dari pendidikan terhadap pendapatan di Amerika Selatan. Seorang pekerja dengan pendidikan 6 tahun mendapat penghasilan secara rata-rata 50 lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai pendidikan formal. Peningkatan yang sangat besar hingga 120% untuk mereka yang berpendidikan 12 tahun, dan lebih dari 200% untuk mereka yang berpendidikan 17 tahun. Jika harapan hidup meningkat, orang tua cenderung memilih mendidik anak-anak mereka pada jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, anak-anak yang lebih sehat lebih cenderung mengalami pengembangan kognitif per tahun sekolah dibandingkan dengan mereka yang kurang sehat (Jamison D.T., Wang J., Hill, K. dan Londono J-L. 1996). Orang tua juga mengetahui bahwa terdapat sebuah kesempatan yang baik bahwa setiap anak akan memperoleh

---

<sup>1</sup> Terjadi sebuah efek perilaku (*behavioral effect*). Penduduk muda dan tua usia cenderung mengkonsumsi lebih banyak dari yang dapat mereka hasilkan, sebaliknya penduduk usia produktif cenderung mempunyai sebuah tingkat *output* ekonomi dan tabungan yang lebih tinggi.

keuntungan dari investasi pendidikan, anak yang lebih sedikit, dapat menyediakan waktu dan uang yang lebih banyak untuk setiap anak. Dampak dari investasi pendidikan ini adalah bahwa secara keseluruhan angkatan kerja yang dimiliki sebuah generasi akan lebih produktif, mendorong upah yang lebih tinggi, dan sebuah standar hidup yang lebih baik. Perempuan dan laki-laki cenderung memasuki angkatan kerja lebih lambat, khususnya karena menempuh pendidikan lebih lama, tetapi kemudian mereka lebih produktif ketika memasuki pasar tenaga kerja.

Semua mekanisme ini sangat bergantung pada kebijakan. Sejumlah tenaga kerja dewasa hanya akan produktif jika terdapat fleksibilitas yang memadai dalam pasar tenaga kerja dan memungkinkan ekspansi mereka, dan juga didukung oleh kebijakan makroekonomi yang mengizinkan dan mendukung investasi. Penduduk hanya akan dapat berinvestasi jika mereka mempunyai akses pada mekanisme menabung yang baik dan mempunyai kepercayaan dalam pasar finansial domestik. Kemudian transisi demografi perlu didukung dalam sebuah kondisi dimana penduduk akan cenderung berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan mereka. Transisi demografi harus dijamin dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Pemerintah memegang peranan yang paling utama dalam menciptakan sebuah lingkungan dimana sebuah penduduk dengan tingkat kesehatan dan pendidikan tinggi dapat dicapai semua orang agar kesempatan demografi dapat dicapai.

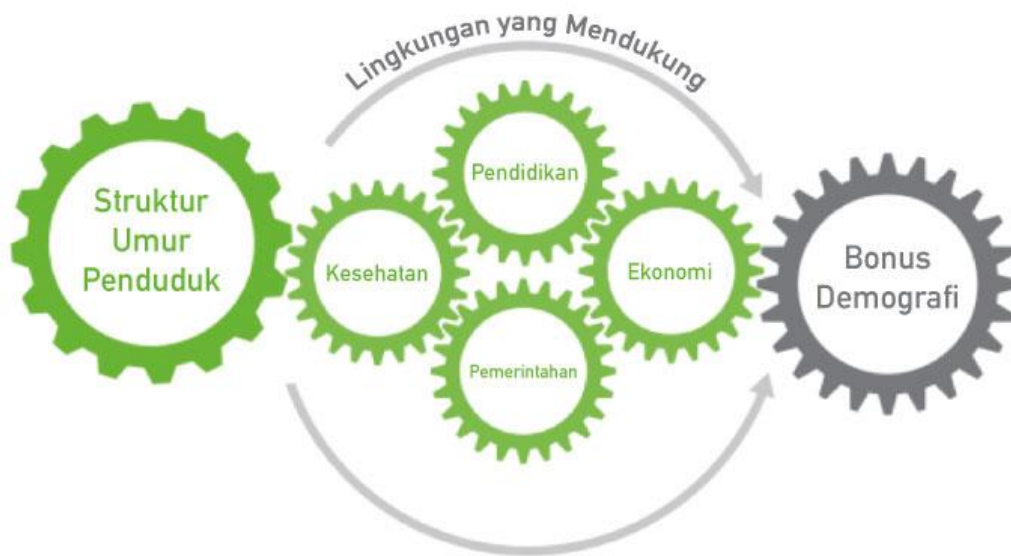
Negara yang mengalami transisi demografi mempunyai sebuah kesempatan untuk mendapatkan 'bonus demografi' yang ditawarkan dengan 'mendewasakan' penduduk usia muda pada waktu lalu. Bonus demografi tidak otomatis. Diperlukan jenis kebijakan yang tepat agar bonus demografi diperoleh. Bonus demografi dapat menolong untuk mendapatkan sebuah periode berkelanjutan dari pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan kritis (*critical policies*) mencakup kesehatan publik (*public health*), keluarga berencana, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan, dan tabungan.

Pengambil keputusan di negara berkembang mempunyai sebuah jendela kesempatan dengan memastikan pendewasaan penduduk usia muda generasi sebelumnya. Pembuat kebijakan perlu memahami bagaimana memaksimalkan dan menangkap bonus ini dengan mengakselerasi transisi demografi, dan memungkinkan tenaga kerja yang melimpah berdaya guna secara produktif di pasar tenaga kerja. Pengambil kebijakan harus merencanakan pelayanan kesehatan pada masa mendatang dan sistem dana pensiun yang diperlukan oleh generasi ledakan bayi ini ketika mereka menjalani usia tua.

Transisi demografi menawarkan pengambil kebijakan sebuah jendela kesempatan (Gambar 2.1). Gambar 2.1 memperlihatkan lingkungan yang mendukung sebuah negara untuk merealisasikan bonus demografi, yakni kebijakan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan dan akses pada pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kebijakan kesehatan reproduksi untuk menolong keluarga mencapai ukuran keluarga yang diinginkan, kebijakan pendidikan untuk meningkatkan akses pada sekolah, dan kebijakan ekonomi untuk mendorong

fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta keterbukaan pada perdagangan, kredit yang terjangkau, dan tabungan (Gribble dan Bremner 2012).

**Gambar 2.1**  
**Transisi Demografi dan Lingkungan yang Mendukung untuk Bonus Demografi**



Sumber: Gribble dan Bremner (2012).

### 2.3. Tinjauan Empiris Hubungan antara Kependudukan dan Pertumbuhan Ekonomi

Furuoka (2009) mendapatkan bahwa pertumbuhan penduduk di Thailand mempunyai sebuah dampak positif pada perekonomian. Rajaguguk (2010) memodelkan bahwa pertumbuhan penduduk baik untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, diperlukan pertumbuhan penduduk.

Bloom dkk (2001) menjelaskan bahwa selama beberapa dekade, studi mengenai hubungan penduduk dan ekonomi hanya berfokus pada ukuran dan pertumbuhan penduduk. Studi ini kurang memperhatikan sebuah isu penting, yakni struktur penduduk (hal dimana penduduk terdistribusikan pada kelompok umur). Distribusi umur penduduk dapat mengubah dan merupakan perilaku ekonomi. Struktur umur mempunyai dampak yang signifikan pada perekonomian. Negara dengan proporsi anak-anak yang besar akan memerlukan sejumlah besar sumber daya untuk mengurus mereka. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika sebuah negara mempunyai penduduk usia kerja yang besar, hal ini akan menambah produktivitas yang dapat

menghasilkan '*demographic dividend*' pada pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan dapat mengambil keuntungan dari kondisi ini maka bonus demografi dapat diraih. Efek kombinasi dari kebijakan pada penduduk usia kerja yang besar, sehat, keluarga, tenaga kerja, keuangan, dan kebijakan modal manusia (*human capital*) dapat menciptakan lingkaran positif (*virtuous cycles*) dalam penciptaan kemakmuran. Jika sebuah penduduk dengan proporsi penduduk usia lanjut yang besar, dampaknya sama dengan jika penduduk usia anak-anak mempunyai proporsi yang besar.

Bloom dkk (2001) menguji kondisi saling mempengaruhi antara transisi demografi dan pertumbuhan ekonomi dalam lima area spesifik di dunia: Asia Timur, Amerika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Jepang.

### **Asia Timur**

Selama lebih dari tiga dekade perekonomian dari delapan negara Asia Timur telah mendatangkan kecemburuan pada dunia. 'Keajaiban ekonomi' Asia Timur menunjukkan kejadian yang paling nyata dalam sejarah 'bonus demografi'. Terjadinya transisi demografi di Asia Timur relatif cepat, dengan periode sekitar 50 hingga 70 tahun. Transisi demografimodern terjadi lebih cepat karena didapat dari keuntungan pengetahuan, pengalaman, dan perkembangan teknologi di kawasan lain. Perbaikan dramatis terjadi dalam kesehatan masyarakat sejak tahun 1940, khususnya melalui perbaikan sanitasi, air bersih, dan perkembangan antibiotik dan antibakterial, sejak tahun 1950 an, terjadi penurunan signifikan dan berkelanjutan dalam kematian bayi dan anak. Kematian bayi di Asia (keseluruhan) turun dari 182 per 1000 pada tahun 1950 ke angka 53 per 1.000 pada tahun 2000 (Bloom dkk, 2001). Hal ini terjadi karena keberhasilan program keluarga berencana yang berhasil membuat pengendalian kelahiran lebih mudah dan lebih diterima. Pada tahun 1950, umumnya perempuan Asia mempunyai enam anak, dan hari ini dua anak. Pada masa antara penurunan dalam mortalitas bayi dan penurunan fertilitas, sebuah generasi ledakan bayi tercipta. Transisi demografi Asia Timur merupakan satu dari faktor paling menentukan dalam pertumbuhan ekonomi yang spektakuler. Antara tahun 1965 dan 1990, pendapatan per kapita meningkat setiap tahun lebih dari 6%.

Penjelasan dari hal ini adalah, pada tahun 1960 an, ketika generasi ledakan bayi mulai bekerja, masuknya mereka ke dalam angkatan kerja merubah proporsi pekerja terhadap penduduk yang ditanggung. Dengan keuntungan dari pendidikan yang baik dan sebuah liberalisasi perdagangan, generasi ini diserap oleh pasar tenaga kerja dengan lebih produktif, kemudian menghasilkan peningkatan wilayah ini dalam produksi ekonomi makro. Penduduk usia produktif meningkat hampir empat kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan penduduk yang tergantung antara tahun 1965 hingga 1990. Sebuah lingkaran positif tercipta, dimana perubahan penduduk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, dan peningkatan pendapatan menekan pertumbuhan penduduk

### **Jepang**



Jepang adalah negara dengan pertumbuhan penduduk tua paling cepat di dunia ini. Jepang mempunyai harapan hidup paling tinggi. Seorang bayi Jepang yang lahir hari ini akan berharap dapat hidup hingga umur 84,74 (estimasi tahun 2015). Sementara itu, pada tahun 1920 umur median Jepang hanya 27 tahun. Angka fertilitas sebesar 1,3 anak per perempuan pada tahun 1999 dan 1,4 tahun pada tahun 2015. Konsekuensi dari peningkatan penduduk tua sangat nampak. Pembuat kebijakan harus menyediakan sarana untuk penduduk usia lanjut. Pada tahun 1999, sekitar empat orang penduduk usia kerja menanggung seorang pensiunan. Pada tahun 1950, Jepang mengalami akhir dari transisi demografinya. Pada saat Jepang menikmati keberhasilan ekonomi dari bonus demografinya, dan dikombinasikan dengan kebijakan yang kuat. Setelah Perang Dunia Kedua, ekonomi Jepang berada dalam krisis. Perang telah menghancurkan hampir setengah dari industri dan infrastrukturnya. Akan tetapi, dengan serangkaian kebijakan yang terkonsentrasi pada pembangunan pabrik modern, dan dengan sebuah angkatan kerja yang terdidik baik dan angka melek huruf yang sangat tinggi, Jepang dapat mendorong ekonominya menjadi negara modern dengan teknologi terkemuka. Jepang menjadi negara satu dari ekonomi yang paling kuat di dunia. Kerja sama pemerintah-industri. sebuah angkatan kerja yang terdidik baik dan penuh motivasi, sebuah fokus pada teknologi, dan sebuah alokasi dana pertahanan yang rendah (1% dari GDP) menghasilkan keberhasilan ekonomi Jepang.

Tetapi pada tahun 2014, 26% penduduk Jepang berumur 65 tahun atau lebih. Kebutuhan mereka akan pengobatan, sosial, dan keuangan merupakan sebuah tantangan ekonomi yang signifikan. Dengan semakin membesarnya keluarga inti, penduduk tua tidak dapat bergantung pada keluarganya untuk menyediakan kebutuhan mereka, dan tanggung jawab jatuh pada negara. Pensiun merupakan sebuah tantangan utama. Dana pensiun ditanggung oleh pajak angkatan kerja pada masa kini. Dengan semakin mengecilnya angkatan kerja yang mendukung sistem pensiun, pembiayaan pensiun dapat mengakibatkan defisit anggaran hingga 20 persen dari PDB tahun 2030. Dengan penurunan angka kelahiran, dan besarnya penduduk pensiun, jumlah penduduk bekerja semakin sedikit, tantangan ekonomi Jepang adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada dekade mendatang, Jepang tidak sendirian menghadapi masalah yang sama. Beberapa negara akan menyusul dalam pengalaman seperti ini.

### **Amerika Utara dan Eropa Barat**

Negara maju telah mencapai sebuah tingkat lanjutan dari transisi demografi. Angka fertilitas di bawah *replacement level*, dan penduduk bertumbuh pada sebuah tingkat yang rendah. Amerika Utara terus bertumbuh, utamanya diakibatkan angka migrasi neto besarnya penduduk pada usia mengasuh anak. Penduduk Eropa Barat telah mendarat dan akan mulai berkurang. Pada periode tahun 2001 hingga 2015, penduduk Eropa diproyeksikan menurut sekitar 6%, Jepang sekitar 3%, Amerika Utara masih bertumbuh sekitar 21%. Negara Sub-Sahara Afrika diproyeksikan bertumbuh sekitar 74%.

Transisi demografi pada negara berkembang dimulai pada abad ke-19. Angka kematian bayi di Inggris dan Wales menurun dari 154 kematian per 1000 kelahiran hidup tahun 1861 menjadi 21 kematian dalam tempo 100

tahun kemudian. Harapan hidup juga meningkat pada periode yang sama dari 60 menjadi 68 tahun. Fertilitas menurun pada hampir semua negara sekitar 50% antara 1970 hingga 1940 (Bloom, dkk 1999). Pada periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, penduduk usia produktif mulai bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penduduk tergantung muda. Hal ini sangat berpotensi berkontribusi pada akselerasi perkembangan ekonomi yang terjadi di negara barat pada periode ini. Setelah Perang Dunia ke-2 (PD II), terjadi rasa pesimis pada negara barat. Pada tahun 1930-an, fertilitas di Amerika Serikat melonjak dari 2,2 anak per perempuan menjadi 3,8 anak pada tahun 1957. Pola ini terjadi juga di Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Fertilitas hanya turun kemudian pada tahun 1960, dan menurun dengan tajam dan mencapai *replacement level* pada pertengahan tahun 1970. Negara-negara Eropa Barat lainnya juga mengalami peningkatan fertilitas setelah PD II, meskipun pada skala yang lebih kecil. Sebuah generasi ledakan bayi tercipta kembali. Perubahan demografi setelah PD II mempunyai sebuah dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di antara penduduk dewasa usia menengah mendorong pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan penduduk pada penduduk usia tua cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi

Caplow, Hicks, Wattenberg (2001) mencatat bahwa fertilitas pada negara industri kaya terus menurun, dan sudah mencapai angka di bawah *replacement level*, 2,1 kelahiran per perempuan pada abad ke-21. Saat ini, generasi ledakan bayi sudah mulai mencapai usia pensiun, dan terus terjadi penurunan dalam angka fertilitas. Artinya, negara-negara barat saat ini sedang berhadapan dengan persoalan penduduk usia lanjut (*aging society*). Penduduk tua akan menjadi tekanan pada sistem keamanan sosial, jasa kesehatan dan pensiun, ketika kelompok penduduk usia kerja yang lebih sedikit harus berkontribusi pada pajak dan ekonomi. Semakin kecil proporsi penduduk usia produktif, ekonomi berpotensi semakin menurun.

Kebijakan Amerika Serikat yang menyambut imigran, akan menjamin tersedianya penduduk usia kerja. Hal yang tidak terdapat di Jepang, dengan hanya 1,2% imigran. Eropa Barat lebih terbuka pada imigran dibandingkan dengan Jepang, meskipun penduduk Jepang akan menyusut dalam 30 tahun ke depan.

Reformasi barang publik akan berfokus pada pelayanan kesehatan, pensiun, dan keamanan sosial. Kesehatan dan pensiun nampaknya akan menjadi lebih penting dalam penyediaan barang publik. Meningkatnya penduduk usia pensiun akan mendorong kelompok penduduk ini untuk bekerja. Hal ini memerlukan kebijakan baru dalam sistem perpajakan dan, pelatihan penduduk usia lanjut. Kebijakan baru adalah berupa penyediaan jasa publik untuk penduduk usia lanjut dan bagaimana mengatur imigran

### **Asia Tengah-Selatan dan Asia Tenggara**

Asia Selatan dan Asia Tenggara mempunyai keterlambatan di belakang Asia Timur dalam hal transisi demografi. Akan tetapi, Asia Tenggara sudah mendapat keuntungan dari bonus demografi dan Asia Selatan-Tengah menyusul. Hingga tahun 1950-an, angka pertumbuhan penduduk di negara-negara Asia umumnya telah mencapai angka stabil sekitar 1% per tahun selama 70 tahun belakangan. Akan tetapi, dari tahun 1950 hingga

1990, angka pertumbuhan penduduk di Asia Tengah–Selatan dan Asia Tenggara meningkat, pada angka sekitar 2% per tahun. Angka ini lebih rendah dari angka pertumbuhan penduduk Afrika, tetapi mirip dengan angka pertumbuhan penduduk Amerika Selatan, tetapi lebih tinggi daripada angka pertumbuhan penduduk Asia Timur, Amerika Utara, dan Eropa. Pertama-tama angka ini disumbang oleh menurunnya angka kematian. Penurunan kematian diakibatkan oleh pemakaian obat-obatan, seperti obat tuberkulosis, demam dan pneumonia, ditambah dengan pemakaian antimalaria. Hal ini mengakibatkan penurunan kematian bayi secara dramatis. Sebagaimana halnya di Asia Timur, fertilitas menurun dan diikuti oleh penurunan mortalitas. Perbaikan kesehatan berdampak pada keluarga memerlukan anak yang lebih sedikit untuk memastikan ukuran keluarga. Program Keluarga Berencana mempunyai dampak yang signifikan. Dampaknya pada bonus demografi, Asia Tenggara dan Tengah Selatan proporsi mempunyai penduduk usia produktif sebesar 60%. Sebelum tahun 2025, Asia Tenggara akan dapat mengejar Asia Selatan dimana proporsi penduduk usia produktif sebanyak 65%. Pada tahun 2010an, Asia Tenggara akan mendapatkan bonus demografi sebesar 1% dari pertumbuhan pendapatan per kapita (Bloom dkk, 2001).

### **Amerika Selatan**

Pertumbuhan penduduk di Amerika Selatan mengikuti pola yang terjadi di Asia Timur. Pada tahun 1965, harapan hidup di Amerika Selatan sedikit di atas 50 tahun. Dampak dari perbaikan dalam kesehatan publik, pada tahun 2000an, harapan hidup di Amerika Selatan telah mendapat angka 70 tahun, sedikit di belakang Asia Timur (72 tahun). Pada tahun 2015, harapan hidup di Amerika Selatan telah mencapai 74,9 tahun.

Terjadi juga penurunan signifikan dalam kematian bayi di Amerika Selatan, dari 91 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1965, menurun menjadi 32 pada tahun 2000 dan 25,6 pada tahun 2000-2005. Gambaran yang hampir sama dengan Asia Timur, yakni sebesar 34 pada tahun 2000. Angka fertilitas juga menurun dari 5 anak per perempuan tahun 1975 menjadi 2,5 tahun 2000, serta menjadi 2,0 tahun 2014.

Meskipun perubahan demografi di Asia Selatan menunjukkan perbaikan sejak tahun 1970, pertumbuhan ekonomi belum sedramatis di Asia Timur. Angka pertumbuhan PDB per kapita di Asia Timur pada tahun 1975-1995 sebesar 6,8 persen, angka pertumbuhan PDB per kapita di Amerika Selatan pada periode yang sama sebesar 0,7 persen. Mengapa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi seperti di Asia Timur? Perlambatan ini juga dipicu masalah politik yang terjadi. Sebuah kombinasi dari lemahnya pemerintahan dan kurangnya keterbukaan dalam perdagangan dipandang mempunyai potensi yang memperlambat ekonomi Amerika Selatan, tetapi perubahan demografi tetap berdampak baik pada pertumbuhan. Bloom dkk (2001) menunjukkan bahwa efek langsung dari perubahan struktur umur berdampak sebesar 11 persen pada pertumbuhan PDB per kapita di Amerika Selatan.

### **Timur Tengah dan Afrika Utara**

Kebanyakan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) secara relatif berada pada awal dari transisi demografi. Negara-negara ini secara relatif telah mempunyai harapan hidup yang tinggi, sebesar 65 tahun (2000). Angka kelahiran masih relatif tinggi. Pada tahun 1960-an TFR di negara MENA sekitar 7 anak dan menurun menjadi tiga pada tahun 2006. Penurunan dimulai dari Libanon, kemudian pada beberapa negara, termasuk Mesir, Iran, dan Tunisia. Ketiga negara terakhir termasuk di antara negara-negara yang mengadopsi kebijakan fertilitas rendah sebagai salah satu untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Di Iran, Libanon, Tunisia, dan Turki, fertilitas telah berada di bawah *replacement level*, yakni sekitar 2,1 anak per perempuan. Walau demikian, secara umum, negara-negara MENA masih mempunyai TFR yang tinggi. Yaman mempunyai TFR paling tinggi di wilayah ini, sebesar 6,2 pada tahun 2005.

Jika fertilitas tidak turun, rasio pekerja pada penduduk yang bergantung tidak akan berubah secara dramatis, dan daerah ini akan mengalami pertumbuhan penduduk tanpa kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang dramatis. Model yang dibuat Bloom menunjukkan bahwa efek angka fertilitas pada angka pertumbuhan PDB per kapita tahunan substansial. Contohnya di Siria, pertumbuhan ekonomi dapat diraih secara signifikan jika rasio penduduk usia produktif pada penduduk total berubah melalui sebuah angka fertilitas rendah. Angka ketergantungan turun satu unit, maka angka pertumbuhan PDB per kapita naik sebesar 1,62 persen per tahun.

Kebijakan akan merupakan sebuah faktor yang signifikan agar negara MENA dapat menikmati bonus demografi. Keterbukaan pada perdagangan global, kebijakan untuk mendukung kesempatan kerja dan penduduk dapat menolong kawasan untuk menyerap pekerja generasi ledakan bayi ke dalam pekerja produktif dan numeratif.

### **Afrika Sub-Sahara**

Kawasan ini belum mengalami transisi demografi tertentu (2000). Sementara mortalitas telah menurun, mortalitas bayi turun sebesar 43% dari tahun 1960 hingga tahun 2000. Rasio ketergantungan, tidak seperti belahan dunia lain, meningkat. Terdapat 53% penduduk Sub-Sahara Afrika berada pada kelompok umur 15-64 tahun (negara-negara lain di dunia umumnya telah mencapai angka 60-70%).

Terdapat beberapa faktor mengapa negara-negara Sub Sahara sulit mendapat bonus demografi. Tingginya fertilitas terjadi karena keterbatasan infrastruktur finansial di wilayah pedesaan mengakibatkan kecilnya insentif untuk menabung. Anak-anak masih dipandang sebagai asuransi pada masa tua. Anak-anak juga masih dipandang sebagai sumber tenaga kerja. Kurangnya pertolongan medis dan penyakit infeksi masih tersebar luas. Norma budaya dan kebijakan kurang mendukung penurunan fertilitas. AIDS membunuh sejumlah besar penduduk usia produktif juga berdampak mengapa bonus demografi sulit didapat.

### **Eropa Timur dan Rusia**

Pola fertilitas di Eropa Timur mempunyai sejarah yang sangat berbeda dengan Eropa Barat. Fertilitas turun sepanjang abad ke-20, dengan hanya sedikit peningkatan setelah PD II, selanjutnya diikuti dengan penurunan setelah aborsi dilegalkan pada tahun 1950. Tujuh dari sepuluh kehamilan berakhir dengan aborsi di Rusia (Bloom 2001). Angka fertilitas di Rusia telah turun dari 7 anak per perempuan hingga hanya 1 dalam 100 tahun terakhir. Latvia, Bulgaria, Ukraine, Slovenia, Federasi Rusia dan Republik Czech menjadi negara dengan TFR terendah di dunia. Peningkatan angka kematian mempercepat penurunan penduduk. Tingginya angka ketergantungan pada alkohol berkontribusi pada peningkatan kardiovaskular, problem sirkular, dan kejahatan mengakibatkan kematian tinggi pada laki-laki Rusia.

Angka fertilitas di kawasan nampaknya akan meningkat kembali pada tahun 2025, tetapi penduduk total akan terus menyusut hingga tahun 2050. Penduduk Rusia akan menurun dari 145 juta tahun 2000 menjadi 104 juta tahun 2050. Dan pada periode yang sama, Ukraina akan menurun dari 50 juta menjadi 30 juta pada periode yang sama. Berlanjutnya penurunan dalam fertilitas dan peningkatan angka kematian mengakibatkan Eropa Timur, khususnya Rusia mempunyai pengalaman perubahan demografi yang sangat berbeda dengan kawasan dunia lain. Pada 30 tahun ke depan, Rusia akan menghadapi pertumbuhan penduduk usia tua dan penyusutan penduduk usia produktif dan usia muda.

Upaya menghitung bonus demografis telah dilakukan, antara lain oleh Mason (2005) dan Maliki (2014). Mason (2005) menghitung bonus demografi 1 dan 2 untuk 228 negara/wilayah di dunia dan menemukan bahwa jendela kesempatan berlangsung sekitar 30-35 tahun untuk negara-negara industri dan ekonomi transisi dan secara nyata lebih panjang di Asia dan Amerika Latin dan lebih panjang lagi di Afrika Sub-Sahara. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa jika dimanfaatkan sepenuhnya maka bonus demografis menyumbang antara satu dan dua persen titik terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 1970-2000 di sebagian besar wilayah di dunia. Berdasarkan pola konsumsi dan produksi, Maliki (2014) menemukan bahwa bonus demografis tahap 1 memberi kontribusi kurang dari satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, bonus demografis tahap 2 memberi kontribusi yang lebih besar, sekitar 1,8%. Artinya, dinamika struktur umur penduduk mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap pencapaian pembangunan ekonomi jika dimanfaatkan dengan optimal. Ukuran yang digunakan untuk bonus demografis dalam kajian Mason (2005) dan Maliki (2014) adalah rasio dukungan (*support ratio*) yang merupakan rasio antara banyak produsen (penduduk yang bekerja) dengan banyak konsumen (penduduk yang tidak bekerja).

## **2.4. Kerangka Pikir Analisis dan Hipotesis Penelitian**

Kerangka pikir analisis penelitian ini didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal fisik (investasi) dan modal manusia (pendidikan, angkatan kerja, dan struktur umur penduduk) (Gambar 2.2). Hipotesis penelitian adalah angka pertumbuhan investasi, angka pertumbuhan

angkatan kerja, dan angka pertumbuhan pendidikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi, sementara angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur mempunyai pengaruh yang positif terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Semakin besar angka pertumbuhan investasi, angka pertumbuhan angkatan kerja, dan angka pertumbuhan pendidikan, semakin besar angka pertumbuhan ekonomi. Semakin besar angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur, semakin kecil angka pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 2.2**

**Kerangka Pikir Analisis Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 dan 2010 dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang investasi pada tahun 2008 dan 2010 dan tentang produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 dan 2013. Idealnya, pembentukan model tetap bruto (PMTB) digunakan sebagai variabel investasi. Akan tetapi, data PMTB hanya tersedia pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, *persentase* sektor non-pertanian digunakan sebagai variabel investasi. Jadi, diasumsikan bahwa *persentase* sektor non-pertanian yang lebih tinggi mengindikasikan investasi yang lebih tinggi.

Ruang lingkup penelitian adalah kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data Susenas 2008 dan 2010 dihitung angka pertumbuhan angkatan kerja, pendidikan, dan rasio ketergantungan umur di setiap kabupaten/kota. Angka pertumbuhan investasi dihitung berdasarkan *persentase* sektor non-pertanian pada tahun 2008 dan 2010. Angka pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan data PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 dan 2013.

Data kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini. Data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam dengan penyusun kebijakan dan pemangku kepentingan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data kualitatif juga berupa dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan laporan pelaksanaan pembangunan. Data kualitatif digunakan untuk mengevaluasi apakah pembangunan sudah mempertimbangkan aspek perubahan struktur umur penduduk dan apakah pembangunan ditujukan untuk memanfaatkan perubahan struktur umur penduduk dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dua provinsi dipilih untuk studi kualitatif tentang fakta dan prospek pemanfaatan jendela kesempatan dan bonus demografis, yaitu Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Sulawesi Utara dipilih untuk mewakili provinsi dengan transisi demografi yang relatif lebih cepat serta jendela kesempatan untuk bonus demografis pertama yang akan lebih dulu berakhir dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah tengah dan timur dan bahkan barat Indonesia. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai provinsi dengan jendela kesempatan demografis pertama yang paling panjang karena transisi demografinya yang lambat. Kota Tomohon di Sulawesi Utara dipilih untuk mewakili kabupaten/kota dengan pencapaian pembangunan kependudukan yang relatif tinggi, sementara Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur dipilih untuk mewakili

kabupaten/kota dengan pencapaian pembangunan kependudukan yang relatif rendah. Analisis kualitatif di kedua provinsi dan di kedua kabupaten/kota terpilih ditujukan untuk mengidentifikasi strategi pemanfaatan jendela kesempatan untuk menuai bonus demografis yang dapat menjadi model bagi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota lain di Indonesia yang situasi transisi demografinya mirip.

### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel tidak bebas dalam analisis kuantitatif adalah angka pertumbuhan ekonomi, sementara variabel-variabel bebas meliputi investasi, angka pertumbuhan pendidikan, angka pertumbuhan angkatan kerja, dan angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur. Variabel investasi yang tersedia pada tingkat kabupaten/kota adalah *persentase* sektor non-pertanian. Variabel pendidikan yang digunakan adalah persentase penduduk usia 19 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas. Variabel angkatan kerja yang digunakan adalah jumlah angkatan kerja. Dengan mengasumsikan bahwa modal fisik dan modal manusia saat ini menentukan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang maka dalam penelitian ini dianalisis pengaruh pertumbuhan modal fisik (investasi) dan modal manusia (pendidikan, angkatan kerja, dan struktur umur penduduk) pada periode 2008-2010 terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2013.

Angka pertumbuhan untuk indikator suatu variabel bebas untuk periode 2008-2010 ( $r_{2008-2010}$ ) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dimana  $I_{2008}$  adalah nilai indikator variabel bebas pada tahun 2008 dan  $I_{2010}$  adalah nilai indikator variabel bebas pada tahun 2010.

$$r_{2008-2010} = \frac{I_{2010} - I_{2008}}{I_{2008}} : 2$$

Angka pertumbuhan ekonomi untuk periode 2010-2013 ( $r_{2010-2013}$ ) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dimana  $PDRB_{2010}$  adalah PDRB pada tahun 2010 dan  $PDRB_{2013}$  adalah PDRB pada tahun 2013.

$$r_{2010-2013} = \frac{PDRB_{2013} - PDRB_{2010}}{PDRB_{2010}} : 3$$

PDRB yang digunakan adalah PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku. PDRB adalah produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.



PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. **PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.**

### 3.3. Metode Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Analisis data deskriptif berupa analisis ringkasan statistik (rata-rata dan deviasi standar) dari variabel-variabel yang digunakan dalam analisis. Analisis bivariat juga dilakukan untuk mengevaluasi hubungan bivariat antara variabel-variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam model. Analisis inferensial berupa analisis regresi tentang hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam model ekonometri yang diajukan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *total factor productivity* (Young 1995; Ray 1998). Model ini mengukur perkembangan teknologi (*technological progress*). Dimulai dari spesifikasi dari sebuah fungsi produksi

$$Y(t) = F(K(t), P(t), E(t)) \dots\dots\dots(1)$$

dimana  $Y(t)$  adalah *output* pada waktu  $t$ ,  $K(t)$  adalah kapital pada waktu  $t$ ,  $P(t)$  adalah penduduk (angkatan kerja) pada waktu  $t$ , dan  $E(t)$  beberapa pengukuran modal manusia pada waktu  $t$ .

Untuk mengatasi kesulitan dalam mengukur  $E$ , dikembangkan model sebagai berikut.

Notasi  $\Delta X(t)$  digunakan yang menyatakan perubahan variabel  $X$  dalam periode  $t$  dan  $t-1$ , sehingga  $\Delta X(t) = X_{t+1} - X_t$ . Misalkan  $E$  konstan (tidak terjadi perubahan dalam teknologi), sehingga persamaan ekonometri dapat menjadi

$$\Delta Y(t) = MPK\Delta K(t) + MPL\Delta P(t) \dots\dots\dots(2)$$

dimana  $MPK$  = *marginal product of capital* dan  $MP$  = *marginal product of labor* pada waktu  $t$ .

Sekarang persamaan (2) dibagi dengan  $Y(t)$ , kemudian dikali dengan  $K(t)$  dan dibagi dengan  $P(t)$  sesuai dengan bagiannya, sehingga didapat

$$\frac{\Delta Y(t)}{Y(t)} = \frac{MPK \cdot \Delta K(t)}{Y(t)} \cdot \frac{\Delta K(t)}{K(t)} + \frac{MPL \Delta P(t)}{Y(t)} \cdot \frac{\Delta P(t)}{P(t)} \quad \dots\dots\dots(3)$$

Selanjutnya,  $\frac{MPK \cdot \Delta K(t)}{Y(t)}$  dan  $\frac{MPL \Delta P(t)}{Y(t)}$  didefinisikan sebagai pembayaran pada satu unit kapital dan tenaga kerja (di bawah asumsi *constant return to scale* dan *perfect competition*).

Didefinisikan  $\sigma_K(t) = \frac{MPK \cdot \Delta K(t)}{Y(t)}$  dan  $\sigma_P(t) = \frac{MPL \Delta P(t)}{Y(t)}$ , sehingga persamaan *output* dituliskan menjadi

$$\frac{\Delta Y(t)}{Y(t)} = \sigma_K(t) \cdot \frac{\Delta K(t)}{K(t)} + \sigma_P(t) \cdot \frac{\Delta P(t)}{P(t)} \quad \dots\dots\dots(4)$$

Dari persamaan ini, terlihat kemudian bahwa  $\sigma_K(t)$  dan  $\sigma_P(t)$  merupakan *persentase* dari kapital dan tenaga kerja. Kedua sisi persamaan ini tersedia dalam data.

Selanjutnya, untuk mengestimasi perubahan teknologi, ditambahkan pada sisi kanan persamaan (4) sebuah variabel yang dinamakan *total factor productivity* (pertumbuhan TFT).

Ke dalam persamaan (4) ditambahkan pertumbuhan *total factor productivity*, sehingga menjadi

$$\frac{\Delta Y(t)}{Y(t)} = \sigma_K(t) \cdot \frac{\Delta K(t)}{K(t)} + \sigma_P(t) \cdot \frac{\Delta P(t)}{P(t)} + TFTG(t) \quad \dots\dots\dots(5)$$

dimana  $TFTG(t)$  adalah pertumbuhan TFT pada waktu  $t$  dan  $t+1$ .

Untuk mengukur TFT dari persamaan (5) didapat dengan mengurangkan bagian kanan dan bagian kiri dari persamaan (5)

$$TFTG(t) = \frac{\Delta Y(t)}{Y(t)} - \sigma_K(t) \cdot \frac{\Delta K(t)}{K(t)} - \sigma_P(t) \cdot \frac{\Delta P(t)}{P(t)} \dots\dots\dots (6)$$

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel utama sebagai faktor pertumbuhan ekonomi: modal fisik, modal manusia, dan *total factor productivity*.

Modal fisik diukur dengan investasi (persentase sektor pertanian), sementara variabel kependudukan diukur dalam *input* angka pertumbuhan ‘tenaga kerja’  $P(t)$ . Angka pertumbuhan tenaga kerja diukur dalam angka pertumbuhan pendidikan, angka pertumbuhan angkatan kerja, dan angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur. Dengan model ekonometri ini diharapkan dapat diukur pengaruh perubahan struktur umur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Model ekonometri yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$r_{PDRB} = b_1 r_{NT} + b_2 r_D + b_3 r_{AK} + b_4 r_{RKU}$$

$r_{PDRB}$  adalah angka pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku pada periode 2010-2013,  $r_{NT}$  adalah angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian pada periode 2008-2010,  $r_D$  adalah angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas lulusan SMA ke atas pada periode 2008-2010,  $r_{AK}$  adalah angka pertumbuhan angkatan kerja pada periode 2008-2010, dan  $r_{RKU}$  adalah angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur pada periode 2008-2010.  $b_i$  adalah estimasi parameter untuk variabel bebas ke- $i$ ,  $i = 1, 2, 3$ , dan 4. Jadi, dengan model ekonometri ini diasumsikan bahwa *technological progress* sama di semua kabupaten/kota di Indonesia.

Pengujian signifikansi kecocokan model (*goodness of fit*) dilakukan dengan menggunakan statistik  $F$ , sementara pengujian signifikansi pengaruh setiap variabel bebas dilakukan dengan menggunakan statistik  $t$ . Pengujian signifikansi menggunakan taraf kenyataan 0,10.

## BAB 4

### PROFIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PROVINSI SULAWESI UTARA

#### 4.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi kepulauan yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki banyak persebaran gugusan pulau besar dan kecil (Gambar 4.1). Dengan kondisi wilayah kepulauan tersebut, maka luasan perairan menjadi lebih luas dari daratan. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan, dengan luas daratan  $\pm 47.350 \text{ km}^2$  dan luas perairan laut  $\pm 200.000 \text{ km}^2$ , yang membentang sepanjang 160 km dari Utara (Pulau Palue di laut Flores) sampai Selatan (Pulau Ndana) di Laut Timor dan sepanjang 400 km dari bagian barat di Pulau Komodo yang berbatasan dengan Selat Sape, Nusa Tenggara Barat, sampai Alor di bagian Timur, berbatasan dengan Timor Leste di Selat Ombai. Secara astronomis, wilayah ini terletak di antara  $8^\circ$ - $12^\circ$  Lintang Selatan dan  $118^\circ$  –  $125^\circ$  Bujur Timur. Wilayah ini meliputi 566 pulau. Di antaranya, 44 pulau yang berpenghuni dan 508 pulau yang telah bernama. Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di bagian Tenggara Indonesia, dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste. Gugusan pulau besar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor dan kepulauan Alor, sehingga Nusa Tenggara Timur dikenal juga dengan sebuah akronim FLOBAMORA. Flobamora mempunyai makna yang luas sebagai suatu ungkapan adanya komitmen menyatukan berbagai etnik, kultur, bahasa dan agama yang mencirikan pluralistik masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada bagian terselatan dari gugusan kepulauan Indonesia. Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia (Negara Australia)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Nusa Tenggara Timur mempunyai jarak relatif dekat dengan negara tetangga Australia dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya, sehingga Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari lingkaran Pasifik dan memiliki akses yang besar untuk mengakselerasi era perdagangan bebas.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Selain itu, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655) sehingga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuklah 12 Daerah Tingkat II, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur. Secara administrasi pemerintahan sampai dengan tahun 2014, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 Kota dan 21 Kabupaten, 306 Kecamatan, 318 Kelurahan dan 2.950 Desa. Pada tahun 2007, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 566 pulau besar dan kecil, diantaranya sebanyak 42 pulau dihuni/bernama dan 524 pulau tidak/belum bernama.

**Gambar 4.1**  
**Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur**



Pada Gambar 4.2 disajikan lima provinsi dengan angka kemiskinan (%) tertinggi di Indonesia (2014). Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada urutan ketiga setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 sebanyak 19,6% dari penduduk total.

Walau mempunyai proporsi penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia (2014), tren pertumbuhan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat menjanjikan. Model yang cocok dengan tren ini adalah model parabola (Gambar 4.3). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat pesat.

Gambar 4.4 menunjukkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih semakin meningkat

dalam periode tahun 1996 hingga tahun 2013. Pada tahun 1996, hanya sebanyak 23,7 % dari persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada tahun 2013, angka ini meningkat menjadi 64,7%.

**Tabel 4.1**

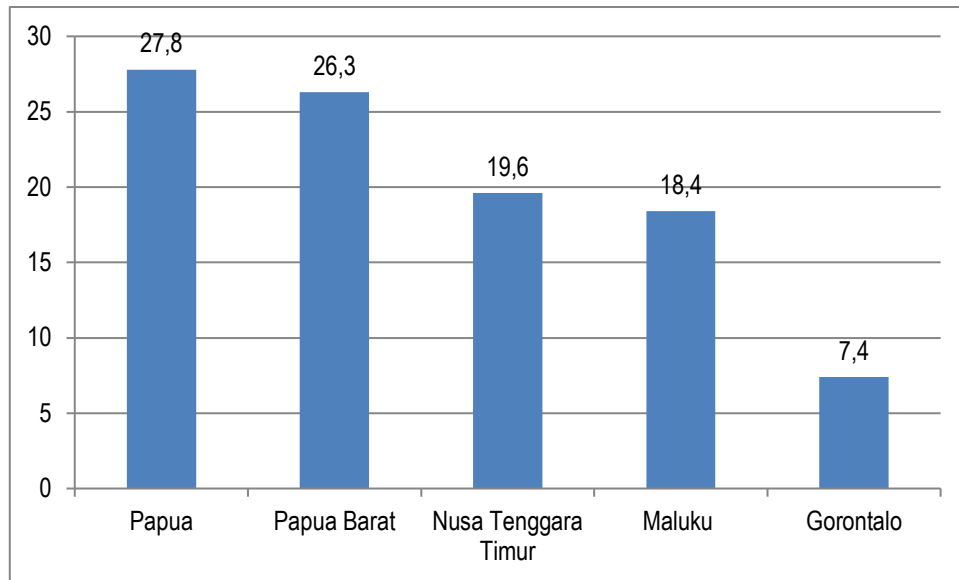
**Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota: Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014**

NO	KABUPATEN	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Sumba Barat	6	74
2	Sumba Timur	22	156
3	Kupang	24	176
4	Timor Tengah Selatan	32	278
5	Timor Tengah Utara	24	193
6	Belu	12	81
7	Alor	17	175
8	Lembata	9	151
9	Flores Timur	19	250
10	Sikka	21	160
11	Ende	21	278
12	Ngada	12	151
13	Manggarai	11	162
14	Rote Ndao	10	89
15	Manggarai Barat	10	169
16	Sumba Barat Daya	11	131
17	Sumba Tengah	5	65
18	Nagekeo	7	113
19	Manggarai Timur	9	176
20	Sabu Raijua	6	62
21	Malaka	6	51
22	Kota Kupang	12	127
<b>JUMLAH</b>		<b>306</b>	<b>3.268</b>

*Sumber: Permendagri No. 39 Tahun 2015*

**Gambar 4.2**

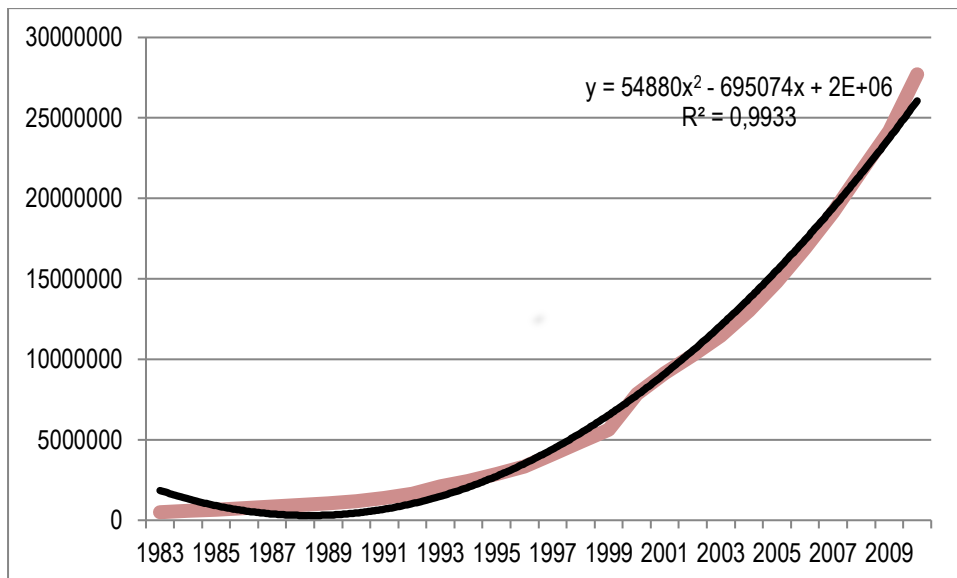
**Lima Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi (%): Indonesia September 2014**



Sumber : Statistik Indonesia

**Gambar 4.3**

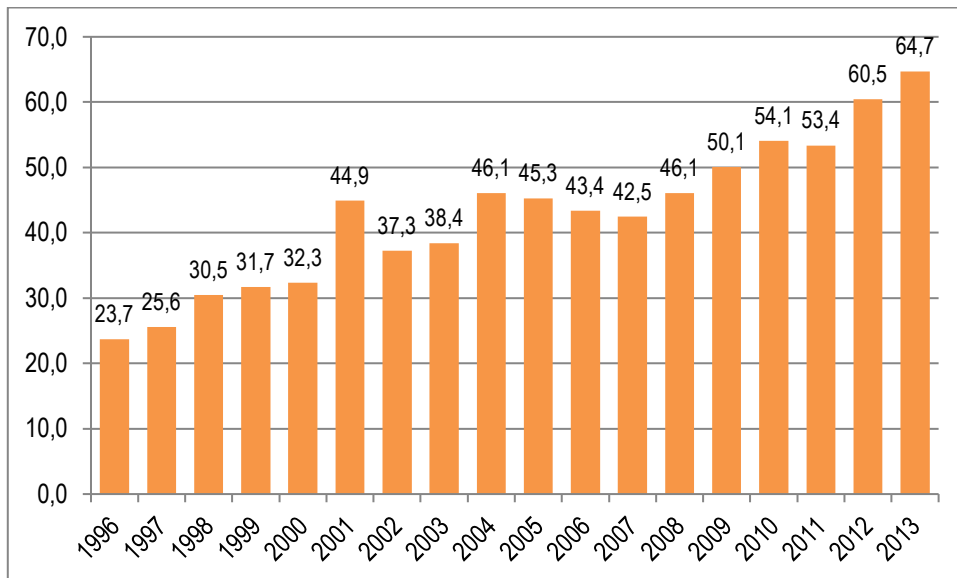
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tren PDRB: Provinsi Nusa Tenggara Timur 1983-2010**



Sumber : World Bank, 2015, diolah

**Gambar 4.4**

**Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (% total persalinan):  
Provinsi Nusa Tenggara Timur 1996-2013**



Jumlah dan proyeksi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2010-2020 ditunjukkan dalam Tabel 4.2. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan akan meningkat dari 5,1 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 5.203.514 jiwa pada tahun 2016 dan 5.541.394 jiwa pada tahun 2020. Jadi, penduduk Nusa Tenggara Timur diproyeksikan akan bertambah sekitar 421.333 ribu jiwa dalam periode 2015-2020.

Penurunan tingkat kelahiran dan kematian telah mengakibatkan penduduk usia produktif meningkat dari 53,7% pada tahun 1971 menjadi 58,6% pada tahun 2010. Akibatnya, rasio ketergantungan umur turun dari 86,3 pada tahun 1971 menjadi 70,6 pada tahun 2010.



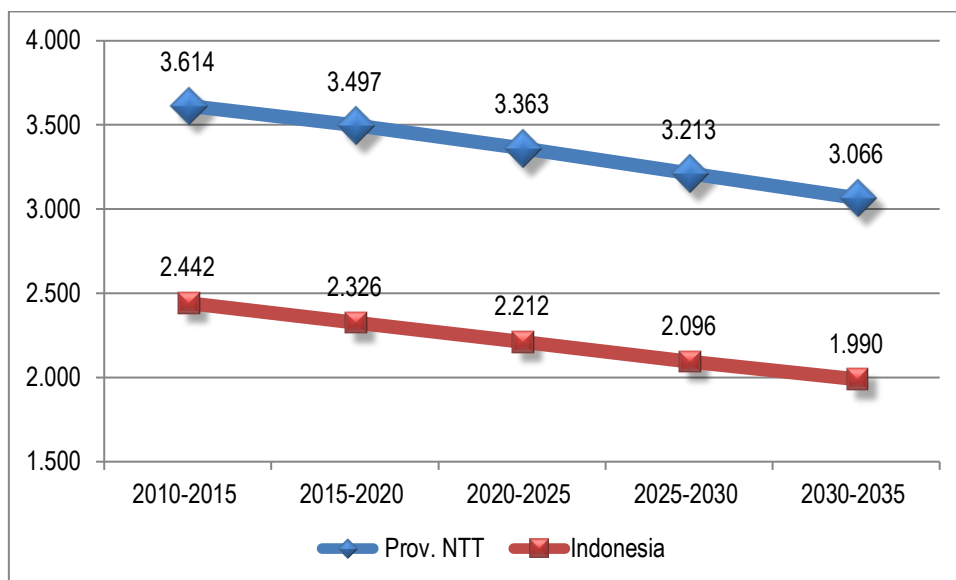
**Tabel 4.2**  
**Proyeksi Penduduk: Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2020**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumba Barat	111.499	113.691	115.672	117.787	119.907	121.921	123.913	125.776	127.872	129.710	131.600
Sumba Timur	228.791	232.594	236.494	240.190	243.009	246.294	249.606	252.704	255.601	258.486	261.503
Kupang	305.389	312.215	319.895	328.688	338.415	348.010	360.228	372.777	387.479	403.582	421.618
Timor Tengah Selatan	443.111	446.002	448.693	451.922	456.152	459.310	461.681	463.980	465.970	467.990	469.673
Timor Tengah Utara	230.792	233.718	236.703	239.503	242.082	244.714	247.216	249.711	251.993	254.171	256.299
Belu	189.123	192.808	196.330	199.990	203.284	206.778	210.307	213.596	216.783	220.115	223.176
Alor	190.919	192.807	194.719	196.613	198.200	199.915	201.515	202.890	204.380	205.599	206.806
Lembata	118.406	120.783	123.977	126.704	129.482	132.171	134.573	137.714	140.390	143.074	145.685
Flores Timur	233.578	236.505	239.314	241.590	244.485	246.994	248.889	251.611	253.818	255.916	257.785
Sikka	301.579	304.221	306.431	309.008	311.411	313.509	315.477	317.292	318.920	320.401	321.790
Ende	261.713	263.505	265.304	266.909	268.314	269.724	270.886	272.084	272.988	273.929	274.599
Ngada	143.007	145.503	147.891	150.186	152.519	154.693	156.101	159.081	161.196	163.217	165.314
Manggarai	293.888	299.006	304.441	309.614	314.491	319.607	324.014	329.198	333.912	338.424	342.908
Rote Ndao	120.706	126.009	131.467	137.182	142.106	147.778	153.792	159.614	165.807	172.104	178.805
Manggarai Barat	222.913	228.912	234.811	240.905	245.817	251.689	257.582	263.207	269.029	274.689	280.412
Sumba Tengah	62.796	63.983	65.070	66.314	67.393	68.515	69.606	70.719	71.801	72.800	73.820
Sumba Barat Daya	286.403	292.798	299.534	306.195	312.510	319.119	325.699	331.894	338.427	344.720	350.923
Nagekeo	130.691	132.575	134.427	136.201	137.919	139.577	141.310	142.804	144.414	145.826	147.189
Manggarai Timur	253.911	257.877	261.777	264.979	268.418	272.514	276.620	280.118	283.313	287.207	289.836
Sabu Raijua	73.912	76.223	78.592	80.897	83.501	85.970	88.826	91.512	94.406	97.379	100.684
Malaka	164.888	168.210	171.303	174.391	177.398	180.382	183.387	186.312	189.220	191.892	194.776
Kota Kupang	338.177	348.673	358.382	368.199	380.084	390.877	402.286	412.708	423.800	434.972	446.193
Jumlah	4.706.192	4.788.618	4.871.227	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302	5.371.519	5.456.203	5.541.394

Tingkat kelahiran relatif tinggi di Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, tingkat kelahiran paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (Gambar 4.5).

**Gambar 4.5**

**Angka Fertilitas Total: Nusa Tenggara Timur dan Indonesia 2010-2035 (anak per 1.000 perempuan)**



Sumber: BPS, Bappenas, dan UNFPA (2013) (diolah)

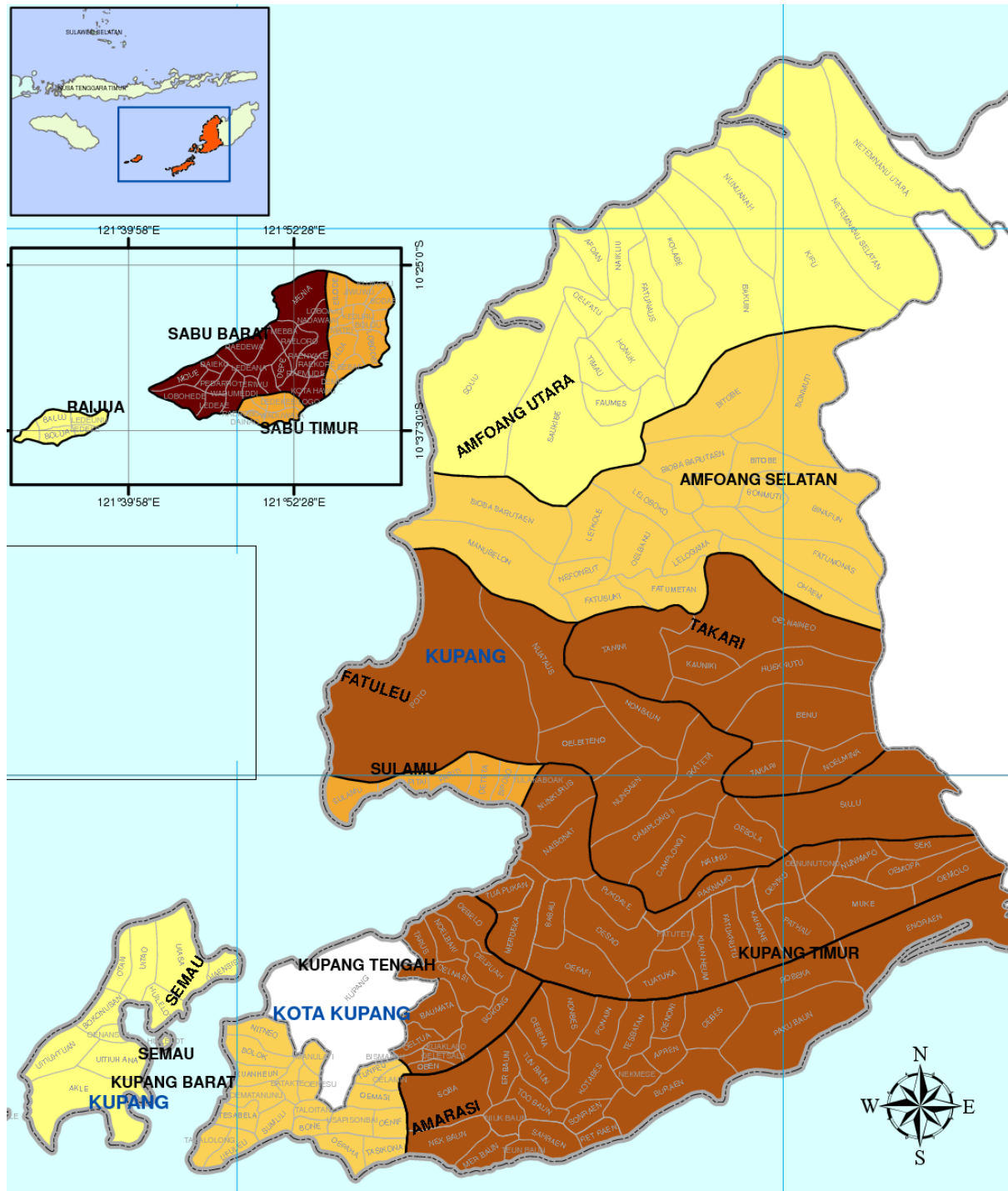
#### 4.2. Profil Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang terletak di ujung barat pulau Timor Indonesia dengan luas wilayah darat 5,437,44 dan laut 4,063 , Letak geografis antara 9°19 – 10°57 LS dan 121°30 – 124°11 BT, dengan batas-batas wilayahnya: Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sawu, Selat Ombai, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Ambeno/Timor Leste, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rote Ndao dan Laut Sawu (Gambar 4.6). Tingkat kemiringan rata-rata 45% dan 51,70% lahan berada berada pada ketinggian 150 m lebih diatas permukaan laut (10,15% diatas ketinggian lebih dari 500 m). Temperatur udara rata-rata minimum 20,1-24,5 dan maksimum 29,9-35,2. Kelembaban udara antara 64%-90%, arah/kecepatan angin antara 120-330 knot dan tekanan udara antara 1006-1014 milibar, penyinaran matahari antara 36%-99% dan rata-rata curah hujan 110 hari per tahun.

Kabupaten Kupang merupakan kabupaten yang paling selatan di Negara Republik Indonesia. Kabupaten ini memiliki 24 buah pulau, dimana 3 buah pulau diantaranya telah berpenghuni, yakni Pulau Timor dengan luas

4.937.62 km<sup>2</sup>, Pulau Semau dengan luas 246.66 km<sup>2</sup>, dan Pulau Kera seluas 1,5 km<sup>2</sup>. Sisanya 21 pulau merupakan pulau-pulau tidak berpenghuni. Kabupaten Kupang terdiri atas 160 desa dan 17 kelurahan (Tabel 4.3).

**Gambar 4.6**  
**Peta Kabupaten Kupang**



Sumber : Bappeda Kabupaten Kupang

Tabel 4.3

## Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah: Kabupaten Kupang

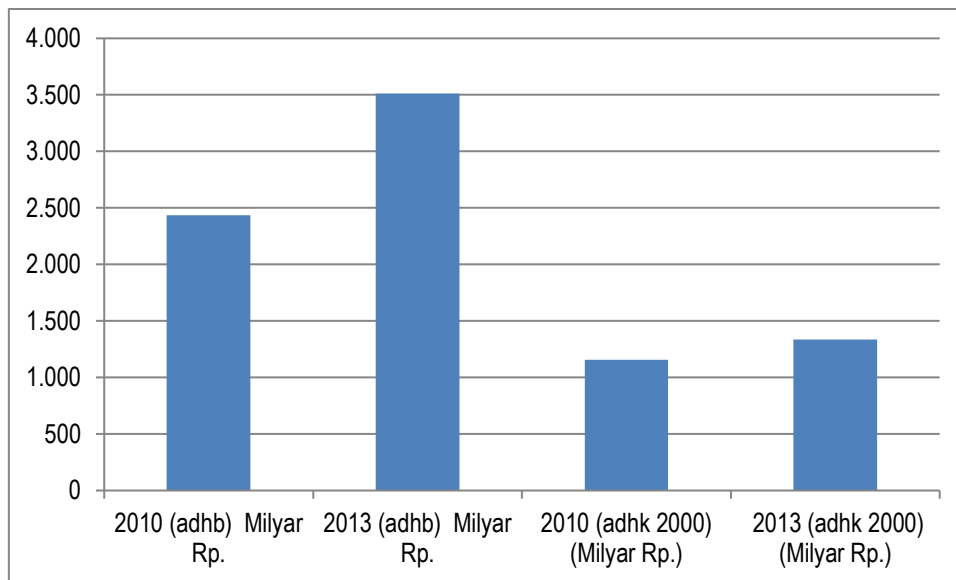
No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Takari	9	1	586,51
2	Taebenu	8	–	NA
3	Sulamu	6	1	270,12
4	Semau Selatan	6	–	105,24
5	Semau	8	–	143,42
6	Nekamese	11	–	122,44
7	Kupang Timur	8	5	160,99
8	Kupang Tengah	7	1	103,46
9	Kupang Barat	9	3	149,72
10	Amabi Oefeto	7	–	177,63
11	Amabi Oefeto Timur	10	–	236,72
12	Amarasi	8	1	737,47
13	Amarasi Barat	7	1	205,12
14	Amarasi Selatan	4	1	172,81
15	Amarasi Timur	4	–	162,91
16	Amfoang Utara	5	1	212,64
17	Amfoang Barat Laut	6	–	428,59
18	Amfoang Barat Daya	4	–	167,61
19	Amfoang Timur	5	–	27,053
20	Amfoang Tengah	4	–	Tidak tersedia
21	Amfoang Selatan	6	1	481,81
22	Fatuleu	9	1	400,29
23	Fatuleu Barat	5	–	487,96
24	Fatuleu Tengah	4	–	99,50

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (2014).

Gambar 4.7 memperlihatkan PDRB Kabupaten Kupang tahun 2010 dan 2013 menurut harga berlaku dan harga konstan 2000. Pada tahun 2010 dan 2013, PDRB Kabupaten Kupang sebesar 2.435 miliar rupiah dan 3.509 miliar rupiah. Sementara itu, menurut harga konstan 2000, PDRB Kabupaten Kupang tahun 2010 dan 2013 sebesar 1.158 miliar rupiah dan 1.338 miliar rupiah.

**Gambar 4.7**

**PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan: Kabupaten Kupang 2010 dan 2013**



Gambar 4.8 memperlihatkan dinamika proporsi penduduk Kabupaten Kupang tahun 2016 dan 2020. Pada tahun 2016 dan 2020, Penduduk Kabupaten Kupang masih didominasi penduduk usia muda (0 – 24 tahun). Proporsi penduduk laki-laki di Kabupaten Kupang pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan proporsi penduduk perempuan untuk kelompok usia muda (0-24 tahun).

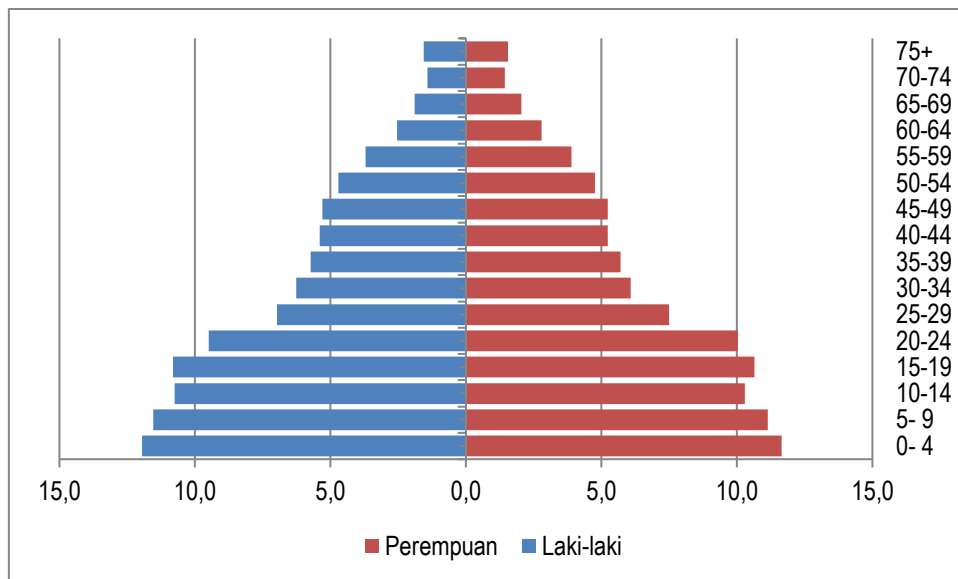
Gambar 4.9 memperlihatkan jumlah penduduk yang bekerja tahun 2009 hingga 2013 sebanyak berturut-turut sebanyak 173.483, 174.098, 178.816, 116.880, 145.017, 137.281, dan 140.800 jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja untuk tahun yang sama berturut-turut sebanyak 180.184, 179.089, 185.436, 120.722, 148.358, 140.763, dan 145.156 jiwa.

Di Kabupaten Kupang, perbedaan Angka Partisipasi Murni antara Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas terlihat terjadi penurunan yang sangat nyata. Angka Partisipasi Murni tingkat Sekolah Dasar rata-rata pada periode 1996 hingga tahun 2013 sebesar 89,169 (Gambar 4.10). Kemudian angka ini untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama menurun drastis menjadi 49,689, dan tetap menurun untuk tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas menjadi 30,125.

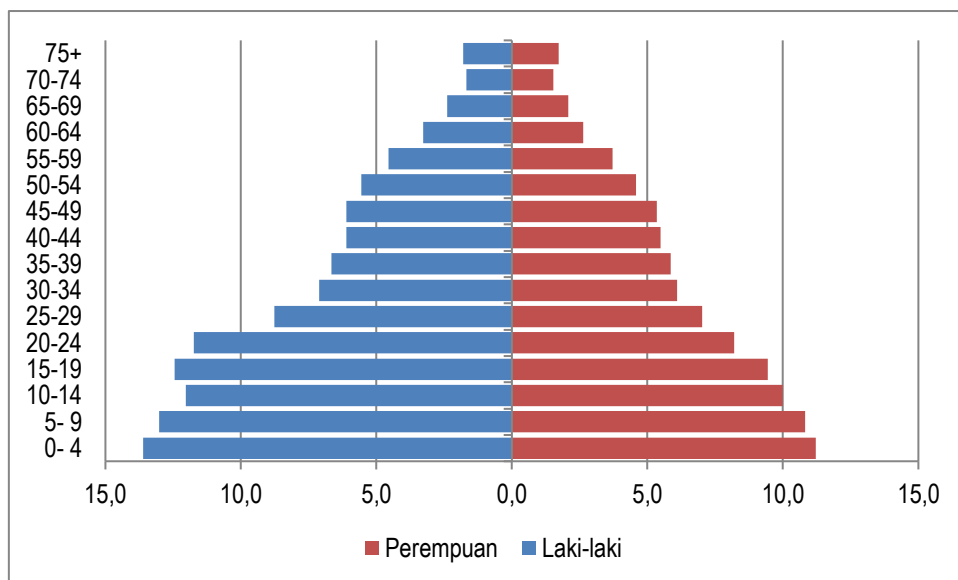
**Gambar 4.8**

**Piramida Penduduk Kabupaten Kupang: 2016 dan 2020**

**2016**



**2020**

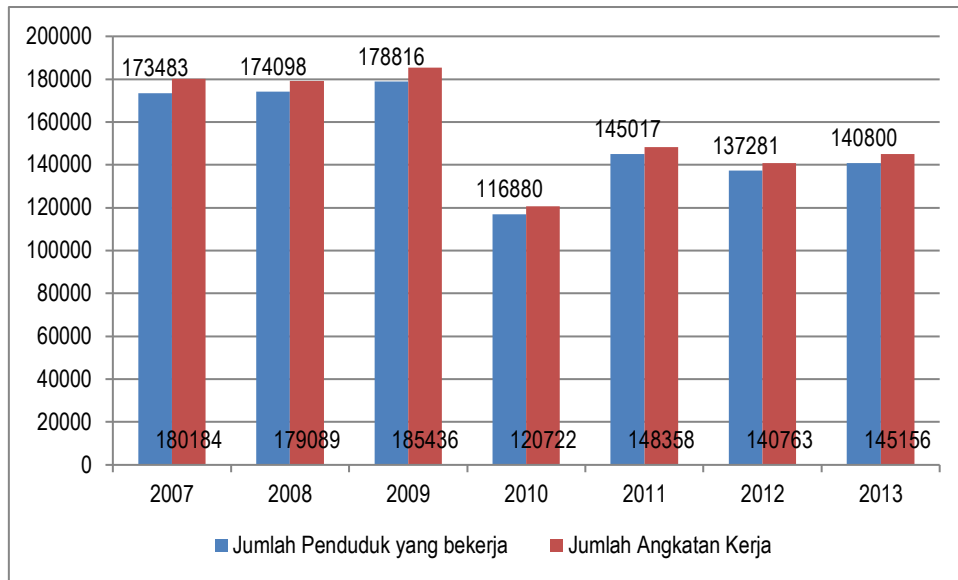


Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia (Bappenas, BPS, dan UNPFA 2014, diolah).

Garis kemiskinan Kabupaten Kupang tahun 2005 hingga 2013 menunjukkan peningkatan dari Rp. 98.125 pada tahun 2005 menjadi Rp. 252.934 pada tahun 2013 (Gambar 4.11). Pada periode tahun 2002–2013 persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) di Kabupaten Kupang terlihat menurun dari 36,4% pada tahun 2002 menjadi 20,1% pada tahun 2013.

**Gambar 4.9**

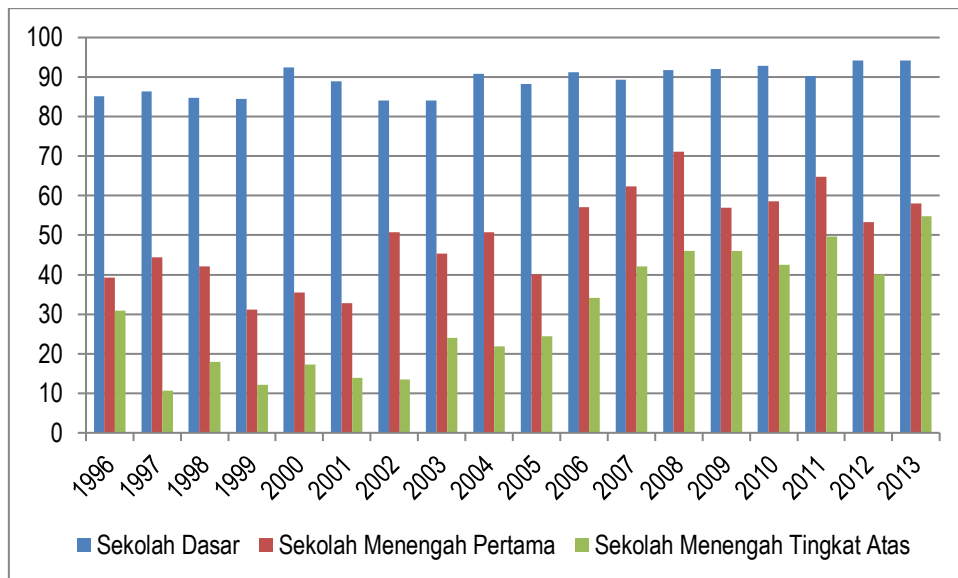
**Penduduk yang Bekerja dan Jumlah Angkatan Kerja, Kabupaten Kupang, 2007-2013**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kupang, 2014

**Gambar 4.10**

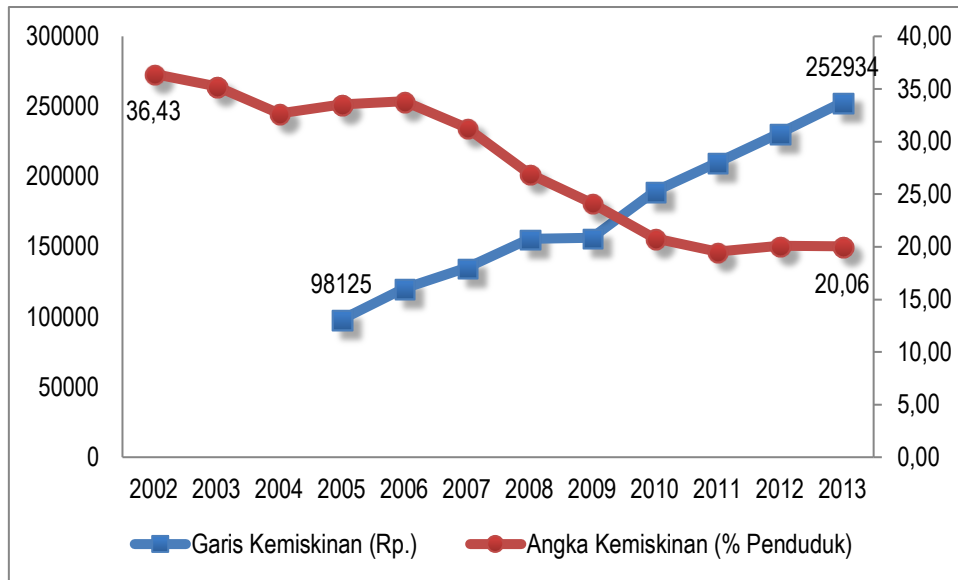
**Angka Partisipasi Murni, Kabupaten Kupang, 1996-2013**



Sumber: Badan Pusat Statistik dan INDO-DAPOER (World Bank, 2015).

**Gambar 4.11**

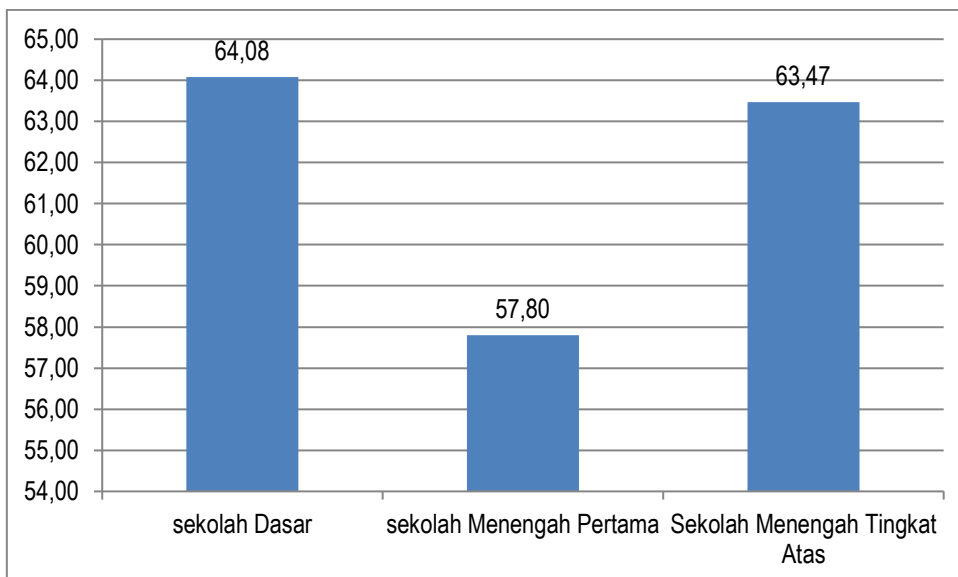
**Garis Kemiskinan (rupiah) dan Angka Kemiskinan (%): Kabupaten Kupang 2002-2013**



Pada Gambar 4.12 disajikan nilai ujian nasional rata-rata untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Kupang. Terlihat bahwa pada tahun 2009, nilai ujian nasional rata-rata untuk Kabupaten Kupang untuk ketiga jenjang pendidikan di atas berturut-turut adalah sebesar 64,08; 57,80; dan 63,47.

**Gambar 4.12**

**Nilai Ujian Nasional SD, SMTP, dan SMTA Rata-rata: Kabupaten Kupang 2009**

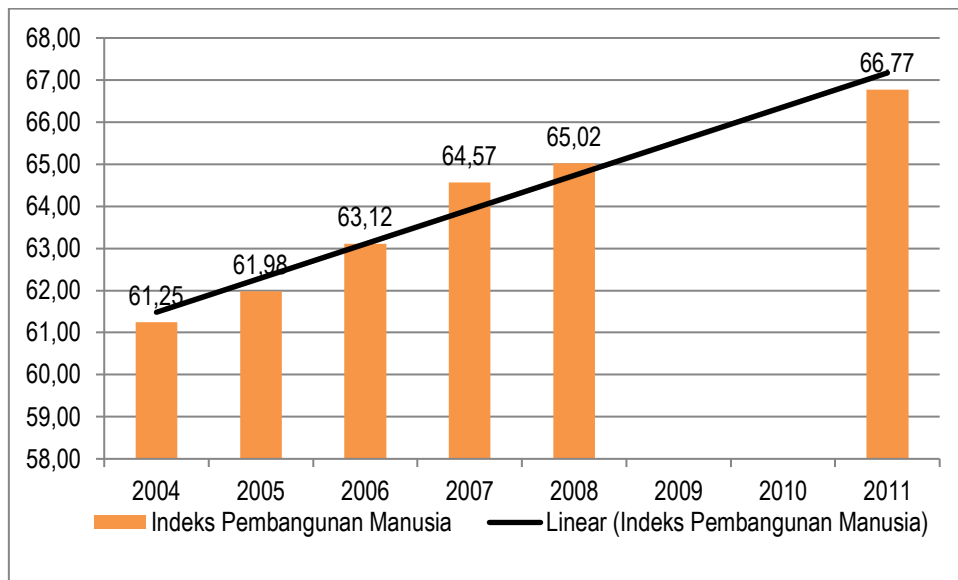


Sumber: Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kupang (2014).



Dalam hal pembangunan manusia, Kabupaten Kupang mengalami kemajuan yang berarti. Pada periode 2004-2011, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kupang meningkat dari 61,25 pada tahun 2004 menjadi 65,02 pada tahun 2008 (Gambar 4.13). Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Kupang meningkat menjadi 66,77.

**Gambar 4.13**  
**Indeks Pembangunan Manusia: Kabupaten Kupang 2004-2011**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2015).

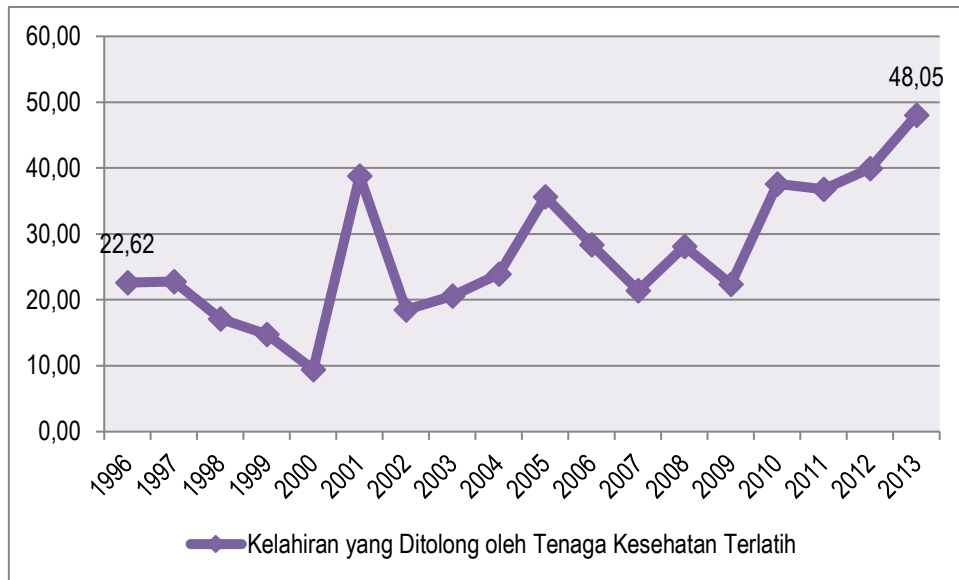
Kabupaten Kupang juga mengalami kemajuan yang berarti dalam bidang kesehatan. Kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih berfluktuasi dengan tren meningkat pada periode 1996-2013 dan meningkat secara nyata dari 22,6% pada tahun 1996 menjadi 48,1% pada tahun 2013 (Gambar 4.14).

Pada periode 1996-2013 di Kabupaten Kupang rata-rata rumah tangga yang dialiri listrik sebesar 46,45%, rumah tangga dengan sanitasi aman (sehat) sebanyak 66,06%, dan rumah tangga (%) yang mendapat air bersih sebesar 43% (Gambar 4.15).

*Poverty Gap Index* (PGI) di Kabupaten Kupang antara tahun 2002 – 2013 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2002 sebesar 6,63 menjadi 3,28 pada tahun 2013 (Gambar 4.16). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang mengalami perbaikan dalam hal penurunan kemiskinan.

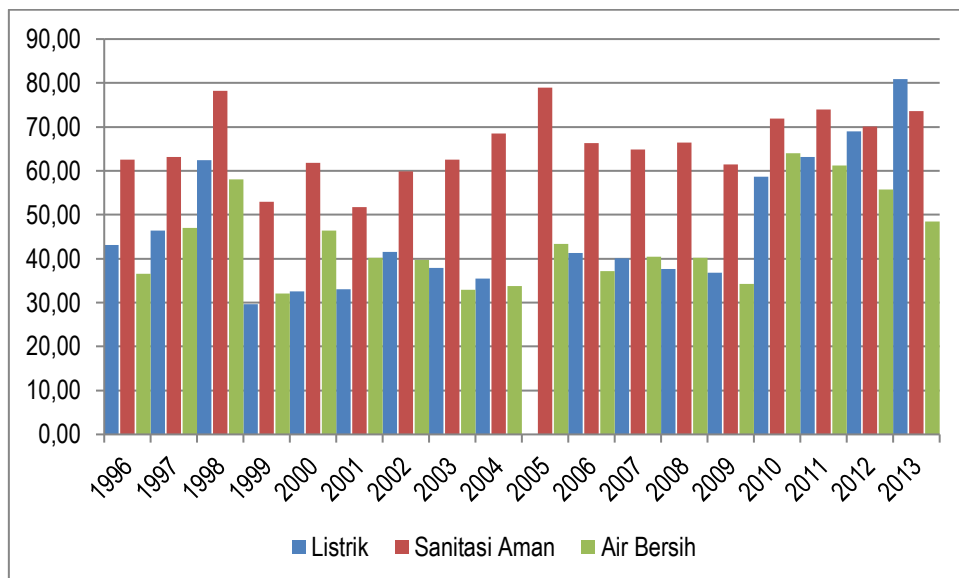
**Gambar 4.14**

**Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (%): Kabupaten Kupang 1996-2013**



**Gambar 4.15**

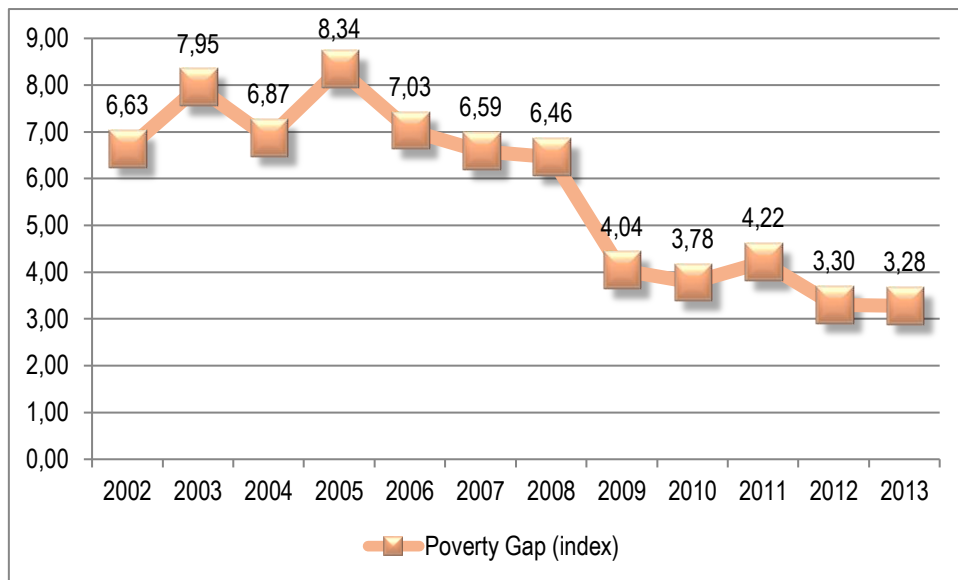
**Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Sanitasi Sehat, dan Air Bersih (%): Kabupaten Kupang 1996-2013**



Sumber: INDO-DAPOER (World Bank, 2015).

**Gambar 4.16**

**Poverty Gap Index (%), Kabupaten Kupang, 2002-2013**



Sumber: INDO-DAPOER (Worldbank, 2015).

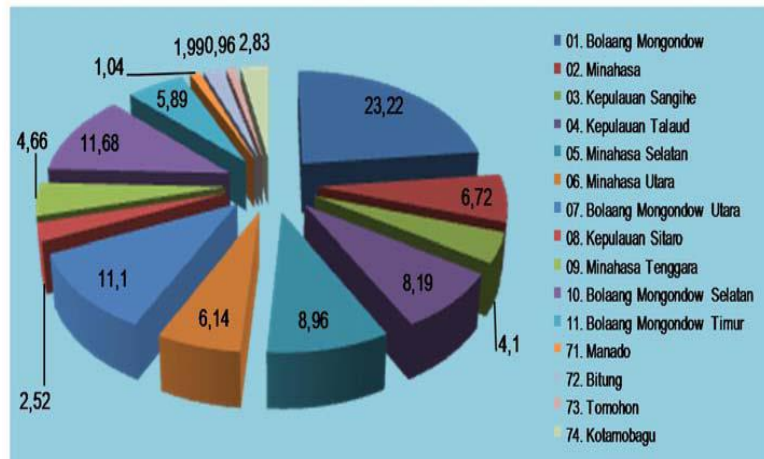
### 4.3. Profil Provinsi Sulawesi Utara

#### 4.3.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung Utara pulau Sulawesi pada posisi 0°15' – 5°34' Lintang Utara dan 123°07' – 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Filipina dan Laut Pasifik di sebelah Utara serta Laut Maluku di sebelah Timur. Di sebelah Selatan dan Barat berbatasan masing-masing dengan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 15.273,10 km<sup>2</sup> (luas ini mengalami perubahan karena dihitung dengan menggunakan peta rupa bumi skala 1 : 50.000).

Wilayah administratif terdiri dari 11 kabupaten dan 4 (empat) kota, 156 kecamatan dan 1.658 desa dengan ibukota provinsi adalah Kota Manado. Dari ke 15 kabupaten/kota tersebut, wilayah terluas adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu 3.547,49 km<sup>2</sup> atau 23,22 persen dan terkecil adalah kota Tomohon yaitu 146,6 km<sup>2</sup> atau 0,96 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Gambar 4.17 memperlihatkan perbandingan proporsi luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

**Gambar 4.17**  
**Persentase Luas Wilayah Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Utara**



Di Sulawesi Utara terdapat 41 gunung yang terletak pada beberapa kabupaten/kota. Tercatat ada sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi, temperatur rata-rata di kota Manado dan sekitarnya sepanjang tahun berkisar 26,2°C. Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin Barat yang membawa hujan di pantai Utara, sedangkan dalam bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin Selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk, seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Passi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6°C.

#### 4.3.1. Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara, seperti daerah lainnya di Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan wilayah administrasi. Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Ibukota Provinsi Sulawesi ketika itu adalah Makassar dengan gubernur, yaitu DR.G.S.S.J. Ratulangi. Kemudian sejalan dengan pemekaran administrasi pemerintahan daerah-daerah di Indonesia, maka pada tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua provinsi administratif, yaitu Provinsi

Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960. Untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1960 tanggal 31 Maret 1960 ditunjuklah A.Baramuli, S.H. sebagai Gubernur Sulawesi Utara Tengah (Sulutteng). Sembilan bulan kemudian Provinsi Administratif Sulawesi Utara-Tengah ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi Kotapradja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing Sangihe Talaud, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Minahasa, Buol Toli-Toli, Donggala, Daerah Tingkat II Poso, dan Luwuk/ Banggai. Sementara itu, DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah baru terbentuk pada tanggal 26 Desember 1961.

Dalam perkembangan selanjutnya, tercatat suatu momentum penting yang terpatrit dengan tinta emas dalam lembar sejarah daerah ini, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 23 September 1964 yang menetapkan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai daerah otonom Tingkat I dengan Ibukota Manado. Momentum diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak itulah secara *de facto* wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo. Adapun daerah tingkat II yang masuk dalam wilayah Sulawesi Utara, yaitu Kotamadya Manado, Kotamadya Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Sangihe Talaud.

Selanjutnya, seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dibentuk Provinsi Gorontalo sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan dibentuknya Provinsi Gorontalo tersebut, maka wilayah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe dan Talaud, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada Tahun 2003 terjadi pemekaran tiga kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kota Tomohon. Kemudian pada tahun 2007 Sulawesi Utara ketambahan empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau Tagulandang Biaro), dan Kota Kotamobagu; dan pada tahun 2008 bertambah dua kabupaten, yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini terbagi menjadi 11 kabupaten dan empat kota.

Penduduk Sulawesi Utara terdiri dari 3 (tiga) kelompok etnis utama, yaitu Etnis Minahasa; Etnis Sangihe dan Talaud, dan Etnis Bolaang Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut terbagi pula dalam sub-etnis yang memiliki bahasa, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat dengan semangat kebersamaan/gotong royong/tolong-menolong melalui "Mapalus" di Minahasa, "Mapaluse" di Sangihe Talaud dan "Moposad" di Bolaang Mongondow. Bahasa yang ada di Sulawesi Utara dibagi ke dalam Bahasa Minahasa yang

terdiri dari bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik; Bahasa Sangihe Talaud yang terdiri dari bahasa Sangihe, Talaud, dan Siau; Bahasa Bolaang Mongondow yang terdiri dari bahasa Mongondow, Bolaang, Bintauna, dan Kaidipang. Akan tetapi, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara.

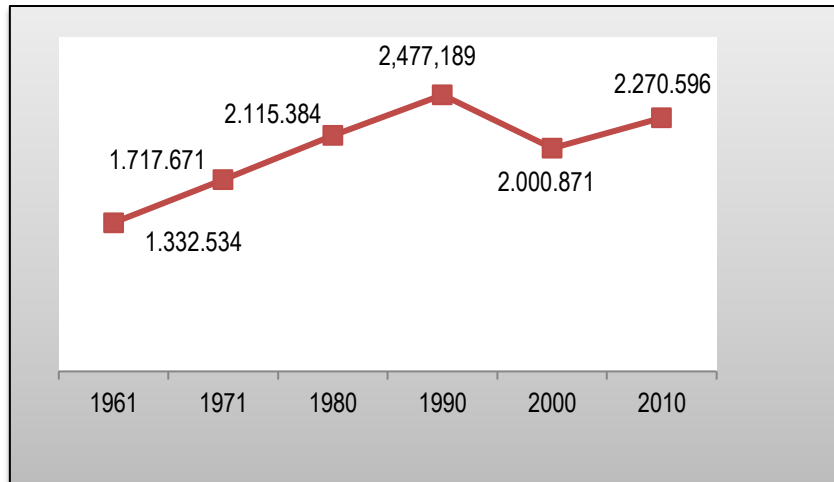
#### **4.3.2.Dinamika Kependudukan**

##### *a. Jumlah penduduk*

Dalam menganalisis data perkembangan penduduk Sulawesi Utara harus dibedakan dalam dua periode, yaitu periode 1961-1990 dan periode 2000-2010. Periode 1961-1990 adalah periode dimana Gorontalo masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, dan periode 2000-2010 adalah periode dimana Gorontalo telah memisahkan diri sebagai provinsi sendiri. Jumlah penduduk Sulawesi Utara berkembang cukup pesat pada periode 1961-1990 dan agak melambat pada periode 2000-2010. Perbedaan itu nampak dari kemiringan garis tren periode 1961-1990 naik cukup tajam, sedangkan periode 2000-2010 agak landai (Gambar 4.18).

Perkembangan penduduk Sulawesi Utara saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan penduduk di masa lalu. Pada periode 1971-1990, diwarnai dengan tingkat kelahiran dan kematian penduduk tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi diikuti dengan tingkat kematian yang semakin menurun, penambahan jumlah penduduk tetap besar, tetapi persentase kenaikannya cenderung menurun. Pada periode 1971-1980 persentase kenaikan jumlah penduduk sebesar 23,2 persen, proporsinya terus menurun hingga 13,5 persen pada periode 2000-2010. Persentase kenaikan yang semakin rendah tersebut, merupakan dampak dari implementasi program keluarga berencana (KB) yang dicanangkan sebagai gerakan nasional pada dekade 1970-an. Secara keseluruhan, program KB di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk menekan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat yang rendah.

**Gambar 4.18**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 1961-2010**



*Sumber: BPS; Sulawesi Utara Dalam Angka, 2012; 1990 termasuk Gorontalo.*

Pada kurun waktu 2000-2010, penduduk Sulawesi Utara bertambah sekitar 270 ribu jiwa dalam sepuluh tahun, atau rata-rata per tahun bertambah sebesar 27 ribu jiwa. Berdasarkan data pada tahun 2014, penduduk Sulawesi Utara berjumlah 2.386.604 jiwa atau bertambah sebesar 116.008 jiwa atau rata-rata per tahun bertambah 29 ribu jiwa lebih besar dibandingkan periode sensus terakhir. Tambahan jumlah penduduk per tahun tersebut hampir separoh jumlah penduduk di kabupaten-kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Siau Tasgulandang Biaro (Tabel 4.4).

Tabel 4.4

## Perkembangan Penduduk menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2009-2014

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bolaang Mongondow	307.786	213.484	215.904	220.093	224.400	229.604
Minahasa	300.226	310.384	313.892	316.884	319.945	325.680
Kepulauan Sangihe	130.449	126.100	127.520	128.732	129.008	129.103
Kepulauan Talaud	74.997	83.434	84.378	85.171	85.984	87.922
Minahasa Selatan	182.818	195.553	197.755	198.901	200.072	203.317
Minahasa Utara	176.480	188.904	191.036	193.906	196.842	196.419
Bolaang Mongondow Utara	80.508	70.693	71.564	71.530	71.570	75.290
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	61.781	63.801	64.516	64.575	64.744	65.284
Minahasa Tenggara	95.525	100.443	101.575	101.761	102.226	103.818
Bolaang Mongondow Selatan	*	57.001	57.648	58.762	59.908	61.177
Bolaang Mongondow Timur	*	63.654	64.370	65.511	66.677	67.824
Manado	434.845	410.481	415.114	417.483	419.596	423.257
Bitung	180.618	187.652	189.920	193.956	198.257	202.204
Tomohon	83.718	91.553	92.583	93.857	95.157	98.686
Kotamobagu	119.105	107.459	108.891	108.794	109.141	117.019
Sulawesi Utara	2.228.856	2.270.596	2.296.666	2.319.916	2.343.527	2.386.604

Sumber: BPS; Sulawesi Utara Dalam Angka, 2014.

Tanda (\*) masih tergabung dengan kabupaten induk.

Jumlah penduduk sangat bervariasi antar kabupaten/kota, terutama antara kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran. Misalnya, penduduk Kabupaten Minahasa sebagai kabupaten induk jumlahnya tiga kali lipat dari jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara. Demikian pula jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten induk, hampir empat kali lipat jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Sangihe induk jumlah penduduknya dua kali lipat jumlah penduduk Kepulauan Siau-Tagulandang-Biara. Jumlah penduduk di kabupaten-kabupaten pemekaran yang tergolong sedikit, sangat mempengaruhi kebijakan nasional tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerahnya. Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang “dua anak lebih baik” diterjemahkan menjadi “dua anak lebih” baik. Hal ini disebabkan anggaran pusat untuk daerah otonom perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduk.

*b. Pertumbuhan penduduk*

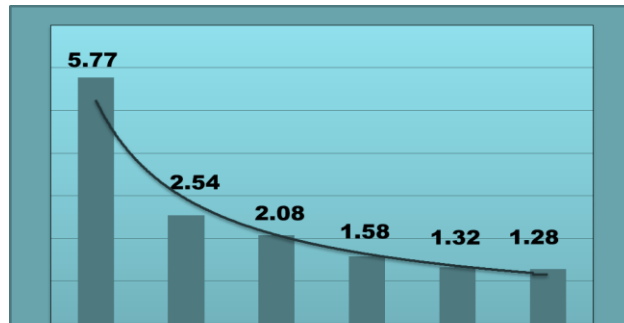
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Sulawesi Utara sejak tahun 1961 hingga tahun 2010 ditampilkan pada Gambar 4.19. Pada kurun waktu 1961-1971, LPP menurun cukup tajam, karena pada akhir periode 1960-an program KB mulai diperkenalkan dan dilaksanakan di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara. LPP terus menurun cukup signifikan hingga tahun 1990, dan mulai tahun 2000 menurun sangat lambat hingga tahun 2010. Tren penurunan LPP yang cukup pesat hingga tahun 1990 merupakan indikasi dari keberhasilan pelaksanaan program KB yang digulirkan sejak tahun 1970. Walaupun membutuhkan waktu 20 tahun, LPP berhasil ditekan hingga sekitar 1,5 persen. Selanjutnya, LPP menurun sangat lambat dengan persentase penurunan hanya 0,27 persen pada kurun



waktu 1990-2000 dan hampir stagnan pada kurun waktu 2000-2010 dengan persentase penurunan hanya 0,05 persen. LPP yang hampir stagnan ini disebabkan perhatian pemerintah daerah lebih terfokus pada pembangunan fasilitas perkantoran daerah pemekaran, sementara program kependudukan dan KB menjadi terabaikan selama periode tersebut.

**Gambar 4.19**

**Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara 1961-2010**



Pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Sulawesi Utara sangat bervariasi (Tabel 4.5). Kota Manado sebagai pusat pemerintahan dan bisnis justru bertumbuh lebih kecil dari satu persen. Akan tetapi, perkembangan penduduk di Kota Manado nampaknya berdampak bagi pertumbuhan penduduk kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Minahasa Utara. Pertumbuhan penduduk di Minahasa Utara cukup tinggi, dan kabupaten kedua tertinggi setelah Kota Bitung dengan LPP hampir tiga persen. Minahasa Utara bersama Manado dan Bitung merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang diberi nama KAPET Manado-Bitung. Dalam Kapet Manado-Bitung, Minahasa Utara merupakan kawasan pengembangan industri, pergudangan, dan permukiman. Kabupaten/kota yang LPP tergolong tinggi adalah Kotamobagu, Tomohon, Bolaang Mongondow, dan Bolaang Mongondow Selatan. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten dengan LPP rendah adalah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Kepulauan Sitaro, dan bahkan Kepulauan Sangihe pertumbuhannya negatif.

**Tabel 4.5**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2000-2010**

Kabupaten/Kota	LPP (% per tahun)
Bolaang Mongondow	1,78
Minahasa	1,21
Kepulauan Sangihe	-0,09
Kepulauan Talaud	1,27
Minahasa Selatan	0,97
Minahasa Utara	2,51
Bolaang Mongondow Utara	1,55
Kepulauan Sitaro	0,56
Minahasa Tenggara	0,80
Bolaang Mongondow Selatan	1,77
Bolaang Mongondow Timur	1,56
Manado	0,97
Bitung	2,98
Tomohon	1,95
Kotamobagu	2,14
Sulawesi Utara	1,28

*Sumber: BPS; SP2010*

*c. Komposisi penduduk*

Perkembangan penduduk, selain digambarkan dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, juga dapat digambarkan berdasarkan struktur umur dan jenis kelamin, serta distribusi penduduk. Analisis struktur umur dan jenis kelamin diperlukan untuk perencanaan berbagai program pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, lapangan pekerjaan. Data penduduk menurut umur dan jenis kelamin juga dibutuhkan oleh kalangan bisnis untuk perencanaan penjualan. Analisis distribusi penduduk menurut geografis dan administrasi diperlukan untuk mengetahui ketidakmerataan (atau pemerataan) penduduk, kepadatan penduduk di satu wilayah atau antar wilayah, dan daya dukung suatu wilayah.

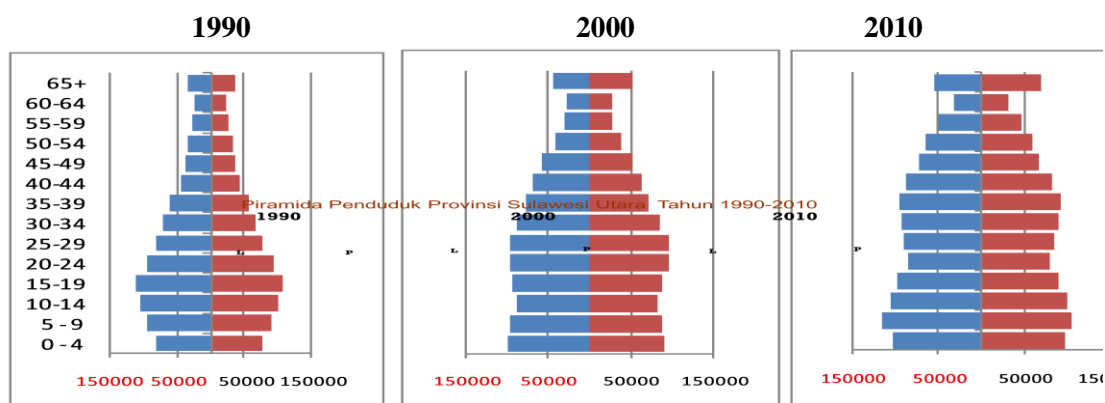
*1) Umur*

Umur dan jenis kelamin adalah faktor demografi yang penting dan merupakan dasar utama klasifikasi demografi dalam statistik vital, sensus, dan survei. Umur dan jenis kelamin juga merupakan faktor yang penting dalam studi kematian, kelahiran, dan perkawinan. Struktur umur penduduk Sulawesi Utara mengalami perubahan-perubahan mendasar selama 20 tahun terakhir, yakni periode 1990-2010 seperti ditunjukkan oleh piramida penduduk pada Gambar 4.20. Struktur umur penduduk Sulawesi Utara berdasarkan SP 1990 tergolong struktur umur muda, kemudian mengalami perubahan menjadi struktur umur antara muda dan tua menurut SP 2000. Pada tahun 2010, piramida penduduk menyempit pada bagian tengah dan melebar pada bagian dasar dan bagian atas. Indikasi lainnya yang menarik adalah pada bagian dasar piramida dari ketiga sensus penduduk, yaitu pada kelompok umur

0-9 tahun. Pada tahun 1990 terjadi penyempitan, tapi pada tahun 2000 cenderung melebar kemudian kembali menyempit pada tahun 2010. Dalam kaitannya dengan angka fertilitas, jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun pada periode 2000-2010 mengalami kenaikan dibandingkan periode 1990-2000. Jumlah penduduk 0-4 tahun/balita pada tahun 2000 sebesar 175 ribu jiwa meningkat menjadi 202 ribu jiwa pada tahun 2010.

**Gambar 4.20**

**Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 1990, 2000, dan 2010**



Perubahan komposisi penduduk tersebut di atas dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk dan proses demografi masa lalu, seperti kelahiran dan kematian. Perubahan- struktur umur penduduk juga berdampak pada fertilitas penduduk. Seperti yang terjadi di Sulawesi Utara, struktur penduduk umur muda (10-20 tahun) tahun 1990, sepuluh tahun kemudian (tahun 2000) telah berumur 20-30 tahun, atau memasuki usia perkawinan. Dampak dari perkawinan pada periode tahun 2000-2005 nampak dari jumlah penduduk umur 0-9 tahun yang cukup besar pada tahun 2010.

Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan SP 2010 tergolong penduduk *intermediate*. Umur median penduduk 21,7 tahun pada tahun 2000 dan 24,1 tahun pada tahun 2010 atau berada antara 20-29 tahun. Pola yang sama juga berlaku pada penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2000 dan tahun 2010. Akibat dari naiknya umur median penduduk, persentase penduduk kelompok umur 15-64 tahun makin bertambah besar, diikuti menurunnya penduduk umur 0-4 tahun dan naiknya penduduk usia lanjut (Tabel 4.6). Perubahan pola umur penduduk ini juga ditunjukkan oleh pola perubahan rasio ketergantungan umur penduduk. Seperti dapat dilihat pada Gambar 4.21, pola perubahan rasio ketergantungan Sulawesi Utara tahun 1990-2010, pada tahun 1990 rasio ketergantungan umur tinggi, lalu turun ke titik terendah pada tahun 2000, tetapi kemudian naik kembali pada tahun 2010 dengan angka yang lebih rendah dari angka pada tahun 1990. Pola ini menunjukkan bahwa Sulawesi Utara telah meraih bonus demografi, yaitu suatu kondisi yang sangat ideal perbandingan jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif. Rasio ketergantungan lebih kecil 50, artinya satu orang penduduk tidak produktif

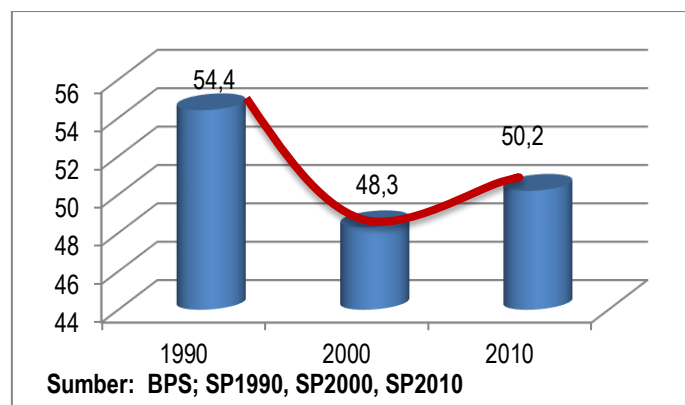
ditanggung oleh dua orang penduduk produktif. Kondisi ideal ini terjadi pada jendela kesempatan untuk meraih keuntungan ekonomi dari peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Apabila peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan untuk menyerap tambahan tenaga kerja akan meningkatkan *output* daerah yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, karena angka pengangguran masih sekitar 10 persen pada tahun 2010.

**Tabel 4.6**  
**Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Sulawesi Utara, 1990-2010**

Kelompok Umur	1990	2000	2010
0 – 14	33,68	27,92	27,85
15 – 64	62,35	66,93	66,56
65 +	3,97	5,15	5,59
Rasio Ketergantungan Umur	54,4	48,3	50,2

*Sumber: BPS; SP 1990, 2000, 2010*

**Gambar 4.21**  
**Rasio Ketergantungan Umur: Sulawesi Utara 1990-2010**



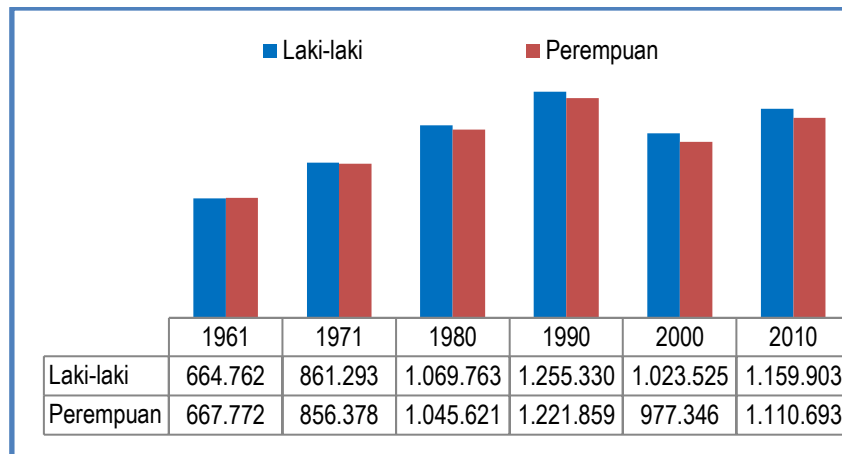
## 2) Jenis kelamin

Jumlah penduduk Sulawesi Utara berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan (Gambar 4.22). Perbandingan tersebut tidak berbeda secara signifikan sejak tahun 1961 hingga tahun 2010. Perbedaan yang cukup menonjol terdapat di kabupaten/kota, seperti Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow, Kota Manado, Tomohon, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe hampir berimbang, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Perbedaan tersebut makin jelas terlihat pada angka rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin tinggi terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow (Tabel 4.7). Manado dan Tomohon hanya 101 dan Kepulauan Sitaro kurang dari 97,73. Artinya setiap 100

penduduk perempuan di Kepulauan Sitaro terdapat 97,73 penduduk laki-laki. Kondisi ini kemungkinan disebabkan tingginya migrasi penduduk laki-laki di daerah ini.

**Gambar 4.22**

**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 1961-2010**



Sumber: BPS; SP2000, SUPAS 2005, dan SP2010

**Tabel 4.7**

**Penduduk Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 2010**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Jenis Kelamin
Bolaang Mongondow	111.080	102.404	213.484	108,47
Minahasa	158.919	151.465	310.384	104,92
Kepulauan Sangihe	63.820	62.280	126.100	102,47
Kepulauan Talaud	42.668	40.766	83.434	104,67
Minahasa Selatan	101.046	94.507	195.553	106,92
Minahasa Utara	96.120	92.784	188.904	103,60
Bolaang Mongondow Utara	36.251	34.442	70.693	105,25
Kepulauan Sitaro	31.534	32.267	63.801	97,73
Minahasa Tenggara	52.055	48.388	100.443	107,58
Bolaang Mongondow Selatan	29.818	27.183	57.001	109,69
Bolaang Mongondow Timur	33.299	30.355	63.654	109,70
Manado	206.292	204.189	410.481	101,03
Bitung	96.001	91.651	187.652	104,75
Tomohon	46.179	45.374	91.553	101,77
Kotamobagu	54.821	52.638	107.459	104,15
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>1.159.903</b>	<b>1.110.693</b>	<b>2.270.596</b>	<b>104,43</b>

Sumber: BPS; SP2010

d. *Kepadatan dan distribusi penduduk*

Kepadatan penduduk Sulawesi Utara berdasarkan hasil SP 2000 adalah 131 jiwa per kilometer persegi dan meningkat menjadi 148 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2010. Diperkirakan angka kepadatan penduduk akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Konsentrasi penduduk perkotaan terus berlangsung, sementara kepadatan penduduk di daerah perdesaan menyebabkan semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya lahan pertanian. Peningkatan kepadatan penduduk ini disebabkan luas wilayah yang tetap, sementara jumlah penduduk terus bertambah, walaupun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Selama laju pertumbuhan penduduk lebih besar nol (*zero population growth*), jumlah penduduk terus bertambah dan implikasinya kepadatan penduduk meningkat.

Menurut kabupaten/kota, Kota Manado adalah kota terpadat dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Bolaang Mongondow adalah kabupaten yang paling jarang penduduknya (Tabel 4.8). Ketiga kabupaten ini sangat jarang penduduknya, luasnya sekitar 50 persen dari luas wilayah Sulawesi Utara, hanya ditempati 12,5 persen penduduk. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya yang luas wilayahnya sekitar 45,0 persen dari luas wilayah Sulawesi Utara ditempati oleh sekitar 80,0 persen penduduk. Bahkan hampir 30,0 persen penduduk Sulawesi Utara tinggal di kota Manado dan Bitung dengan luas wilayah 3,02 persen.

Distribusi penduduk Sulawesi Utara tidak merata/timpang, terkonsentrasi di Kota Manado, Bitung dan Kabupaten Minahasa. Manado sebagai ibukota provinsi, merupakan pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan, sementara Bitung merupakan kota pelabuhan sebagai kota kembarnya Manado menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Kedua kota ini memiliki daya tarik kuat bagi penduduk desa untuk bekerja dan berbisnis. Kabupaten Minahasa merupakan kabupaten induk yang sejak dahulu sudah padat penduduk. Pemusatan penduduk di daerah perkotaan, seperti Manado dan Bitung, akan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan untuk mencegah mengalirnya penduduk desa ke kota, seperti pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten. Di samping itu program-program pengembangan ekonomi desa lebih ditingkatkan untuk menahan arus tenaga kerja dari desa ke kota.

**Tabel 4.8**  
**Kepadatan dan Distribusi Penduduk: Sulawesi Utara 2010**

Kabupaten/kota	Kepadatan* Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Distribusi Penduduk (%)
Bolaang Mongondow	71	9,40
Minahasa	261	13,67
Kepulauan Sangihe	212	5,55
Kepulauan Talaud	81	367
Minahasa Selatan	131	8,61
Minahasa Utara	192	8,32
Bolaang Mongondow Utara	36	3,11
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	224	2,81
Minahasa Tenggara	142	4,42
Bolaang Mongondow Selatan	32	2,51
Bolaang Mongondow Timur	71	2,80
Manado	2,510	18,08
Bitung	564	8,26
Tomohon	622	4,03
Kotamobagu	221	4,73
<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>151</b>	<b>100,00</b>

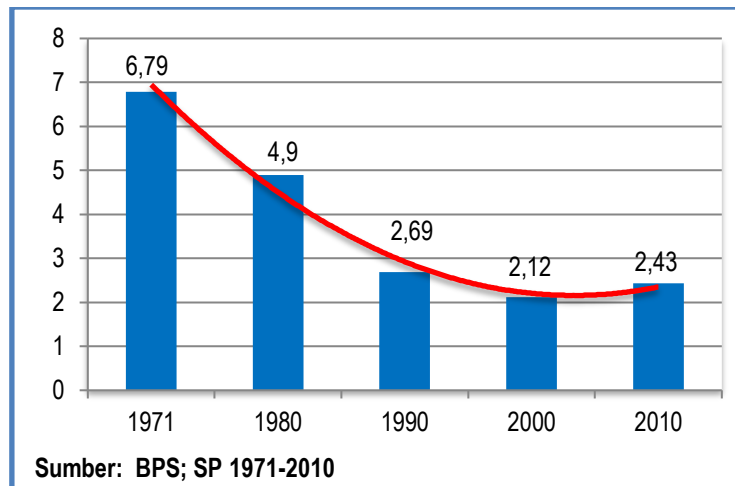
*Sumber: BPS; SP 2010; \* Sulawesi Utara Dalam Angka 2011*

#### e. Fertilitas

Fertilitas didefinisikan sebagai hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, atau fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas juga diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk melahirkan hidup seorang anak. Apabila bayi yang lahir hidup adalah bayi perempuan, akan tumbuh menjadi remaja dan perempuan usia subur kemudian menikah dan berpotensi melahirkan bayi lagi. Dengan demikian, fertilitas merupakan salah satu komponen dasar demografi yang dapat meningkatkan jumlah penduduk di suatu wilayah/negara.

Gambar 4.23 menampilkan tren angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) di Sulawesi Utara berdasarkan hasil SP 1971 - SP 2010. Pada periode awal dicanangkan program keluarga berencana menjadi gerakan nasional (1970), TFR di Sulawesi Utara sebesar 6,7 anak per perempuan pada tahun 1971. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 5,6 anak per perempuan pada tahun yang sama. Program keluarga berencana sejak saat itu sangat gencar dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan semua komponen bangsa hingga akhir pemerintahan orde baru pada akhir dekade 1990-an. Hasilnya, TFR di Sulawesi Utara menurun terus hingga mencapai angka terendah sebesar 2,1 anak per perempuan pada tahun 2000. Sejak era reformasi birokrasi dan otonomi daerah pada akhir periode 1990-an, perhatian terhadap program kependudukan dan keluarga berencana menjadi terabaikan. Akibatnya, TFR naik 14 persen dari 2,1 anak pada tahun 2000.

**Gambar 4.23**  
**Angka Fertilitas Total: Sulawesi Utara 1971-2010**



TFR Sulawesi Utara tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil SP 2010, provinsi dengan TFR tertinggi di Indonesia ialah Nusa Tenggara Timur (3,82), kemudian diikuti oleh Maluku (3,56), Maluku Utara (3,35), Sulawesi Barat (3,33), dan Sulawesi Tenggara (3,20). Provinsi dengan TFR terendah ialah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Provinsi Sulawesi Utara berada sedikit di atas rata-rata nasional (2,41) atau setara dengan provinsi Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau.

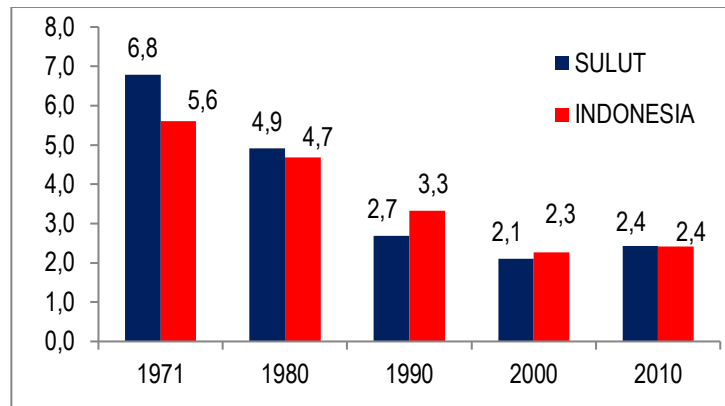
TFR yang cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional memberikan sinyal kepada pemerintah Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerjanya dalam menekan TFR kembali berada di bawah rata-rata nasional seperti pada dua dekade sebelumnya (Gambar 4.24). Apabila angka TFR stagnan saja pada angka 2,43 hingga tahun 2020, maka Sulawesi Utara diperkirakan belum mencapai target penduduk tumbuh seimbang (PTS) sampai tahun 2025. Oleh karena itu, kebijakan nasional pengendalian kuantitas penduduk melalui penundaan usia kawin pertama dan peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi terus digalakkan melalui kegiatan-kegiatan KIE kepada pasangan usia subur dan penduduk usia remaja oleh semua *stakeholders*.

Angka kelahiran total kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil SP 2010 disajikan pada Gambar 4.25. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa ada sembilan kabupaten/kota dengan TFR di atas rata-rata provinsi, dan enam kabupaten/kota dibawah rata-rata provinsi. TFR tertinggi terdapat di tiga kabupaten berturut-turut, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow, dan Minahasa Tenggara. TFR terendah berturut-turut: Kota Manado, Kabupaten Sangihe, dan Kota Tomohon. TFR antar kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara cukup menarik untuk dicermati, karena kabupaten yang relatif terbelakang TFRnya rendah dibandingkan kabupaten yang relatif lebih maju.

**Gambar 4.24**

**Angka Fertilitas Total: Sulawesi Utara dan Indonesia 1971-2010**



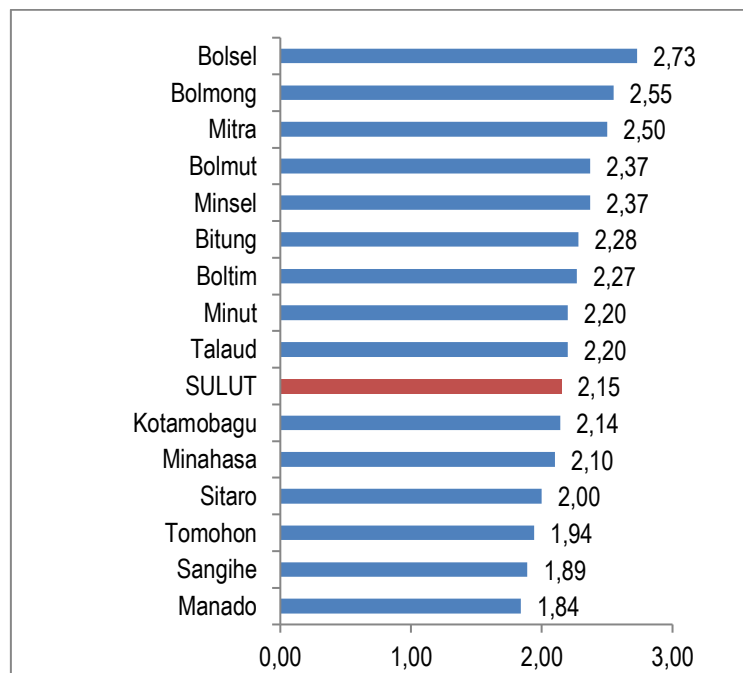


Sumber: BPS; SP1971-2010

Sebagai contoh, kabupaten Sangihe dan Sitaro, TFR jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Padahal dari segi tingkat pendidikan wanita dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara relatif lebih tinggi. Pada umumnya TFR lebih tinggi pada masyarakat yang tingkat pendidikan dan kesejahteraan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat lebih maju. Teori ini tidak berlaku di beberapa kabupaten di Sulawesi Utara, sehingga perlu kajian lebih mendalam untuk mendapatkan penjelasan faktor-faktor apa saja yang berada diluar model yang mempengaruhi tingkat fertilitas di daerah-daerah tersebut.

**Gambar 4.25**

**Angka Fertilitas Total menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2010**



f. Angka kematian bayi dan anak

Angka kematian bayi dan anak mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan. Penurunan kematian bayi dan ibu telah menjadi tujuan utama untuk mencapai tujuan empat dan lima dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL). Program ini menyediakan pelayanan gratis untuk wanita hamil yang tidak mempunyai asuransi kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, perawatan masa nifas, serta perawatan bayi lahir sampai umur 28 hari (Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan, 2012).

Tabel 4.9 menyajikan perkembangan angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil SP 1971 – SP 2010. Angka kematian bayi secara keseluruhan terus menurun dari 114 per seribu kelahiran hidup pada tahun 1971 menjadi 25 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2010. Angka kematian bayi laki-laki cenderung lebih tinggi dari bayi perempuan. Provinsi Sulawesi Utara termasuk provinsi yang cukup berhasil menekan angka kematian bayi di Indonesia. Indikasi dari keberhasilan tersebut adalah tingkat kematian bayi Sulawesi Utara lebih rendah dari rata-rata nasional.

**Tabel 4.9**  
**Angka Kematian Bayi di Sulawesi Utara dan Indonesia, 1971-2010**

Tahun	Sulawesi Utara			Indonesia		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1971	124	105	114	158	134	145
1980	102	85	93	118	100	109
1990	70	56	63	79	64	71
2000	33	24	28	53	41	47
2010	-	-	25	-	-	26

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk

Kematian bayi mempunyai hubungan langsung dengan kematian anak di bawah umur lima tahun (balita). Artinya, penurunan angka kematian bayi berdampak langsung pada penurunan angka kematian anak balita. Tabel 4.10 menyajikan tren penurunan angka kematian anak balita di Sulawesi Utara dan Indonesia. Angka kematian anak balita menurun mengikuti tren penurunan angka kematian bayi di Sulawesi Utara. Angka kematian anak balita sama halnya dengan angka kematian bayi, lebih rendah dari rata-rata nasional.

**Tabel 4.10**  
**Angka Kematian Anak Balita: Sulawesi Utara dan Indonesia 1971-2010**

Tahun	Sulawesi Utara	Indonesia
1971	166	218
1980	134	158
1990	86	99
2000	66	60
2010	37	43

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk

Provinsi Sulawesi Utara berhasil menekan AKB dan a nbalita merupakan dampak dari keberhasilan program-program keluarga berencana dan kesehatan pada era pemerintahan orde baru. Program KB dan kesehatan pada masa itu dilaksanakan secara sinergis dari level pusat hingga level RT/dusun, secara lintas sektor, dan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan dan agama. Tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan meningkat, nampak dari pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang hingga saat ini tetap menjadi salah satu pilihan pemeriksaan kesehatan dan KB, disamping Polindes dan Puskesmas. Sejak akhir tahun 1990-an, awal dimulainya otonomi daerah dan reformasi birokrasi program-program kependudukan dan KB menjadi terabaikan. Bahkan setelah diberlakukannya UU RI No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, program-program kependudukan dan KB kurang mendapatkan perhatian pemerintahan daerah.

Angka kematian bayi dan balita pada level kabupaten/kota di Sulawesi Utara tidak dapat disajikan disebabkan populasi data kematian yang sangat kecil untuk tingkat kabupaten/kota sehingga tidak representatif untuk kebutuhan analisis. Akan tetapi, tingkat dan tren angka kematian bayi kabupaten/kota dapat ditelusuri dari angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Kedua indikator itu mempunyai hubungan yang sangat erat, karena secara teoretis dikatakan bahwa turunnya angka AKB menyebabkan naiknya AHH. Hasil estimasi Badan Pusat Statistik (2014), AHH provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 sebesar 72,62 tahun. AHH terendah (< 71 tahun) terdapat di Kabupaten Siau-Tagulandang-Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Bitung. Kabupaten/kota dengan AHH tertinggi (> 73 tahun) adalah kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan estimasi AHH tersebut, dapat dikatakan bahwa AKB tinggi terdapat di kabupaten/kota dengan AHH terendah.

#### *g. Migrasi penduduk*

Penduduk Sulawesi Utara secara keseluruhan tergolong masyarakat bukan migran, karena persentase terbesar penduduk adalah non-migran (Tabel 4.11). Hasil SP 2010 menunjukkan bahwa penduduk non migran seumur hidup hampir 80 persen dan non-migran risen hampir 95 persen. Berdasarkan jenis kelamin, persentase non-migran laki-laki lebih besar dari persentase non-migran perempuan, baik migrasi seumur hidup maupun migrasi risen. Demikian pula persentase migran laki-laki relatif lebih besar daripada persentase migran perempuan untuk migrasi seumur hidup dan migrasi risen.

**Tabel 4.11**  
**Status Migrasi Penduduk: Sulawesi Utara 2010**

Jenis Migrasi	Status Migrasi					
	Non-migran		Migran		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Non-migran	Migran
Migrasi semasa hidup	40,01	38,28	11,07	10,64	78,29	21,71
Migrasi risen	48,08	46,27	2,73	2,60	94,36	5,33

*Sumber: BPS; SP 2010*

Penduduk Sulawesi Utara yang bermigrasi semasa hidup lebih besar dari migrasi risen. Migrasi semasa hidup pada umumnya terjadi karena faktor pekerjaan yang sifatnya tetap dan atau karena perkawinan. Migrasi risen juga terjadi karena faktor pekerjaan, namun untuk pekerjaan yang bersifat temporer, dan karena faktor pendidikan (bersekolah) di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal.

Tabel 4.12 memberikan gambaran perkembangan besaran arus migrasi seumur hidup di Sulawesi Utara berdasarkan SP 1971 sampai SP 2010. Arus migrasi seumur hidup, secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, baik arus migrasi masuk maupun arus migrasi keluar provinsi Sulawesi Utara. Arus migrasi masuk sempat mengalami penurunan pada tahun 1990, tetapi kemudian meningkat pada tahun 2000 dan seterusnya pada tahun 2010.

**Tabel 4.12**  
**Migrasi Seumur Hidup: Sulawesi Utara 1971-2010**

Migrasi	1971	1980	1990	2000.	2010
Masuk	50.356	91.460	89.096	147.091	206.139
Keluar	60.837	121.231	153.466	151.326	217.774
Neto	(10.481)	(29771)	(64.370)	(4.235)	(11.635)

*Sumber: BPS; SP 1971, SP 1980, SP 1990, SP 2000, dan SP 2010*

Arus migrasi masuk di Sulawesi Utara meningkat cukup tajam setiap periode sepuluh tahunan terjadi pada periode 1971-1980 dan periode 1990-2000, meningkat hampir dua kali lipat. Arus migrasi keluar meningkat tajam hingga dua kali lipat terjadi pada tahun 1971-1980, kemudian periode 2000-2010 walaupun tidak setajam 1970-1980, namun besarnya hampir sama. Apabila dibandingkan besaran arus migrasi masuk dan arus migrasi keluar provinsi Sulawesi Utara, maka arus migrasi keluar lebih besar dari arus migrasi masuk. Hal ini dibuktikan oleh

migrasi neto yang negatif setiap periode pencacahan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk bermigrasi, di antaranya faktor yang terdapat di daerah asal dan faktor yang terdapat di daerah tujuan. Faktor yang di tempat asal dapat disebut sebagai faktor pendorong, dan faktor di daerah tujuan sebagai faktor penarik. Keputusan seseorang bermigrasi sangat tergantung pada faktor di tempat asal dan faktor di tempat tujuan. Jika faktor di tempat tujuan lebih kuat dari di tempat asal akan menarik orang untuk bermigrasi keluar, jika faktor di tempat asal lebih kuat juga akan mendorong orang untuk bermigrasi keluar. Penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Walaupun demikian, arus migrasi keluar yang lebih besar dari arus migrasi masuk di Sulawesi Utara menjelaskan bahwa faktor pendorong dan faktor penarik untuk keluar dari provinsi Sulawesi Utara sangat dominan. Artinya, faktor di tempat asal (Sulawesi Utara) tidak cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menetap di provinsi Sulawesi Utara. Faktor pendorong dan penarik itu dapat dilihat dari alasan untuk melakukan migrasi, apakah karena alasan ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Alasan yang sangat dominan mempengaruhi seseorang bermigrasi keluar, pertama karena alasan ekonomi, dan kedua karena alasan sosial-budaya.

Tabel 4.13 menjelaskan dinamika migrasi risen di provinsi Sulawesi Utara selang lima tahunan berdasarkan SP 1980 – SP 2010. Migrasi risen di Sulawesi Utara berfluktuasi sejak tahun 1980 sampai 2010 baik migrasi masuk maupun migrasi keluar. Terdapat perbedaan besaran migran antara migrasi masuk dan migrasi keluar risen dari periode ke periode. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh besaran migrasi neto yang bertanda positif dan negatif. Migrasi neto bertanda positif, artinya migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar, sedangkan bertanda negatif berarti migrasi keluar lebih besar dari migrasi masuk. Migrasi neto positif terjadi pada tahun 1980, 2000, dan 2010, lainnya bertanda negatif, sehingga kalau dijumlahkan seluruhnya maka migrasi neto akan bertanda negatif, migrasi keluar lebih besar dari migrasi masuk. Hal yang menarik untuk diamati adalah besaran migrasi neto tahun 2000 dan 2005. Pada tahun 2000 terjadi arus migrasi masuk yang cukup besar ke Sulawesi Utara sebagai akibat dari kerusuhan yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara. Penduduk daerah konflik yang mengungsi ke Sulawesi Utara memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap arus migrasi masuk risen. Pada tahun 2005, migrasi neto menjadi negatif karena sebagian besar pengungsi kembali ke tempat asal.

**Tabel 4.13**  
**Migrasi Risen: Sulawesi Utara 1980-2010**

Migrasi	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Masuk	45.498	34.783	34.736	21.852	54.504	28.863	48.042
Keluar	38.259	30.230	51272	48.142	38.830	31.813	45.473
Neto	7.239	(15.447)	(16.536)	(26.290)	15.674	(2.950)	2.569

*Sumber: BPS; SP 1980, 1990, 2000, dan 2010; SUPAS 1985, 1995, 2005 dan*

Berdasarkan gambaran migrasi risen di atas, ada kecenderungan bagi penduduk Sulawesi Utara untuk bermigrasi keluar dari tempat asal ke provinsi lain, sebagaimana terjadi pada migrasi seumur hidup. Dalam penelitian ini tidak dianalisis daerah tujuan migran dari Sulawesi Utara dan alasan melakukan migran keluar. Analisis Migrasi

Penduduk berdasarkan data SUPAS 1985 di Provinsi Sulawesi Utara oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM tahun 1987 dapat dijadikan gambaran daerah tujuan dan alasan migrasi keluar dari Sulawesi Utara. Hasil analisis menemukan daerah/provinsi tujuan utama migran asal Sulawesi Utara sejak tahun 1971, 1980 dan 1985 adalah DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Alasan migrasi keluar provinsi yang paling dominan adalah alasan pekerjaan. Penulis menduga bahwa daerah tujuan migran asal Sulawesi Utara sejak tahun 1990, dilihat dari alasan migrasi, telah mengalami pergeseran. Berdasarkan pengamatan secara kasat mata, provinsi-provinsi tempat bekerja paling menonjol bagi penduduk asal Sulawesi Utara sejak tahun 1990-an adalah Papua, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Dengan demikian daerah tujuan utama migran asal Sulawesi Utara adalah ketiga provinsi tersebut.

Migrasi neto yang bertanda positif, mengindikasikan bahwa provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah tujuan migran provinsi lain di Indonesia. Sebagai provinsi tujuan migran tentu ada faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi migran untuk masuk dalam wilayah Sulawesi Utara. Faktor penarik yang sangat kuat bagi seseorang untuk bermigrasi masuk ke wilayah provinsi Sulawesi Utara adalah faktor sosial-budaya masyarakatnya yang mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi migran untuk menetap di Sulawesi Utara. Faktor penarik lainnya, kemungkinan karena melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki dua perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta yang sudah dikenal luas dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi provinsi tetangga. Kemungkinan lainnya, karena perkembangan ekonomi daerah yang cukup signifikan, terutama kawasan Manado-Bitung sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dan sekarang ini ditingkatkan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, peningkatan status pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan internasional dan bandara Sam Ratulangi menjadi bandara internasional, serta pengembangan kawasan bisnis boulevard Manado menjadi ikut mempengaruhi migrasi masuk di Sulawesi Utara.

#### **4.3.4. Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Dari berbagai pilihan tersebut, yang terutama ialah pilihan supaya berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak ([http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id\\_subyek=26](http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=26); 21/09/2012;02:29). Pembangunan manusia diukur dengan menggunakan angka indeks yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup manusia atau kualitas sumberdaya manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia didekati melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan hidup layak. Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir, dimensi pengetahuan diukur dengan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan lama sekolah rata-rata. Dimensi hidup layak diukur dengan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk

hidup layak. Bagaimana capaian pembangunan manusia sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Utara selama ini? Bagian ini menguraikan capaian dari indikator-indikator ketiga dimensi pembangunan manusia di Sulawesi Utara, dimulai dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita, dan diakhiri dengan indeks pembangunan manusia.

*a. Angka harapan hidup*

Angka harapan hidup waktu lahir (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH sebagaimana disebut pada bagian awal bab ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kesehatan. Tabel 4.14 memberikan gambaran tren AHH provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1971 sampai 2010. Peningkatan AHH cukup mengesankan, terutama pada periode 1980-1990 naik 11,6 persen dan pada periode 1990-2000 naik 13,8 persen. Kenaikan tersebut menempatkan Sulawesi Utara menjadi provinsi ketiga tertinggi AHH di Indonesia setelah DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, berturut-turut 73,22 tahun dan 73,20 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, harapan hidup penduduk perempuan relatif lebih panjang dari pada penduduk laki-laki, dan perbedaannya makin lebar dari periode ke periode. Sebagai contoh, pada tahun 1971 perbedaan AHH laki-laki dan perempuan sebesar tiga tahun dan pada tahun 2010 perbedaannya sebesar lima tahun.

**Tabel 4.14**  
**Harapan Hidup Saat Lahir menurut Jenis Kelamin: Sulawesi Utara 1971-2010**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1971	49,7	52,7	51.3
1980	53,5	56,8	55.2
1990	59,8	63,4	61.6
2000	68,1	72,0	70.1
2010	71,9	77,0	72.2

*Sumber: BPS; Hasil Estimasi SP2000, SP2010*

Harapan hidup saat lahir penduduk kabupaten/kota di Sulawesi Utara relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional (Tabel 4.15). AHH tertinggi justru terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu kabupaten yang letaknya jauh dari Kota Manado, dan dari segi perekonomian daerah berada relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa, apalagi Kota Manado sebagai ibukota provinsi. AHH terendah dan berada di bawah rata-rata nasional terdapat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Tabel 4.15**  
**Harapan Hidup Saat Lahir menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bolmong	70,80	70,97	71,19	71,38	71,58	71,70	71,83	72,06
Minahasa	71,90	72,07	72,18	72,33	72,47	72,54	72,61	72,80
Sangihe	72,00	72,28	72,50	72,75	73,01	73,19	73,37	73,55
Talaud	70,70	70,86	71,29	71,59	71,89	72,12	72,35	72,57
Minsel	71,50	71,72	71,89	72,09	72,28	72,41	72,54	72,76
Minut	71,80	72,10	72,20	72,40	72,60	72,73	72,87	73,09
Bolmut	69,00	69,18	69,45	69,68	69,91	70,06	70,22	70,42
Sitaro	68,00	68,18	68,31	68,46	68,62	68,71	68,81	69,00
Mitra	69,50	69,66	69,77	69,90	70,03	70,10	70,16	70,34
Bolsel	-	-	71,20	71,25	71,29	71,34	71,39	71,47
Boltim	-	-	71,22	71,28	71,35	71,42	71,48	71,51
Manado	72,10	72,26	72,37	72,50	72,64	72,70	72,77	72,96
Bitung	69,90	70,08	70,20	70,35	70,50	70,59	70,67	70,90
Tomohon	71,70	71,96	72,16	72,39	72,62	72,78	72,95	73,13
Kotamobagu	70,90	71,08	71,35	71,58	71,80	71,96	72,12	72,34
Sulawesi Utara	71,80	72,00	72,01	72,12	72,22	72,33	72,44	72,62
Indonesia	68,47	68,70	69,00	69,21	69,43	69,65	69,87	70,07

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Gambaran tersebut di atas menjelaskan bahwa program-program kesehatan yang dilaksanakan di Sulawesi Utara telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun disadari pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara belum merata di seluruh kabupaten/kota terutama di pulau-pulau dan daerah terpencil, seperti di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang (Sitaro), Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, dan Bitung terutama di Pulau Lembeh. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah-daerah tersebut masih terbatas, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tergolong rendah. Sebagai contoh di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya terdapat 8 (delapan) dokter umum dibandingkan dengan 68 dokter umum di Puskesmas Kabupaten Minahasa Utara.

#### *b. Angka melek huruf*

Angka melek huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai cermin dari capaian pembangunan dalam bidang pendidikan. Pada Tabel 4.16 disajikan gambaran dari capaian dimensi pengetahuan menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara pada periode 2006-2013. Penduduk di Sulawesi Utara, hampir seratus persen sudah melek huruf atau kurang dari satu persen penduduk yang buta huruf. Sebagai contoh pada tahun 2006 penduduk buta huruf hanya sekitar tujuh persen dan menurun menjadi empat persen pada tahun 2013. Penduduk buta huruf tersebut kemungkinan besar adalah penduduk yang sudah usia lanjut, ketika dimasa kanak-kanak atau usia sekolah tidak memiliki akses terhadap pendidikan. AMH tertinggi sebesar 99,93 persen terdapat di Kota Manado, dan terendah 98,34 persen terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow. Variasi antar kabupaten/kota tidak signifikan, yakni kurang dari satu persen. Artinya, pembangunan pendidikan tersebar secara merata di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Utara.



**Tabel 4.16**  
**Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bolmong	98,61	98,61	98,22	98,23	98,29	98,31	98,32	98,34
Minahasa	99,52	99,52	99,52	99,68	99,71	99,72	99,74	99,90
Sangihe	98,50	98,50	98,50	98,54	98,70	98,73	98,75	98,78
Talaud	97,50	99,30	99,30	99,36	99,53	99,56	99,58	99,60
Minsel	99,40	99,40	99,40	99,42	99,78	99,80	99,81	99,87
Minut	99,68	99,68	99,68	99,70	99,74	99,77	99,78	99,79
Bolmut	98,30	98,30	98,30	98,31	98,39	98,42	98,43	98,68
Sitaro	98,10	99,54	99,61	99,68	99,76	99,77	99,78	99,82
Mitra	99,00	99,33	99,38	99,48	99,48	99,51	99,52	99,56
Bolsel	-	-	98,21	98,31	98,32	98,33	99,05	99,09
Boltim	-	-	99,38	99,50	99,51	99,55	99,57	99,59
Manado	99,70	99,83	99,83	99,86	99,86	99,91	99,93	99,93
Bitung	98,78	98,93	99,03	99,13	99,38	99,41	99,42	99,44
Tomohon	99,83	99,83	99,83	99,84	99,84	99,85	99,87	99,88
Kotamobagu	98,90	99,49	99,49	99,60	99,62	99,65	99,66	99,68
Sulawesi Utara	99,30	99,30	99,31	99,41	99,45	99,46	99,53	99,56
Indonesia	91,45	91,87	92,19	92,58	92,91	92,99	93,25	94,14

*Sumber: BPS; [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)*

*c. Lama sekolah rata-rata*

Lama sekolah rata-rata menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan bersama dengan angka harapan hidup. Tabel 4.17 memberikan gambaran tentang lama sekolah rata-rata menurut kabupaten/kota di Sulawesi Utara dari tahun 2006-2013. Secara keseluruhan, lama sekolah rata-rata di Sulawesi Utara pada tahun 2013 sebesar sembilan tahun, naik 0,29 tahun (3,3 persen) selama tujuh tahun. Kenaikan tersebut lebih rendah dari tingkat nasional, yaitu 0,7 tahun atau naik 10 persen pada periode yang sama. Akan tetapi, lama sekolah rata-rata di Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Lama sekolah rata-rata sembilan tahun dicapai pada tahun 2012 di Sulawesi Utara. Artinya, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Sulawesi Utara sudah dicapai sejak tahun 2012.

Tabel 4.17

**Lama Sekolah Rata-rata menurut Kabupaten/Kota, Sulawesi Utara 2006-2013**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bolmong	7,34	7,39	7,39	7,39	7,39	7,41	7,44	7,48
Minahasa	8,80	8,80	8,80	9,01	9,20	9,22	9,54	9,55
Sangihe	7,70	7,70	7,70	7,71	7,71	7,73	7,74	7,76
Talaud	8,21	8,47	8,47	8,65	8,75	8,78	8,80	8,82
Minsel	8,44	8,54	8,54	8,54	8,75	8,76	8,78	8,80
Minut	9,07	9,07	9,07	9,09	9,37	9,38	9,40	9,42
Bolmut	7,10	7,10	7,10	7,31	7,31	7,42	7,44	7,44
Sitaro	7,00	8,24	8,24	8,30	8,45	8,47	8,49	8,65
Mitra	8,00	8,08	8,08	8,09	8,39	8,40	8,41	8,43
Bolsel	-	-	6,05	6,10	6,29	6,50	6,88	7,32
Boltim	-	-	6,30	6,35	6,72	7,10	7,42	7,50
Manado	10,50	10,58	10,58	10,59	10,60	10,83	10,84	10,92
Bitung	9,20	9,20	9,20	9,20	9,42	9,44	9,46	9,47
Tomohon	9,60	9,60	9,60	9,89	9,89	10,00	10,16	10,30
Kotamobagu	7,50	8,85	8,85	9,00	9,12	9,14	9,53	9,54
Sulawesi Utara	8,80	8,80	8,80	8,82	8,89	8,92	9,00	9,09
Indonesia	7,40	7,47	7,52	7,72	7,92	7,94	8,08	8,14

Sumber: BPS; [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Tabel 4.17 juga menjelaskan perbedaan lama sekolah rata-rata antarkabupaten/kota di Sulawesi Utara. Di daerah kota dan kabupaten yang relatif lebih maju, lama sekolah rata-rata lebih dari sembilan tahun, sedangkan di kabupaten-kabupaten baru berkembang kurang dari sembilan tahun. Program pendidikan dasar sembilan tahun belum dicapai di kabupaten-kabupaten tersebut, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, dan Kepulauan Sangihe hanya sekitar 7-8 tahun. Hasil Susenas tahun 2014, juga menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kabupaten-kabupaten tersebut tergolong rendah dibandingkan di kabupaten lainnya. Pada tahun 2014 APS Sulawesi Utara pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,95 persen, pada kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,34 persen, dan pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 71,98 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 93,42 persen, SMP sebesar 72,32 persen, dan SMA sebesar 61,69 persen, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 108,86, SMP sebesar 87,70, dan SMA sebesar 83,48.

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah memperoleh pendidikan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti di Sulawesi Utara. Lama sekolah rata-rata telah melebihi 9 (sembilan) tahun, dibandingkan lama sekolah rata-rata di tingkat nasional yang kurang dari sembilan tahun. Kabupaten/kota dengan lama sekolah rata-rata tertinggi adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Minahasa. Lama sekolah rata-rata Kota Manado dan Kota Tomohon tergolong tinggi, karena sebelum Indonesia merdeka kedua kota ini dijadikan pusat pengembangan pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, di kabupaten/kota yang berdekatan dengan Kota Manado dan Tomohon tingkat pendidikan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten/kota lainnya. Kota

Kotamobagu mengalami perkembangan cukup pesat dalam bidang pendidikan, karena dewasa ini menjadi salah satu pusat pengembangan pendidikan di Sulawesi Utara.

*d. Pengeluaran riil per kapita*

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/UNDP*) mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita riil rata-rata yang disesuaikan. Besarnya pengeluaran riil rata-rata per kapita merupakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok sebagai ukuran dimensi hidup layak. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di provinsi Sulawesi Utara tergolong tinggi karena berada di atas daya beli nasional. Data tersebut juga menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita di Sulawesi Utara terdistribusi hampir merata di seluruh kabupaten/kota. Besarnya pengeluaran per kapita di Sulawesi Utara setara dengan USD 53,6 per bulan atau USD 1,79 per hari (USD 1= Rp12.000). Bila dibandingkan dengan garis kemiskinan berdasarkan standar PBB USD 2 per hari, maka penduduk Sulawesi Utara masih di bawah standar hidup layak. Akan tetapi, bila menggunakan standar BPS yang disesuaikan untuk Indonesia, yaitu USD 1,5 per hari, maka penduduk Sulawesi Utara di atas standar hidup layak. Akan tetapi, capaian itu kiranya tidak membuat pemerintah dan masyarakat puas dan menjadi lengah, mengingat pengeluaran riil rata-rata per kapita Sulawesi Utara hanya sedikit di atas rata-rata nasional, dan dibawah standar hidup layak PBB.

**Tabel 4.18**  
**Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bolmongt	606,67	607,31	608,55	612,39	617,02	622,05	625,62	628,58
Minahasa	613,14	615,99	619,74	621,74	624,74	629,01	632,63	635,56
Sangihe	620,54	623,94	628,55	633,60	636,09	640,88	643,98	647,10
Talaud	618,28	619,00	623,35	625,68	628,16	632,03	635,13	637,53
Minsel	595,92	606,01	610,86	614,47	616,43	620,80	624,42	627,05
Minut	611,34	617,82	622,71	624,14	626,56	631,45	635,01	637,33
Bolmut	605,90	615,13	620,13	622,01	624,89	628,48	632,27	636,06
Sitaro	618,10	618,20	623,27	625,12	627,98	632,24	635,97	639,39
Mitra	595,00	601,26	605,77	610,08	611,42	615,70	619,46	622,70
Bolsel	-	-	589,52	593,25	595,40	599,68	603,43	606,76
Boltim	-	-	607,37	610,81	612,19	617,08	619,16	622,45
Manado	623,48	625,98	631,88	637,32	639,30	643,59	647,46	650,81
Bitung	619,69	623,60	628,47	632,04	634,89	639,65	643,34	646,31
Tomohon	612,02	616,19	621,61	622,79	624,98	629,78	633,07	635,90
Kotamobagu	613,45	614,84	620,26	624,16	627,95	632,84	636,52	639,49
Sulawesi Utara	616,88	619,39	625,58	631,00	634,88	639,57	643,20	646,19
Indonesia	621,26	624,37	628,33	631,46	633,64	638,05	641,04	643,36

Sumber: BPS; [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pengeluaran riil per kapita Sulawesi Utara sejak 2006-2013, tidak mengalami kenaikan yang berarti. Laju pertumbuhan PDRB Sulawesi Utara selama periode tersebut berfluktuasi pada kisaran 6 (enam) persen. Sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi Sulawesi Utara angka pertumbuhannya menurun dari 5,0 persen tahun 2009 menjadi 3,5 persen tahun 2014. Sektor-sektor yang angka pertumbuhannya tinggi (>10%) adalah sektor listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor informasi dan komunikasi. Akan tetapi, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Utara sangat rendah. Kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap PDRB Sulawesi Utara tahun 2014 sebesar 22 persen, sementara sektor listrik dan gas hanya 0,1 persen, transportasi dan pergudangan 9,8 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 2,1 persen, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,8 persen.

Tabel 4.19 memberikan gambaran kondisi perekonomian provinsi Sulawesi Utara yang didasarkan pada perkembangan indikator-indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pengangguran, dan kemiskinan. Indikator-indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian provinsi Sulawesi Utara mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan laporan BPS Sulawesi Utara, hingga triwulan ketiga tahun 2015 ekonomi Sulawesi Utara tumbuh sebesar 6,28 persen dibandingkan dengan triwulan ketiga tahun 2014. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor konstruksi sebesar 10,75 persen, diikuti sektor jasa keuangan dan asuransi (9,57 persen) dan jasa pendidikan (9,36 persen).

**Tabel 4.19**

**Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012**

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,56	6,51	5,84	6,17	6,86	6,38	6,31
2.	PDRB per kapita riil (Rp)	12,61	14,38	16,26				
3.	PDRB per kapita HK 2000 (Rp)	7,16	7,63	8,09				
3.	Koefisien Gini	0,35	0,35	0,32				
4.	Pengangguran	12,35	10,56	9,61	8,62	7,79	6,79	
5.	Kemiskinan	10,10	9,79	9,10	8,51	8,18	8,5	

*Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, 2014.*

Walaupun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara cenderung stagnan, angka pengangguran dan kemiskinan cenderung menurun. Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Sulawesi Utara, kontribusinya bagi pembentukan PDRB semakin menurun. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, bangunan, jasa, pengangkutan dan komunikasi semakin berkembang. Perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut mengindikasikan adanya perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Utara. Perubahan struktur ekonomi berimplikasi pada peningkatan kegiatan ekonomi yang berdampak bagi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan keempat indikator sebagaimana diuraikan di atas diperoleh gambaran tentang kinerja pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Tabel 4.20 secara umum menggambarkan bahwa IPM Sulawesi Utara meningkat terus sejak tahun 2006-2013 dan berada di atas rata-rata nasional. Akan tetapi, kenaikannya lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan di tingkat nasional. IPM provinsi Sulawesi Utara naik empat persen dan Indonesia naik lebih dari lima persen selama periode 2006-2013. Sulawesi Utara sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 adalah provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2013, Sulawesi Utara bergeser ke posisi ketiga digantikan DI Yogyakarta yang menempati posisi kedua, padahal pada tahun 2012 DI Yogyakarta berada pada posisi keempat. Kondisi ini terjadi bukan karena menurunnya kualitas hidup di Sulawesi Utara, tetapi IPM DI Yogyakarta meningkat lebih cepat dibandingkan Sulawesi Utara.

**Tabel 4.20**

**Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota: Sulawesi Utara 2006-2013**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bolmong	71,80	71,98	72,11	72,52	72,99	73,47	73,83	74,22
Minahasa	74,19	74,50	74,86	75,28	75,74	76,12	76,69	77,06
Sangihe	73,77	74,19	74,67	75,21	75,58	76,07	76,42	76,79
Talaud	73,03	73,77	74,34	74,83	75,30	75,76	76,14	76,47
Minsel	72,34	73,32	73,79	74,18	74,68	75,10	75,46	75,82
Minut	74,23	74,90	75,33	75,57	76,08	76,54	76,91	77,23
Bolmut	70,49	71,30	71,84	72,27	72,63	73,08	73,48	73,94
Sitaro	70,76	72,10	72,58	72,86	73,30	73,70	74,06	74,56
Mitra	70,75	71,45	71,87	72,31	72,71	73,09	73,42	73,79
Bolsel	-	-	69,65	70,03	70,36	70,87	71,63	72,27
Boltim	-	-	71,49	71,85	72,27	72,97	73,41	73,75
Manado	76,40	76,76	77,28	77,79	78,02	78,57	78,92	79,34
Bitung	73,71	74,15	74,61	75,00	75,52	75,96	76,30	76,66
Tomohon	74,65	75,12	75,65	76,09	76,39	76,92	77,40	77,82
Kotamobagu	72,56	73,90	74,46	75,03	75,53	76,03	76,68	77,05
Sulawesi Utara	74,37	74,68	75,16	75,68	76,09	76,54	76,95	77,36
Indonesia	70,08	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81

Sumber: BPS; [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

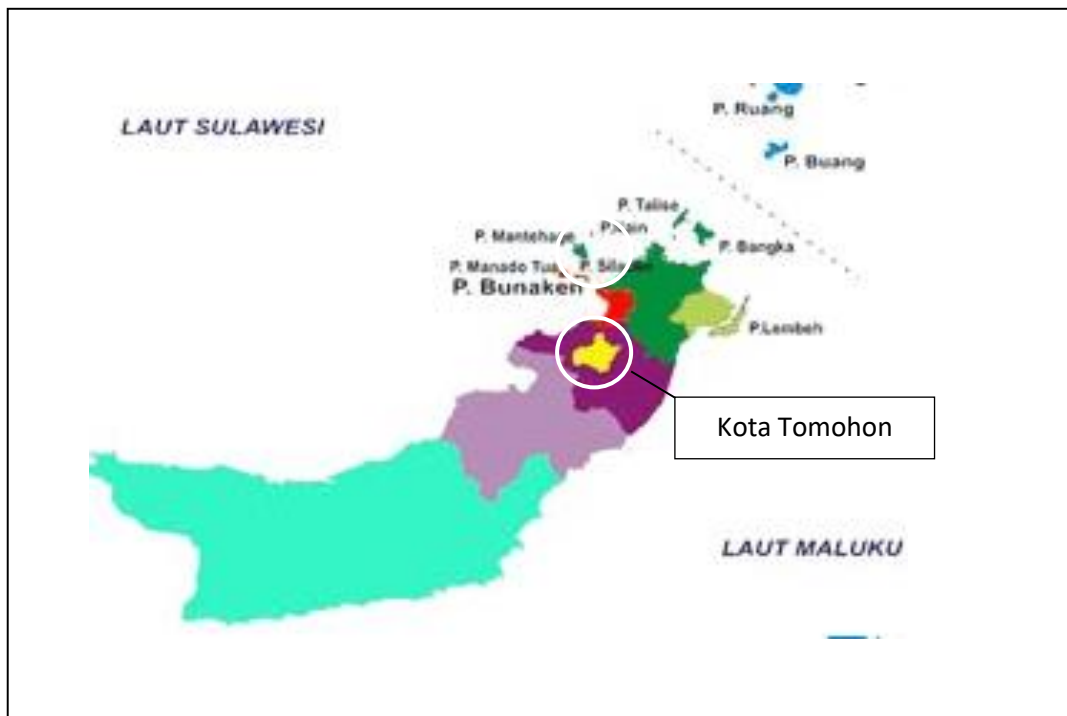
Tabel 4.23 juga menunjukkan bahwa IPM kabupaten/kota di Sulawesi Utara cukup variatif. IPM tertinggi di Kota Manado, kemudian diikuti Kota Tomohon di urutan kedua, Kabupaten Minahasa Utara urutan ketiga, Kabupaten Minahasa dan Kota Kotamobagu masing-masing pada urutan keempat dan kelima. IPM terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, dan Siau Tagulandang Biaro. Akan tetapi secara nasional, IPM kabupaten-kabupaten ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga Gorontalo (71,77) dan Sulawesi Tenggara (71,73). Bahkan provinsi Banten yang dekat dengan DKI Jakarta IPM hanya 71,90. IPM di kabupaten-kabupaten ini rendah sebagai akibat dari AHH

dan rata-rata lama sekolah tergolong rendah. Program-program pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan lagi di kabupaten-kabupaten tersebut agar setara dengan kabupaten lainnya di Sulawesi Utara.

#### 4.4. Profil Kota Tomohon

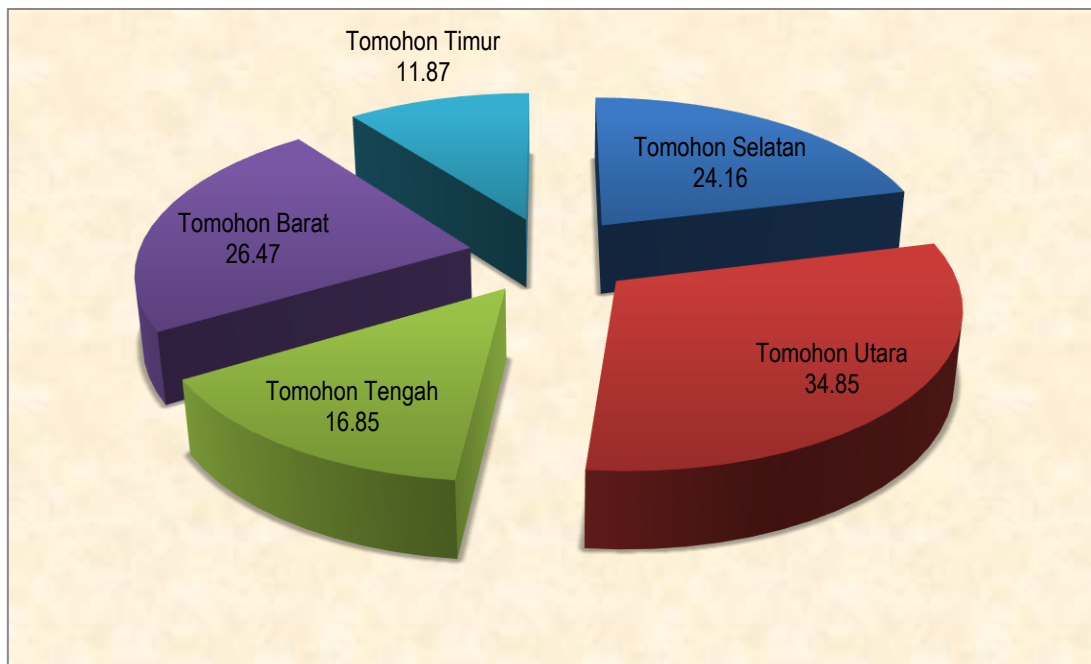
Kota Tomohon terletak pada 1°6'00" sampai dengan 1°24'42" Lintang Utara dan 142°44'10" sampai dengan 142°55'00" Bujur Timur (Gambar 4.26). Dilihat dari kondisi geografisnya berada pada pertengahan Sulawesi Utara, yang terdapat empat koridor masuk ke kota, yaitu dari gerbang utara, gerbang timur, gerbang selatan, dan gerbang barat. Hal ini memungkinkan Kota Tomohon sebagai *spill over* dalam menunjang arus transportasi dan penghubung aksesibilitas menuju ke pusat kota Manado sebagai ibukota provinsi dengan daerah sub-pusat regional Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, serta Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Gambar 4.26**  
**Peta Kota Tomohon dalam Provinsi Sulawesi Utara**



Kota Tomohon merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak sekitar 23 km dari Manado, dengan sekitar 0,96% dari luas Provinsi Sulawesi Utara. Kota Tomohon Terbagi atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Utara (34,85 km<sup>2</sup>), Tomohon Timur (11,87 km<sup>2</sup>), Tomohon Tengah (16,85 km<sup>2</sup>), Tomohon Barat (26,47 km<sup>2</sup>), dan Tomohon Selatan (24,16 km<sup>2</sup>), serta mencakup 44 kelurahan dengan luas seluruh wilayah Kota Tomohon 114,20 km<sup>2</sup> (Gambar 4.27). Batas-batas Wilayah Kota Tomohon di sebelah Utara adalah Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, di sebelah Timur adalah Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, di sebelah Selatan adalah Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, dan di sebelah Barat adalah Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

**Gambar 4.27**  
**Luas Kota Tomohon Menurut Kecamatan (km<sup>2</sup>)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tomohon

Sebagian besar wilayah Tomohon memiliki topografi bergunung-gunung dan berbukit yang melintang dari Utara sampai Selatan yang di antaranya terdapat beberapa gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Lokon (1579.6 M) dan Mahawu (1331.0 M). Kota Tomohon terletak pada ketinggian mulai dari 400 m sampai dengan 1500 m di atas permukaan laut dan beriklim sejuk dengan suhu antara 18°C dan 30°C dan kelembaban udara 89 – 93%. Kecepatan angin rata-rata berkisar 1.45 – 3.76 Knot. Jumlah curah hujan rata-rata 120.0 – 278.9 mm. Penyinaran matahari rata-rata di Kota Tomohon 24 – 52%. Tekanan udara Rata-rata di Kota Tomohon 941.9 – 943.1.

Kota Tomohon merupakan salah satu daerah rawan bencana di Sulawesi Utara. Dengan adanya Gunung Lokon yang masih aktif sampai pada saat ini dan daerah pebukitan yang rawan longsor jika curah hujan yang cukup

tinggi. Sebagian lahan digunakan untuk tanaman cengkeh dan buah-buahan lokal (durian, lansat, papaya, jambu), hortikultura, palawija, serta hutan lindung. Panorama alam dapat dinikmati ketika melewati ruas jalan raya kota Manado ke kota Tomohon. Di bagian Selatan terdapat bukit Wawo, danau Linow yang unik karena warnanya berubah-ubah, sumber air panas, PLTU, dan pemukiman penduduk pada daerah yang relatif datar. Kondisi tanah umumnya gembur dan digunakan sebagian untuk lahan pertanian dan perkebunan. Pada bagian timur terdapat gunung vulkanik Mahawu dan merupakan daerah pertanian tanaman hortikultura yang produktif. Lahan pertanian umumnya sudah digarap optimal oleh masyarakat. Di bagian barat laut, terdapat Gunung Lokon, lahan pertanian, perkebunan dan persawahan, kompleks persekolahan dan sebagian permukiman penduduk.

Kondisi kehidupan budaya masyarakat kota Tomohon merupakan etnis Tombulu yang dalam perkembangannya telah hidup berdampingan dengan berbagai etnis, antara lain etnis Tolour, Tountemboan, dan Tonsea, bahkan juga terdapat etnis Jawa, Sangir, dan Cina. Perkembangan yang begitu pesat berdampak terhadap membaurnya etnis ini sehingga terjadi unifikasi etnis, bahasa dan agama. Di wilayah ini, budaya masyarakat sangat terbuka dan tidak mempersoalkan perbedaan etnis, suku, perbedaan pandangan politik, dan perbedaan agama.

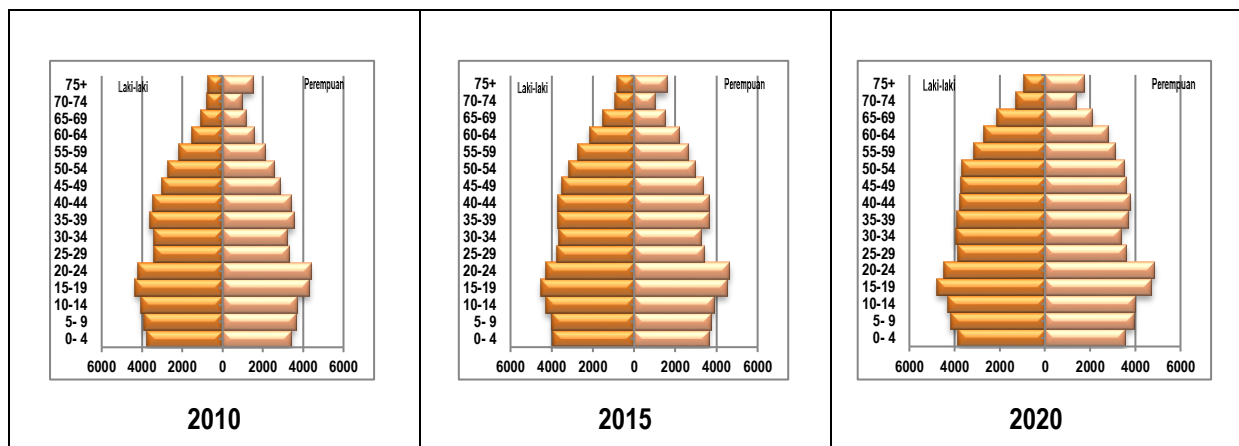
Saat ini Kota Tomohon juga dikenal dengan sebutan Kota Bunga karena potensi bunga yang ada di kota Tomohon sangat beragam dan dengan ditunjang oleh kondisi alam yang mendukung. Program pemerintah kota adalah menjadikan Tomohon sebagai daerah pengekspor bunga khususnya bunga potong. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang program ini sementara digalakkan dan penyiapan infrastruktur begitu gencarnya dilaksanakan saat ini.

Penduduk Kota Tomohon berjumlah 91.913 jiwa pada tahun 2010 dan diproyeksikan meningkat menjadi 100.373 jiwa pada tahun 2015 dan akan meningkat menjadi 108.489 jiwa pada tahun 2020. Jadi, penduduk Kota Tomohon diproyeksikan akan bertambah sebanyak 8.116 jiwa pada periode 2015-2020 dengan angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, sebesar 1,57 persen per tahun. Struktur umur penduduk Kota Tomohon antara muda dan tua, dengan piramida penduduk konstriktif (Gambar 4.28). Pada tahun 2015, 23,4% dari penduduk Kota Tomohon berusia 0-14 tahun, 69,2% berusia 15-64 tahun, dan 7,4% berusia 65 tahun ke atas sehingga rasio ketergantungan umur Kota Tomohon sebesar 44,4 pada tahun 2015 (Gambar 4.29). Jadi, Kota Tomohon sedang berada di jendela kesempatan demografis tahap 1. Akan tetapi, pada tahun 2018, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan berkurang sehingga rasio ketergantungan umur Kota Tomohon diproyeksikan akan meningkat menjadi 44,7 pada tahun 2020 (Gambar 4.30). Dinamika struktur umur penduduk Kota Tomohon ini harus diantisipasi dengan penyiapan penduduk yang akan memasuki usia lanjut agar tetap sehat dan produktif serta berinvestasi agar bonus demografis tahap 2 dapat dinikmati.

#### **Gambar 4.28**

#### **Piramida Penduduk Kota Tomohon: 2010, 2015, dan 2020**

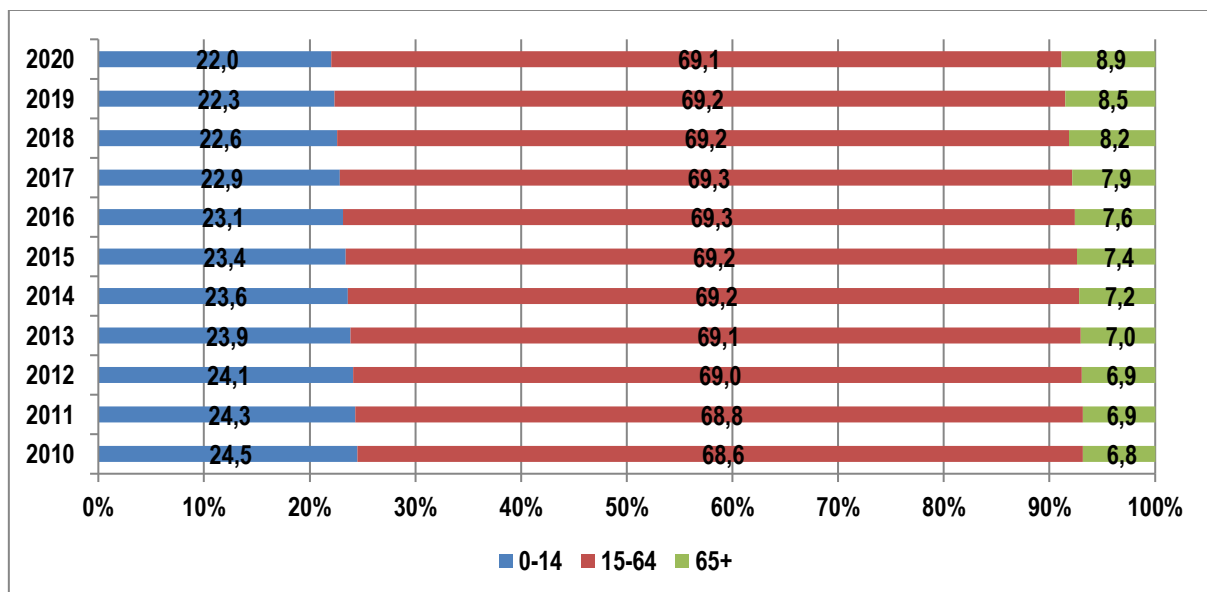




Gambar 4.29

Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas:

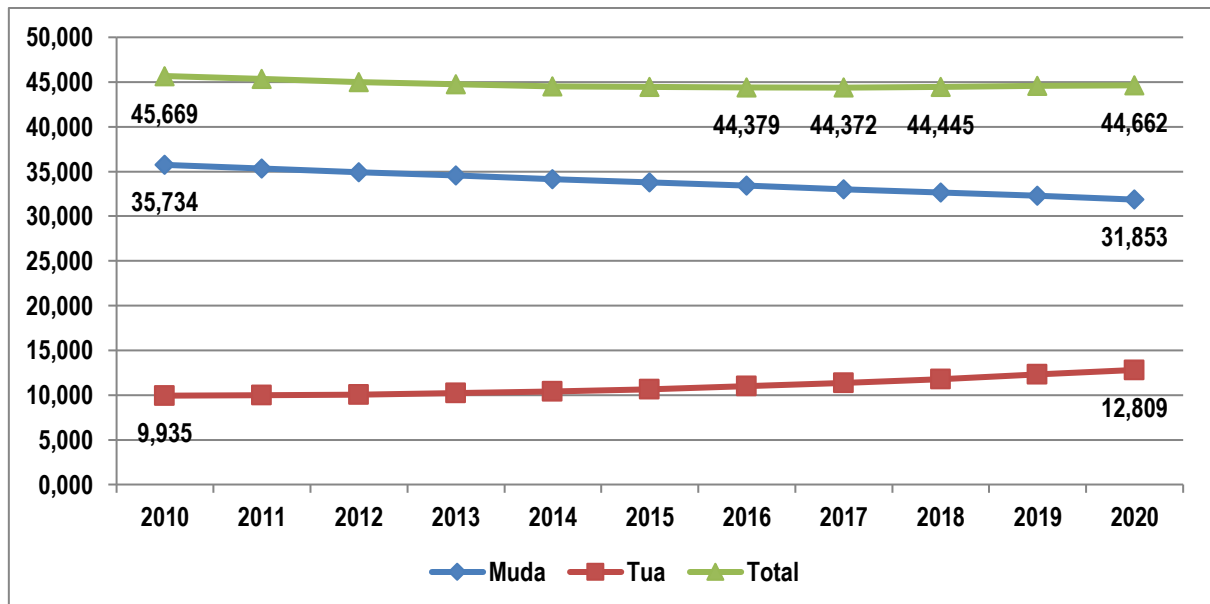
Kota Tomohon 2010-2020



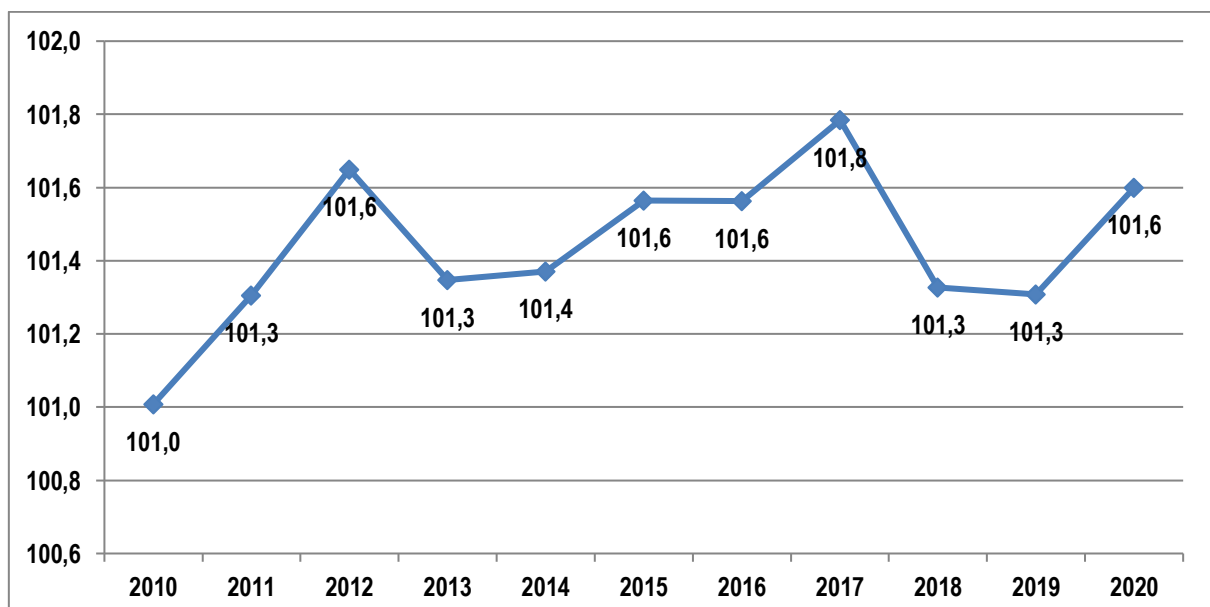
Ada lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan di Kota Tomohon. Terdapat 1.016 laki-laki per 1.000 perempuan di Kota Tomohon pada tahun 2015 (Gambar 4.30). Menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin relatif tinggi pada penduduk usia muda (0-14 tahun) dan kurang dari 100 pada usia 20-24 tahun, dan lebih dari 100 pada usia 25-39 tahun (Gambar 4.31). Hal ini dapat disebabkan karena ada kecenderungan penduduk usia 20-24 tahun untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja ke luar Kota Tomohon, dan adanya migrasi masuk penduduk laki-laki usia 25-39 tahun untuk mengisi lapangan pekerjaan, khususnya konstruksi, yang kurang diminati penduduk laki-laki Kota Tomohon. Rasio jenis kelamin penduduk usia 75 tahun ke atas sangat rendah, sekitar 50. Artinya, jumlah penduduk perempuan usia 75 tahun ke atas sekitar dua kali jumlah penduduk laki-laki usia 75

tahun ke atas di Kota Tomohon. Implikasinya adalah pentingnya peningkatan perlindungan sosial penduduk usia lanjut perempuan di Kota Tomohon.

**Gambar 4.30**  
**Rasio Ketergantungan Umur: Kota Tomohon 2010-2020**

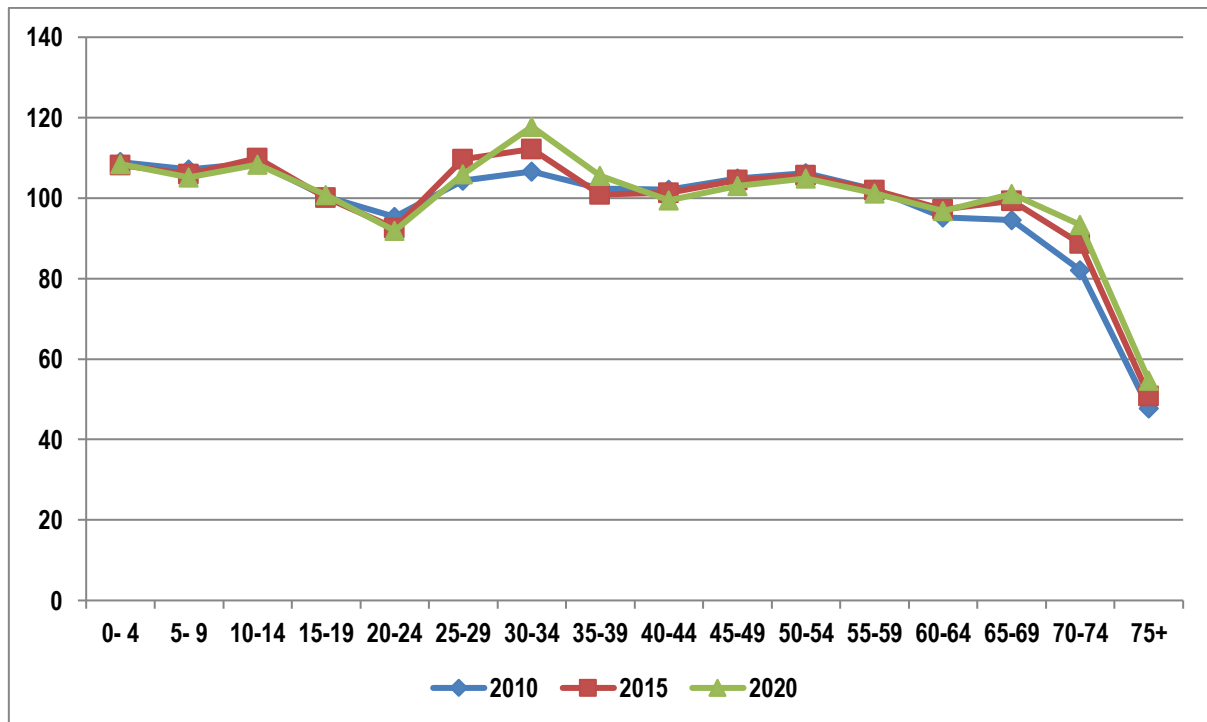


**Gambar 4.31**  
**Rasio Jenis Kelamin: Kota Tomohon 2010-2020**



Gambar 4.33

Rasio Jenis Kelamin menurut Umur: Kota Tomohon 2010-2020



Kota Tomohon merupakan salah satu kabupaten/kota yang paling maju di Sulawesi Utara. Dalam hal kesehatan, pada tahun 2013, harapan hidup saat lahir penduduk Kota Tomohon nomor dua paling panjang di Sulawesi Selatan (73,13 tahun) setelah harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Sangihe (73,55 tahun), lebih panjang daripada harapan hidup saat lahir penduduk Sulawesi Utara (72,62 tahun) dan Indonesia (70,07 tahun). Dalam bidang pendidikan, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (AMH) di Kota Tomohon nomor tiga paling tinggi di Sulawesi Utara (99,88), setelah AMH Kabupaten Minahasa (99,90) dan AMH Kota Manado (99,93), dan lebih tinggi daripada AMH Sulawesi Utara (99,56) dan Indonesia (94,14). Lama sekolah rata-rata (MYS) di Kota Tomohon nomor dua paling panjang di Sulawesi Utara (10,3 tahun), setelah MYS Kota Manado (10,92 tahun), dan lebih panjang dari lama sekolah rata-rata Sulawesi Utara (9,09 tahun) dan Indonesia (8,14 tahun). Dalam bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tomohon nomor dua paling tinggi di Sulawesi Utara (77,82), setelah IPM Kota Manado (79,34), dan lebih tinggi daripada IPM Sulawesi Utara (77,36) dan IPM Indonesia (73,81).

## BAB 5

### FAKTA BONUS DEMOGRAFI DAN PEMANFAATAN JENDELA KESEMPATAN

Fakta tentang Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela kesempatan oleh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Sulawesi Utara, dan Kota Tomohon diuraikan dalam Bab 5 ini. Materi dari bab ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan sumber daya manusia, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial, Perwakilan Badan Keluarga Berencana, institusi terkait lain, dan tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberi masukan dalam studi ini. Berikut diuraikan Fakta Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan di keempat wilayah studi.

#### 5.1. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pencapaian pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah daripada pencapaian pembangunan Indonesia secara rata-rata dan lebih rendah daripada pencapaian pembangunan di provinsi-provinsi di bagian barat Indonesia. Seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita paling rendah pada tahun 2013, indeks pembangunan manusia (IPM) paling rendah ketiga pada tahun 2014, dan tingkat kemiskinan nomor tiga paling tinggi pada tahun 2013. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan 2010 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif tinggi, 2,07% per tahun pada periode 2000-2010, sementara pada periode yang sama angka pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun. Hasil SP 2010 juga menunjukkan bahwa angka fertilitas total (*total fertility rate*/TFR) Provinsi Nusa Tenggara Timur paling tinggi (3,82 anak per perempuan), sementara TFR Indonesia 2,41 anak per perempuan. Angka makroregat pada Tabel 5.1 merupakan 'potret' pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk sebesar 5.036.897 jiwa pada tahun 2014 yang perlu mendapat perhatian yang lebih pada masa mendatang.

Tabel 5.1

#### Perbandingan beberapa Makroagregat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia

Makroagregat	Nusa Tenggara Timur	Indonesia	Keterangan
PDRB per Kapita (rupiah, 2013)	2.976,620	10.149.350	Nusa Tenggara Timur paling rendah
Indeks Pembangunan Manusia (2014)	62,26	68,90	Nusa Tenggara Timur nomor tiga paling rendah setelah Papua dan Papua Barat
Tingkat Kemiskinan (% , 2014)	19,6%	10,96%	Nusa Tenggara Timur nomor tiga paling tinggi setelah Papua dan Papua Barat
Angka Fertilitas Total (anak per perempuan, SP 2010)	3,82 (SP2000)	2,41 (SP2000)	Nusa Tenggara Timur paling tinggi
Penduduk (jiwa, 2014)	5.036.897	255.461.700	
Pertumbuhan Penduduk (persen per tahun, 2000-2010)	2,07	1,49	

Sehubungan dengan Fakta Bonus Demografi dan Pemanfaatan jendela Kesempatan atas hasil wawancara mendalam dan studi dokumen pembangunan disajikan sebagai berikut

#### **5.1.1. Permasalahan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Salah satu permasalahan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bahwa konsep pembangunan berkelanjutan belum disepakati. Terdapat ketidaksinkronan kebijakan antara kebijakan pusat, kebijakan provinsi, dan kebijakan daerah (kabupaten/kota). Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami urbanisasi dan migrasi keluar yang tinggi, dengan memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini justru terjadi pada kelompok penduduk usia produktif. Dalam bidang kesehatan, permasalahan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah dalam hal gizi buruk dan kesehatan bayi, tingkat kelahiran tinggi, kematian ibu tinggi, dan kematian bayi tinggi. Permasalahan selanjutnya adalah kuantitas, kualitas, jenis, dan penyebaran pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar nasional. Tenaga kesehatan masih banyak berpendidikan setingkat D1 (UU Kesehatan Nasional tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, minimum berpendidikan lulus D3). Selanjutnya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur pelayanan kesehatan belum maksimal, belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, di samping fasilitas yang belum memadai. Regulasi (*standard operational procedure/SOP*) dalam bidang kesehatan belum dapat dijalankan dengan baik. Permasalahan lain adalah bahwa belum ada Sekolah Keperawatan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Permasalahan pembangunan dalam bidang pendidikan antara lain, rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Disebutkan rendahnya tingkat pendidikan ini akibat anggaran pendidikan yang rendah. Hal ini berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Permasalahan dalam bidang tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah rendahnya jiwa kewirausahaan. Terdapat sebanyak 3,16% penganggur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, penduduk yang setengah menganggur sangat banyak. Sebanyak 28,94% pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pekerja tanpa upah, dan umumnya bekerja di sektor pertanian. Karena tingkat setengah menganggur tinggi, maka hal ini berdampak pada kemiskinan.

Permasalahan dalam bidang sosial adalah kemiskinan, ketelantaran, penduduk cacat, penduduk ketunaan, dan korban narkotik dan obat-obatan (narkoba). Dampak dari kemiskinan adalah banyaknya penduduk terlantar. Penduduk terlantar terjadi pada penduduk usia lanjut, anak-anak, penduduk cacat fisik dan psikis, dan penduduk mantan narapidana. Terdapat sebanyak 35.000 orang penduduk cacat dengan tingkat kecacatan dari rendah sampai tinggi. Disamping tingginya penyakit ketunaan di provinsi ini, masalah ini juga menjadi kronis dan bencana sosial. Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak didatangi pekerja seks komersial (PSK) setelah lokalisasi PSK ditutup di Surabaya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat sebanyak 700.000 orang penyandang **masalah kesejahteraan sosial (PMKS)**, yang terdiri dari PSK dan Waria, serta korban narkoba.

### 5.1.2. Isu Strategis dan Sasaran Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isu strategis utama pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pembangunan perbatasan, keamanan, dan ekonomi. Isu lain adalah tentang kepulauan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat sebanyak 1.192 pulau, dan yang berpenghuni hanya sebanyak 42 pulau. Dalam bidang kesehatan isu strategis adalah pemenuhan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan dan pelatihan. Keterampilan tenaga kerja yang cenderung komunal sehingga kontraproduktif merupakan isu dalam bidang ketenagakerjaan.

**Akibat budaya komunal adalah produktivitas yang sulit ditingkatkan.** Pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan pekerja yang berasal dari luar, misalnya pekerja dari Pulau Jawa yang cenderung individualistis. Karakteristik individualisme ini menghasilkan kompetisi sehingga pekerja tersebut kompetitif.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan isu strategis dalam bidang pendidikan. Dalam bidang sosial, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai isu strategis pembangunan sebagai berikut

1. Karena banyak daerah sulit dijangkau karena letak geografi, dibangun Komunitas Adat Terpencil.
2. Mengadakan pemetaan komunitas adat.
3. Pemberdayaan masyarakat.
4. Penguatan ketahanan masyarakat melalui lembaga yang menangani masalah-masalah sosial.
5. Membangun perlindungan sosial, termasuk memilih jenis sandang pangan.
6. Memberikan jaminan sosial dalam melaksanakan UU.
7. Membangun Program Keluarga Harapan (PKH).

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran pembangunan dalam beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, korban tindak kekerasan (KTP) dan pekerja migran (PM), dan dalam bidang kepulauan. Sasaran pembangunan dalam bidang ekonomi adalah peningkatan produksi pertanian dan peningkatan ekonomi kreatif. Sasaran pembangunan dalam bidang kesehatan adalah peningkatan dalam tingkat pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dalam bidang pendidikan berupa peningkatan mutu dan jumlah penduduk yang belajar. Dalam bidang kemiskinan, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 15%, dan kebutuhan prioritas, yakni pembangunan pedesaan adalah program "Anggaran Untuk Masyarakat Menuju Sejahtera", yang disebut sebagai program Desa Mandiri Anggur Merah. Dalam bidang pendidikan, Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target TFR menjadi 2,4 pada tahun 2018 melalui program kesehatan dan kesehatan reproduksi. Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu peningkatan program keluarga berencana (KB). Program KB akan dilakukan melalui advokasi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kesehatan reproduksi, pos pelayanan terpadu, dan petugas lapangan KB (PLKB).

Dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran pembangunan berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan

sarana dan prasarana, dan menurunkan delapan (8) jenis penyakit utama, di antaranya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan diare.

Sasaran pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan berwirausaha. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sasaran pembangunan berupa peningkatan pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan peningkatan angka partisipasi sekolah. Dinas Sosial menetapkan sasaran pembangunan, yakni kelompok penduduk yang menyandang masalah sosial, kemudian membangun dan menjalin kerja sama dengan lembaga yang bergerak menangani masalah sosial dan melibatkan gereja.

### **5.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Masa depan Nusa Tenggara Timur ada di laut. Arah kebijakan pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah pembangunan pada sektor kelautan. Selanjutnya, urbanisasi/migrasi (TKI) dianggap belum menjadi masalah. Arah kebijakan pembangunan dari sektor ketenagakerjaan adalah mengupayakan kesempatan magang untuk tenaga kerja berusia muda, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan meningkatkan pendidikan pekerja, karena 61,4% tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpendidikan SD ke bawah.

Strategi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan tujuan pembangunan kualitas SDM penduduk, dan peningkatan peran keluarga. Ditargetkan agar anggaran yang terserap dapat mencapai 60% pada tahun 2016.

Dalam bidang kesehatan strategi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah memberikan bantuan pendidikan, merekrut tenaga kerja, dan rehabilitasi program kesehatan ibu dan anak (KIA). Strategi pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan adalah dengan memberikan pelatihan yang efektif dalam bidang kewirausahaan.

### **5.1.4. Fakta dan Kebijakan dalam Hubungannya dengan Isu Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan di Nusa Tenggara Timur**

#### ***Fakta Bonus Demografi di Nusa Tenggara Timur***

Meskipun relatif tertinggal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, transisi demografi telah memungkinkan Nusa Tenggara Timur mengalami bonus demografi berupa kemajuan yang berarti dalam pencapaian pembangunan. Dalam bidang pendidikan, pada periode 2003-2010, angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun masing-masing meningkat 6,3%, 13,4%, 30,3%, dan 55,4%. Sementara itu, pada periode yang sama angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas masing-masing meningkat 8,7%, 20,6%, dan 73,4%. Selanjutnya, pada periode yang sama angka partisipasi murni jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas masing-masing meningkat 5,4%, 30,5%, dan 48,2%. Jadi, transisi demografi yang relatif lambat di Nusa Tenggara Timur berkontribusi terhadap peningkatan investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah ke atas.

Dalam bidang kesehatan, hasil Riset Kesehatan Dasar 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa anak usia bawah lima tahun dengan status gizi kurang telah menurun dari sekitar 20% pada tahun 2007 menjadi sekitar 15% pada tahun 2013. Selain itu, harapan hidup saat lahir meningkat secara nyata dari hanya 44,4 tahun menurut SP 1971 menjadi 67,4 tahun menurut SP 2010. Dalam bidang ekonomi, pada periode 2000-2013, PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan 2000 meningkat sekitar 87,3% dari Rp.7,8 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.14,8 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, PDRB per kapita meningkat sebesar 44,5% dari Rp.2,06 juta pada tahun 2010 menjadi Rp.2,98 juta pada tahun 2013.

### ***Pemanfaatan Jendela Kesempatan di Nusa Tenggara Timur***

Sebagian besar perencanaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur belum pernah mendengar isu bonus demografi dan jendela kesempatan. Akibatnya, isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan dominasi penduduk usia produktif dalam struktur umur penduduk belum diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan. Walaupun belum menuliskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur secara tersirat sudah mengakomodasi pemanfaatan jendela kesempatan dalam program pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian. Selain itu, secara tersurat diakui bahwa tingkat kelahiran yang tinggi merupakan salah satu agenda pembangunan yang penting untuk ditangani dalam rangka percepatan pembangunan.

Secara umum prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah rencana akan mengharmonisasikan bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan pada penyusunan RPJMD berikutnya. Dalam hal ini, dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum telah mengamanatkan hal-hal berikut untuk pemanfaatan jendela kesempatan dalam rangka menuai bonus demografi: peningkatan pelayanan pendidikan; peningkatan derajat dan kualitas kesehatan; pemberdayaan ekonomi rakyat dengan melibatkan koperasi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; percepatan pembangunan kelautan dan perikanan; percepatan penanggulangan kemiskinan dan bencana (laut dan gunung), pembangun sekolah menengah kejuruan (SMK) pertanian, pariwisata, dan peternakan (pada tahun 2015, terdapat sebanyak 229 SMK dan 450 SMA di Nusa Tenggara Timur); pemetaan komoditas unggulan agar SMK dapat diarahkan ke arah komoditas tersebut (komoditas unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah jagung, cendana, pariwisata, khususnya maritim, dan perikanan);



pembangunan dalam bidang SDM agar penduduk tidak menjadi pembantu rumah tangga; penurunan tingkat buta aksara karena tingkat buta aksara masih tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **5.2. Kabupaten Kupang**

### **5.2.1. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kupang**

Secara umum permasalahan pembangunan di Kabupaten Kupang dari kacamata Bappeda adalah Kabupaten Kupang merupakan kelompok kabupaten tertinggal, perbatasan, dan terluar. Permasalahan selanjutnya terdapat dalam pelayanan dasar, seperti dalam bidang pendidikan (kuantitas dan kualitas), kesehatan, akses, dan transportasi. Permasalahan berikutnya adalah dalam bidang ekonomi. Sektor dominan di Kabupaten Kupang dalam penyumbang PDRB (sebesar 43%) adalah sektor pertanian yang dikelola secara tradisional dan sektor perikanan/peternakan yang umumnya lebih dikuasai penduduk pendatang di Kabupaten Kupang. Diakui sektor perkebunan dan sektor jasa sedang meningkat, tetapi umumnya tidak dimiliki penduduk asli Kabupaten Kupang. Industri kecil dan menengah sedang diupayakan peningkatannya dengan banyak permasalahan dalam hal pembiayaan. Prospek ekonomi Kabupaten Kupang diarahkan dengan menarik sektor swasta berinvestasi dalam bidang pariwisata karena mempunyai panjang pantai sebesar 5.600 km. Kendalanya adalah kesiapan infrastruktur yang harus dibangun terlebih dahulu oleh pemerintah. Permasalahan dalam bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kupang adalah kurang sarana/prasarana sehingga kualitas *ouput* kurang baik, kekurangan sumber daya tenaga kependidikan, serta kemampuan rekrutmen Pemerintah Daerah yang rendah. Hingga tahun 2015, Kabupaten Kupang belum mempunyai gedung olah raga. Di Kabupaten Kupang lama sekolah rata-rata adalah 7 tahun dan tidak ada SMK. Hal ini juga ditambah dengan permasalahan geografis yang sulit dijangkau. Banyak daerah yang sulit dijangkau dengan jumlah siswa sedikit, sekolah kecil hingga darurat tetapi harus tetap dilayani.

Permasalahan pembangunan dalam bidang pelayanan kependudukan dan keluarga berencana adalah kurangnya tenaga PLKB. Kabupaten Kupang mempunyai sejumlah 177 desa/keluarga (160 desa dan 17 keluarga) di 24 kecamatan. Pada tahun 2012 hanya terdapat 24 PLKB di Kabupaten Kupang. TFR relatif tinggi sebesar 4,2 anak per perempuan pada tahun 2015. Hal ini juga disertai dengan pembiayaan terbatas. PLKB diberi upah Rp. 850.000/bulan. Dalam bidang kependudukan adalah sangat sulit mencetak data kependudukan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur berupa listrik yang padam tiap hari. Terdapat 14 kecamatan dimana listrik menyala hanya pukul 18.00 hingga 6.00. Hingga tahun 2015 masih banyak penduduk belum terdata. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Kupang adalah 398.460 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 114.974, namun jumlah pemilik kartu keluarga hanya 39.849. Jumlah penduduk wajib mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) adalah 275.238, namun pemilik KTP hanya 125.700.

Permasalahan pembangunan dalam bidang sosial pertama-tama diakibatkan oleh letak geografis Kabupaten Kupang yang sangat terpencar, pemukiman menyebar, sehingga memerlukan program intervensi, dan program

perbaikan ekonomi sulit dilakukan. Permasalahan dalam pembangunan SDM perlu pendekatan dari sisi budaya. Dinas Sosial Kabupaten Kupang mendapat beberapa permasalahan pembangunan dari sisi budaya, yang perlu penanganan dari sisi budaya; pola hidup kerja keras perlu dibina; secara umum berkarakter malas bekerja; tidak mengenal kompetisi; infrastruktur sulit; peningkatan pendidikan masyarakat; penduduk Kabupaten Kupang mempunyai karakter cukup puas dengan apa yang ada pada dirinya, suka mengadakan pesta (umumnya pesta dilakukan pada bulan Agustus – Oktober). Permasalahan pembangunan lainnya adalah dalam hal pembiayaan. Dana menjadi salah satu faktor penghambat sehingga program-program peningkatan kesejahteraan penduduk terkendala. Permasalahan pembangunan dalam bidang kesehatan adalah SDM bidang kesehatan masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun dari segi kuantitas yang masih kurang.

Dari sisi geografis, Nusa Tenggara Timur mempunyai daerah terpencil dan sangat terpencil, sehingga tidak menarik untuk dijadikan sasaran pembangunan. Daerah terpencil dan sangat terpencil mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan air, tidak ada listrik, dan tidak ada sarana perhubungan (transportasi). Jalan berupa sungai berbatu dan tanah licin pada musim hujan. Selanjutnya, permasalahan pembangunan dalam bidang kesehatan adalah status kesehatan masyarakat, meskipun belum menjadi beban ganda. Pada tahun 2014, terdapat 6 orang dari 5.508 kelahiran yang dirawat pada fasilitas kesehatan. Pada tahun 2015, terdapat 3 orang kematian ibu yang dirawat pada fasilitas kesehatan. Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2014 adalah 6.270, dengan 158 kematian Bayi. Tingkat kelahiran tinggi. Akseptor KB sekitar 70%.

### **5.2.2. Arah Kebijakan dan Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Kupang**

Bappeda Kabupaten Kupang menetapkan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Kupang adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatkan akses pada perumahan yang layak huni, dan mengatasi permasalahan migrasi dan transit pengungsi. Dalam bidang sosial, Dinas Sosial menetapkan arah pembangunan, yakni menurunkan angka PMKS dan menanggulangi masalah pengungsi.

Secara umum, isu strategis pembangunan di Kabupaten Kupang adalah mengupayakan supaya modal swasta masuk, diperlukan menyediakan pembangunan infrastruktur, memetakan pengembangan tanaman umur panjang, dan berkali-kali panen, dan mengupayakan pembangunan Taman Gizi. Hal ini perlu diperhatikan karena Kabupaten Kupang merupakan daerah yang mengalami kendala akibat musim. Kabupaten Kupang salah satu daerah yang mengalami kendala musim: 8 bulan musim kemarau dan 4 bulan musim hujan. Isu strategis untuk mengatasi masalah rawan pangan adalah Program Pembangunan Lumbung Desa. Diperlukan pembangunan dam/waduk untuk menampung kelimpahan air pada musim hujan agar tersedia air bersih pada musim kemarau. Diperlukan pembangunan industri maritim.

Isu strategis lain adalah rendahnya kualitas SDM (rata-rata sekolah SMP kelas 1). Untuk mengatasinya Pemda Kabupaten Kupang sudah berupaya memberi beasiswa pada putera daerah untuk menempuh pendidikan tinggi

setingkat S2 dan S3. Selanjutnya, program pembangunan Pemda Kabupaten Kupang memberikan kemudahan membangun sekolah, Puskemas, dan gedung olah raga.

Diakui banyak tenaga kerja keluar daerah Kabupaten Kupang untuk bekerja di provinsi lain di Indonesia, atau menjadi tenaga kerja migran internasional (TKI).

Dalam bidang kependudukan dan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, isu strategis di Kabupaten Kupang adalah bahwa Pemerintah menyediakan alat KB gratis (IUD, Implant, MOP, dan MOW). Yang mendapat pelayanan, mayoritas tinggal di perkotaan. Moto pelayanan dalam bidang ini adalah masyarakat mandiri, berbudaya, dan kompetitif. Kabupaten Kupang mensosialisasikan program KB melalui program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), berupa desa siaga dimana ada petugas (KB) yang mendampingi ibu hamil dan disediakan dana Rp. 2.000.000 untuk setiap ibu hamil, yang meskipun dana terbatas, cakupannya meningkat. Selain itu, disediakan Rumah Aman Perempuan untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Isu strategis dalam bidang kesehatan adalah bahwa Kabupaten Kupang adalah kematian bayi dan kematian ibu dimana jumlah kematian ibu sebanyak 20 kematian pada tahun 2014. Diperlukan program untuk membatasi jumlah anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Isu lainnya adalah kurang gizi dan gizi buruk, pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31), pengendalian TB-Paru, pengendalian penyakit ISPA, penanggulangan HIV/AIDS dan PMS, pengendalian penyakit demam berdarah (dengue), pengendalian penyakit kusta, pengendalian penyakit filariasis, pembangunan akses terhadap air bersih, pengendalian penyakit diare, dan pengendalian penyakit malaria.

Isu strategis dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang adalah berupa perbaikan data kependudukan. Diperlukan buku dalam bentuk tercetak karena data kependudukan dapat digunakan untuk kepentingan, seperti Pemilu, Kesehatan, KB, BPJS, dan ketenagakerjaan (TKI dan TKW).

Isu strategis lain adalah jumlah anak yang masih tinggi, yakni sekitar 5-6 orang. Sudah dilakukan program tanam paksa dan paksa tanam untuk mengatasi masalah kerawanan pangan untuk mengatasi permasalahan iklim. Telah dipetakan jenis komoditas pangan yang dapat bertahan walau musim kering, yakni kelapa, jagung, ubi, ubi kayu, pisang dan *staple food* (jagung dan beras).

Dinas Sosial mencatat isu strategis pembangunan dalam bidang sosial berupa pendampingan terhadap keluarga yang mengalami masalah sosial, seperti narapidana, usia lanjut, dan HIV/ODA. Dinas Sosial mencatat sejumlah 5.018 jiwa yang memerlukan pendampingan.

### **5.2.3. Fakta dan Kebijakan dalam Hubungannya dengan Isu Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan di Kabupaten Kupang**

Pejabat pembuat keputusan terkait dengan pembangunan sudah ada yang pernah mendengar bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan, walau diakui belum mengakomodasinya secara tertulis dalam dokumen pembuatan kebijakan pembangunan. Disebutkan dalam praktek sudah terdapat dokumen perencanaan pembangunan yang tersirat dengan bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang sudah menetapkan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk memanfaatkan bonus demografi dan jendela kesempatan. Program yang dilakukan adalah program Kabupaten Unggul dalam tahun 2015 dalam bidang pendidikan dan ekonomi, Program Tanam Paksa dan Paksa Tanam untuk memberdayakan lahan sekolah, dan kantor, dan memberikan beasiswa dari APBD untuk pendidikan pada tingkat BLK. Diakui belum ada program khusus dalam hal pengendalian penduduk.

### **5.3. Provinsi Sulawesi Utara**

Dari hasil wawancara mendalam, diperoleh gambaran umum tentang Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara bersifat terbuka pada modernisasi (budaya), pada masa lalu mempunyai kekayaan yang cukup tinggi, khususnya diperoleh ketika terjadi *booming* ekonomi hasil produksi cengkeh (ekonomi), relatif berpendidikan tinggi, kemudian berdampak pada tingkat fertilitas yang rendah (pendidikan), dan pada saat ini sudah mulai merasakan 'kekurangan' penduduk usia muda, sehingga mendorong penduduk mempunyai anak lebih banyak. Hambatan pembangunan adalah masih terdapat daerah dengan jarak geografis yang sulit dijangkau.

#### **5.3.1. Permasalahan Pembangunan di Sulawesi Utara**

Permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara antara lain adalah angka pengangguran yang tinggi, penanganan kasus perindustrian, pengawasan di perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan, kesempatan kerja yang kurang baik, penanganan UMP (UMP di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.150.000 pada tahun 2015), serta terjadinya pengangguran terdidik (mungkin pengangguran terdidik tertinggi di Indonesia terdapat di Provinsi Sulawesi Utara).

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sulawesi Utara melihat permasalahan pembangunan adalah kebijakan tentang pembangunan kepemudaan belum dibuat, banyaknya sarjana tidak bekerja, tidak ada upaya mendorong agar pemuda berorientasi menjadi wiraswasta, terdapat pengangguran sarjana, karena tenaga kerja terdidik umumnya ingin menjadi pegawai negeri dan sarjana terdidik cenderung malas dan tidak mau bekerja di bidang pertanian (berkebun). Dampaknya, terjadi arus migrasi buruh dari Pulau Jawa. Secara umum, pekerja lokal mempunyai keahlian yang kurang memadai (2015), sehingga tenaga kerja datang dari luar Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berdampak pada kurangnya produktivitas, pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan lain adalah kesenjangan pendapatan antarkampung yang cukup tinggi.

Permasalahan pembangunan dalam bidang sosial adalah tidak adanya sinkronisasi Provinsi- Kabupaten dalam era otonomi daerah menghambat pembangunan. Kemudian kebijakan otonomi daerah mengakibatkan kabupaten/kota merasa sebagai daerah otonom. Prevalensi penduduk penyandang PMKS sudah terjadi. Hal ini diakibatkan sudah didapatkan adanya PSK di jalanan (PSK di Provinsi Sulawesi Utara, bukan penduduk asli Sulawesi Utara). Kemiskinan tidak terdapat pada penduduk asli Sulawesi Utara di Kota Manado. Kemiskinan terjadi pada dan diakibatkan oleh pendatang.

Dalam bidang kesehatan, permasalahan pembangunan antara lain adalah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, seperti penyakit gagal ginjal, pemeliharaan alat kesehatan yang sudah ada kurang dan sulit dilakukan karena terbatasnya dana.

### **5.3.2. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan di Sulawesi Utara**

Isu strategis pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dari sisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain adalah penurunan angka pengangguran terdidik, penerapan norma kerja, dan penanganan Jamsostek. Di sisi lain, Dinas Pemuda dan Olah Raga memandang isu strategis antara lain kebiasaan keluarga dan orang tua yang cenderung tidak menabung ketika kondisi ekonomi sedang baik. Kemudian penduduk Sulawesi Utara cenderung menyenangi olah raga yang menantang.

Dalam bidang sosial, isu strategis adalah penanganan penduduk miskin, terlantar, ketunaan sosial, diskriminasi, terpencil, dan eksploitasi terdapat di daerah terpencil. Kemudian isu tentang diskriminasi, masih terdapat perlakuan hukum terhadap perempuan, rehabilitasi dan *trafficking*. Kemudian dalam bidang kelembagaan sosial, yakni isu di dalam bidang penyandang masalah sosial, terdapat potensi di dalam PMKS.

Provinsi Sulawesi Utara menetapkan strategi pembangunan dalam bidang tenaga kerja dengan mengadakan Pameran Tenaga Kerja, membangun BLK, memperhatikan Penempatan TK, pelatihan ke desa dan memfasilitasi transmigrasi, dan pembinaan LPK (Lembaga Pendidikan Ketrampilan). Diakui permasalahan dalam bidang pendidikan saat ini adalah kurangnya tenaga pendidikan. Pertanyaan dalam strategi pendidikan adalah bagaimana menghasilkan tenaga pendidikan yang dapat mengisi pekerjaan dalam SMK yang dibangun.

Dalam bidang sosial, Provinsi Sulawesi Utara memandang strategi pembangunan dari sisi budaya. Dikatakan bahwa penduduk asli Sulawesi Utara sesungguhnya adalah masyarakat ‘penurut’ sehingga mudah menerima program pembangunan. Khususnya, jika dilakukan melalui pemimpin yang dihormati, seperti tokoh agama dan tokoh adat. Penduduk Sulawesi Utara sangat menghargai pendidikan. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.

### **5.3.3. Fakta dan Kebijakan dalam Hubungannya dengan Isu Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan di Sulawesi Utara**

Dalam hubungan dengan fakta dan kebijakan terhadap isu Bonus Demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan, umumnya pemangku kepentingan sudah mendengar isu tersebut dari media massa, tetapi belum dan tidak memahami maknanya. Sesungguhnya, data makroagregat sudah menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Utara sudah mengalami bonus demografi. Sangat banyak terdapat keluarga dengan jumlah anak yang tidak banyak. Dengan fakta ekonomi dan ekonomi yang baik, di Provinsi Sulawesi Utara terdapat tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita yang tinggi. Dengan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat pendidikan (*human capital*) yang tinggi, pemangku kepentingan belum memanfaatkannya secara tersurat dalam rencana pembangunan sebagai modal pembangunan.

Walau belum membuat program secara tersurat dalam rencana pembangunan, Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan program menangkap jendela kesempatan secara tersirat dalam dokumen perencanaannya. Provinsi Sulawesi Utara melakukan program Wajib Belajar Pendidikan Menengah (lama sekolah rata-rata di Sulawesi Utara sudah mencapai 5 tahun lebih). Program ini sudah dimulai sejak 6 tahun lalu. APK Sekolah Dasar di Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai angka 97-98%. Pada tahun 2015, untuk memperlengkapi tenaga kerja demi peningkatan penawaran tenaga kerja, terdapat fakta pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut. Pendidikan Menengah: terdapat 200-an SMK hampir sama dengan banyaknya SMA (terdapat 200-an SMA). Diadakan expo pendidikan: sedang dipikirkan membangun SMK bidang industri tertentu. Perlu diadakan *reengineering* program keahlian yang relevan dengan dunia kependidikan: diperlukan 2 SMK Kesehatan. Spektrum SMK, diperlukan 400 program keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan tenaga kerja (tenaga kerja yang relevan), seperti SMK Manajemen Kepelabuhanan. Sedang merencanakan membangun lembaga pendidikan yang berorientasi global. Peningkatan akses (pelosok dan perdesaan), antara lain dengan membangun sekolah di daerah Bitung dan Minahasa Tenggara (SMK Pelayaran dan pelayanan maritim); membangun sekolah di Minahasa Tengah (SMP produksi untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing); memetakan sumber daya ekonomi kreatif, terdapat hortikultura terkenal dari Minahasa Tenggara (salak Panu) yang dapat dikembangkan sebagai ekonomi kreatif.

### **5.4. Kota Tomohon**

Kota Tomohon merupakan kota pendidikan yang dibangun (khususnya oleh gereja) sejak jaman penjajahan Belanda. Salah satu Sekolah Pendidikan Guru (SPG) tertua di Indonesia terdapat di Kota Tomohon, sehingga pada zaman sebelum Indonesia merdeka, sudah didapati siswa sekolah guru yang berasal dari Sumatera Utara, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hal ini berdampak pada masa lalu. Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah pengekspor guru ke seluruh Indonesia.

Kota Tomohon merupakan kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Mengapa pendidikan bagus di Tomohon? Pendidikan bagus di Kota Tomohon akibat program dan direncanakan oleh gereja. Data pendidikan di Kota Tomohon antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan dan program gereja membuat Tomohon menjadi Kota Pendidikan.
2. Gereja yang melakukan khususnya GMIM dan Gereja Katolik.
4. Kesadaran masyarakat akan pendidikan sangat tinggi.
- 5.. Dari 67 SD, terdapat 46 SD Swasta dan 27 SD Negeri.
6. Dari 22 SMP, terdapat 18 SMP Swasta dan 4 SMP Negeri.
7. 54 Taman Kanak-kanak
8. 22 SMP
9. 17 SMK/SMA
10. Infrastruktur sudah baik
11. Kota Tomohon mempunyai AMH sebesar 100%, APK SD sebesar 107%, APK SMP sebesar 115%, dan APK SMA sebesar 130%.

#### **5.4.1. Permasalahan Pembangunan di Kota Tomohon**

Saat ini, Kota Tomohon dirasakan kekurangan penduduk. Pada tahun 2015 terdapat beberapa Sekolah Dasar (SD) yang kekurangan murid (kurang dari 50 orang). Di sisi lain, Kota Tomohon sudah mengalami kekurangan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dari sisi persebaran penduduk, penduduk Kota Tomohon tersebar tidak merata, dengan penduduk terpadat di Kecamatan Tomohon Tengah. Dalam bidang kesehatan, masalah pembangunan adalah meningkatnya penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan gagal ginjal akibat pola diet yang cenderung mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi energi. Dampak negatif dari status gizi baik berupa risiko penyakit kelebihan gizi, seperti darah tinggi dan penyakit jantung. Masalah selanjutnya dari sisi kesehatan dan juga terkait dengan masalah sosial adalah bahwa penduduk Kota Tomohon tidak ingin menyerahkan orang tua dirawat di panti jompo. Masalah pembangunan dalam bidang sosial adalah sangat sulit bagi eks narapidana mendapatkan pekerjaan dan ditemukan beberapa penyakit mental.

Masalah pembangunan dalam bidang ekonomi adalah sektor ekonomi di Kota Tomohon adalah sektor ekonomi sebagai hasil dari kebaikan alam. Pola konsumsi masyarakat cenderung menghabiskan tabungan pada bulan

Desember. Penduduk Kota Tomohon masih melakukan acara pesta pora di akhir tahun (Perayaan hari Natal dan Tahun Baru). Tabungan satu tahun dihabiskan untuk pesta dan bukan untuk masa depan. Dalam bidang ketenagakerjaan, penduduk Tomohon meminta upah yang besar sehingga berdampak datangnya tenaga kerja dari luar Kota Tomohon, khususnya dari Pulau Jawa. Selanjutnya, permasalahan dalam bidang tenaga kerja adalah tingginya tingkat pengangguran terdidik. Dalam hal lingkungan hidup, penduduk Kota Tomohon gemar membangun rumah di ketinggian dan kurang memperhatikan pembuangan dan pengelolaan sampah sehingga berdampak buruk pada lingkungan.

#### **5.4.2. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan di Kota Tomohon**

Isu strategis di Kota Tomohon, walau mempunyai APK yang tinggi, masih didapati anak-anak yang belum/tidak bersekolah. Isu strategis pembangunan di Kota Tomohon adalah mendata anak yang tidak sekolah, dan menekan jumlah anak yang tidak sekolah. Isu strategis lain adalah mengadakan pendidikan setingkat SMA bagi penduduk yang sudah bekerja, tetapi tidak mempunyai ijazah setingkat SMA.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat dari kekurangan penduduk di Kota Tomohon, sedang diupayakan pelatihan berbasis gender dan pelatihan bagi penduduk usia kerja agar dapat bekerja lebih produktif. Sektor dominan penyumbang pendapatan daerah Kota Tomohon adalah sektor pertanian dengan sumber daya alam unggulan pertanian bunga dan sektor pariwisata sehingga tenaga kerja diarahkan mempunyai produktivitas tinggi dalam kedua sektor tersebut. Dalam bidang persebaran penduduk strategi pembangunan adalah mengarahkan pemukiman ke arah Kecamatan Tomohon Selatan. Strategi dalam bidang kesehatan adalah mengedukasi penduduk dengan pola konsumsi dan pola diet sehat.

#### **5.4.3. Fakta dan Kebijakan dalam Hubungannya dengan Isu Bonus Demografi dan Pemanfaatan Jendela Kesempatan di Kota Tomohon**

Umumnya pemangku kepentingan di Kota Tomohon belum pernah dan belum ada program pembangunan terkait dengan bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan sehingga program secara tersurat belum dilakukan. Akan tetapi, secara tersirat sudah terdapat dalam dokumen pembangunan. Kota Tomohon pada khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya berlatar belakang masyarakat demokratis karena tidak mengenal bentuk kerajaan-kerajaan. Masyarakat terbiasa mengambil keputusan dengan model demokrasi (kesepakatan bersama) dengan menganut animisme. Kemudian gereja masuk ke Sulawesi Utara, kebiasaan animisme ditinggalkan dan menjadi menganut agama Kristen. Gereja menjadi motor pembangunan, khususnya bonus demografi di Sulawesi Utara dan Kota Tomohon. Program terkait dengan bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan antara lain adalah program pemberantasan penyakit tidak menular (DM, hipertensi, dan gagal ginjal (penyakit kelebihan gizi)). Program dalam bidang ekonomi adalah pembangunan jasa perbankan, dan pembangunan pertanian khususnya dalam bidang pertanian bunga dan kerajinan. Program yang sudah dibuat



dalam bidang bunga adalah festival bunga yang diberi nama Tomohon International Festival. Untuk menangkap jendela kesempatan telah dilakukan *grand strategy* dalam bidang kependudukan dan gender, yakni melaksanakan pendidikan gender terhadap 25 ribu remaja. Arah pembangunan Kota Tomohon diberi moto “Keluarga Bahagia dan Sejahtera.”

## BAB 6

### PENGARUH MODAL FISIK DAN MODAL MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

#### 6.1. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif menggambarkan sebaran data dan digunakan untuk mengevaluasi data yang akan digunakan dalam analisis kuantitatif. Pada tahap awal terdapat 489 kabupaten/kota dalam data untuk analisis kuantitatif. Akan tetapi, sebagian kabupaten/kota belum terbentuk pada tahun 2008, seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Gunung Sitoli di Sumatera Utara dan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambraw di Papua Barat. Oleh karena itu, untuk analisis digunakan data untuk 452 kabupaten/kota dengan data lengkap untuk kelima variabel dalam analisis kuantitatif.

Statistik deskriptif berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar untuk kelima variabel dalam analisis kuantitatif disajikan pada Tabel 6.1. Angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian pada periode 2008-2010 paling rendah di Kabupaten Kerinci di Jambi (-17,3%) dan paling tinggi di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat (53,9%). Angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas pada periode 2008-2010 paling rendah di Kabupaten Nias di Sumatera Utara (-23,2%) dan paling tinggi di Kabupaten Asmat di Papua (342,7%). Hasil Susenas menunjukkan bahwa penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas di Kabupaten Asmat sebesar 1,50% pada tahun 2008 dan 11,77 pada tahun 2010.

Angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur pada periode 2008-2010 paling rendah di Kabupaten Nabire di Papua (-13,3%) dan paling tinggi di Kabupaten Sorong Selatan di Papua Barat (11,5%). Angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja pada periode 2008-2010 paling rendah di Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat (-39,2%) dan paling tinggi di Kabupaten Manokwari di Papua Barat (138,3%). Selanjutnya, angka pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku pada periode 2010-2013 paling rendah di Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat (-14,85%) dan paling tinggi di Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah (38,45%).

Tabel 6.1

Statistik Deskriptif Variabel-variabel dalam Analisis

Variabel	Minimum (%)	Maksimum (%)	Rata-rata (%)	Deviasi Standar (%)
Persentase sektor non-pertanian	-17,27	53,86	1,23	3,88
Persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas	-23,21	342,68	6,47	19,12
Rasio ketergantungan umur	-13,26	11,46	-0,69	3,50
Jumlah angkatan kerja	-39,21	138,31	13,49	13,29
PDRB	-14,85	38,45	15,02	4,06

Berdasarkan nilai rata-rata dan deviasi standar untuk setiap variabel dalam analisis kuantitatif, dihitung koefisien variasi, yang merupakan rasio antara nilai deviasi standar dengan nilai rata-rata. Secara relatif, angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur paling bervariasi, diikuti dengan angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, jumlah angkatan kerja, dan PDRB.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dibentuk dua model regresi linier berganda. Model regresi linier pertama untuk semua 452 kabupaten/kota dengan data lengkap. Model regresi kedua untuk 428 kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, jumlah angkatan kerja, dan rasio ketergantungan umur di bawah 30% per tahun.

## 6.2. Analisis Bivariat antara Variabel-variabel dalam Analisis

Analisis bivariat antara variabel-variabel ditujukan untuk mendeteksi hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel tidak bebas dan untuk mendeteksi multikolinieritas antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi (Tabel 6.2). Terlihat bahwa seperti yang diharapkan, terdapat korelasi yang positif antara angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, dan jumlah angkatan kerja dengan PDRB, dan terdapat korelasi yang negatif antara angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur dengan PDRB. Sementara itu, koefisien korelasi antara variabel-variabel bebas relatif rendah dan semua kurang dari 0,7 sehingga multikolinieritas tidak menjadi masalah dalam analisis.

**Tabel 6.2**  
**Koefisien Korelasi antara Variabel-variabel dalam Analisis**

Angka pertumbuhan	Persentase sektor non-pertanian	Persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas	Rasio ketergantungan umur	Jumlah angkatan kerja	PDRB
Persentase sektor non-pertanian	1,000				
Persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas	0,183	1,000			
Rasio ketergantungan umur	0,023	-0,021	1,000		
Jumlah angkatan kerja	0,134	0,074	-0,014	1,000	
PDRB	0,022	0,045	-0,076	0,033	1,000

### 6.3. Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis regresi linier berganda pengaruh modal fisik dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan 452 kabupaten/kota dengan data lengkap menunjukkan bahwa statistik uji  $F$  sebesar 119,5, yang signifikan pada taraf kenyataan 0,000, sehingga dapat disimpulkan model cocok. Koefisien variasi model sebesar 0,514. Artinya, 51,4% variasi dalam angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Indonesia dijelaskan oleh angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, pendidikan, angkatan kerja, dan struktur umur penduduk. Hasil pengujian signifikansi variabel-variabel bebas menunjukkan bahwa secara statistik angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, pendidikan, dan angkatan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi pada taraf kenyataan 0,000, sementara angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi pada taraf kenyataan 0,05.

Berdasarkan Tabel 6.3, model regresi antara angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, pendidikan, angkatan kerja, dan struktur umur penduduk dengan angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Indonesia yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$r_{PDRB} = 0,628r_{NT} + 0,180r_D + 0,460r_{AK} - 0,313r_{RKU}$$

Semakin tinggi angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Jika angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian naik sebesar 1% maka angka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,628%. Sektor non-pertanian dipandang sebagai sektor yang lebih produktif. Sebagaimana halnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika pekerja bekerja di sektor pertanian, banyak pekerja yang bekerja pada lahan pertanian keluarga tidak dibayar karena diperhitungkan sebagai bagian keluarga sehingga produktivitas sektor pertanian tetap rendah. Jika sektor ekonomi bermigrasi ke sektor non-pertanian, maka umumnya ekonomi semakin terspesialisasi dan berdampak lebih baik pada pertumbuhan ekonomi. Ray (1998) menyatakan bahwa salah satu penyebab kurang produktifnya sektor pertanian di negara berkembang seperti Indonesia adalah bahwa *output* sektor pertanian banyak yang hanya menjadi konsumsi sendiri para pelaku ekonomi.

Semakin tinggi angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Jika angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas naik sebesar 1% maka angka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,180%. Dalam studi ini ditunjukkan bahwa modal manusia yang diestimasi dengan jumlah tahun dalam pendidikan formal diantara penduduk pada usia kerja berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Bassanini dan Scarpetta, OECD 2001), khususnya di negara berkembang. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia (*human*

*capital*), seperti pengeluaran dalam pendidikan dan pelatihan, dapat berdampak yang lebih permanen pada proses pertumbuhan ekonomi.

Semakin tinggi angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi. Jika angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja naik sebesar 1% maka angka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,460%. Jika angkatan kerja semakin banyak, khususnya angkatan kerja yang produktif maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Hal ini didapat melalui pemikiran bahwa angkatan kerja (*labor*) merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang utama selain, teknologi dan kapital. Model pertumbuhan Cobb-Douglass menempatkan angkatan kerja, selain perkembangan teknologi dan modal fisik, sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja semakin banyak dan juga dengan produktivitas yang tinggi maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai. Bonus demografi yang lebih besar akan diperoleh jika sebuah perekonomian mempunyai angkatan kerja yang baik dan mempunyai pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi diperlukan untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam jangka panjang.

Semakin tinggi angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur, semakin rendah angka pertumbuhan ekonomi. Jika angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur sebesar 1% maka angka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,313%. Keluarga miskin umumnya mempunyai sebuah rasio yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang tergantung pada penduduk pekerja (Ray, 1998, hal. 258). Jumlah anak per keluarga dan ditambah dengan jumlah kelompok penduduk usia tua secara signifikan berkorelasi dengan kemiskinan. Keluarga dengan jumlah anak yang lebih banyak cenderung mempunyai tanggungan yang lebih besar dan kemudian memperkecil pendapatan per kapita, hal yang diukur dengan rasio ketergantungan umur. Akibatnya, semakin besar rasio ketergantungan umur, semakin rendah pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6.3**

**Estimasi Parameter, Kesalahan Baku, dan Statistik Uji *t* Model Regresi Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (452 kabupaten/kota)**

Kovariat	Estimasi Parameter	Kesalahan Baku	Statistik Uji <i>t</i>
Angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian	0,628	0,135	4,64
Angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas	0,180	0,047	3,80
Angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja	0,460	0,029	15,66
Angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur	-0,313	0,144	-2,17

Catatan: Semua kabupaten/kota dengan data lengkap.

Pada Tabel 6.4 disajikan estimasi parameter, kesalahan baku, dan statistik uji *t* model regresi pengaruh modal fisik dan modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk 428 kabupaten/kota dengan angka

pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, jumlah angkatan kerja, dan rasio ketergantungan umur di bawah 30% per tahun. Angka pertumbuhan lebih dari 30% dianggap sebagai pencilan (*outlier*), sehingga dikeluarkan dari model. Terlihat bahwa pengaruh angka persentase pertumbuhan penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas dan angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja semakin kuat, yang ditunjukkan dengan nilai statistik uji *t* yang semakin besar. Sementara itu, pengaruh angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian berkurang, namun tetap signifikan pada taraf kenyataan 0,05. Terlihat juga bahwa pengaruh angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur berkurang dan menjadi signifikan pada taraf kenyataan 0,1.

**Tabel 6.4**

**Estimasi Parameter, Kesalahan Baku, dan Statistik Uji *t* Model Regresi Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (428 kabupaten/kota)**

Kovariat	Estimasi Parameter	Kesalahan Baku	Statistik Uji <i>t</i>
Angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian	0,471	0,167	2,815
Angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas	0,206	0,052	3,972
Angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja	0,744	0,032	22,960
Angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur	-0,236	0,129	-1,828

Catatan: Hanya kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian, persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas, jumlah angkatan kerja, dan rasio ketergantungan umur di bawah 30% per tahun.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota adalah angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja, diikuti dengan angka pertumbuhan persentase penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas. Hal ini mengindikasikan peran penting transisi demografi dalam pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang mengakibatkan dominasi penduduk usia produktif dalam struktur umur penduduk dan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi. Pengaruh ini semakin besar jika penduduk usia produktif lebih berpendidikan, struktur perekonomian lebih modern, dan rasio ketergantungan umur lebih rendah.

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **7.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian “Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan dan Bonus Demografi: Suatu Studi Banding di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur” menunjukkan bahwa meskipun transisi demografi lambat, Nusa Tenggara Timur telah dan sedang menikmati bonus demografi dalam bentuk peningkatan yang berarti dalam pencapaian pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, dengan transisi demografi yang secara nasional relatif cepat, Sulawesi Utara juga telah dan sedang menikmati bonus demografi pencapaian pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang nyata.

Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Sulawesi Utara, dan Kota Tomohon belum mengintegrasikan isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan dominasi penduduk usia produktif dalam struktur umur penduduk dalam perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena baru sebagian kecil dari para perencana pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang sudah memperoleh informasi tentang isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, para perencana pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota belum memperoleh advokasi dan penguatan kapasitas untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan. Akan tetapi, perencanaan pembangunan secara tersurat sudah ditujukan untuk peningkatan pembangunan ekonomi, khususnya sektor ekonomi unggulan, dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya investasi pada penduduk usia produktif dan pendidikan kejuruan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan jendela kesempatan di Nusa Tenggara Timur adalah etos kerja penduduk yang rendah, investasi yang rendah, dan migrasi keluar penduduk usia produktif. Sementara itu, Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan jendela kesempatan di Sulawesi Utara adalah perilaku investasi (menabung) penduduk yang rendah serta peningkatan penyakit degeneratif, terutama karena konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan ekonomi di suatu kabupaten/kota di Indonesia dipengaruhi oleh struktur umur penduduk di kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan rasio ketergantungan umur yang lebih rendah secara rata-rata mempunyai angka pertumbuhan produk domestik regional bruto tanpa minyak dan gas atas dasar harga berlaku (PDRB) yang lebih tinggi.

Pencapaian pembangunan ekonomi di suatu kabupaten/kota juga dipengaruhi oleh modal fisik dan modal manusia. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan persentase sektor non-pertanian yang lebih tinggi secara

rata-rata mempunyai angka pertumbuhan produk domestik regional bruto tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan 2000 (PDRB) yang lebih tinggi. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan penduduk usia 19 tahun ke atas berpendidikan SMA ke atas yang lebih tinggi secara rata-rata mempunyai angka pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi. Kabupaten/kota dengan angka pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi secara rata-rata mempunyai angka pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi.

Prospek Indonesia untuk menikmati bonus demografi yang lebih besar terjadi jika upaya penurunan tingkat kelahiran ditingkatkan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kelahiran relatif tinggi, investasi ditingkatkan, pendidikan ditingkatkan, dan kualitas sumber daya manusia penduduk usia produktif ditingkatkan.

## **7.2. Rekomendasi Kebijakan**

Hasil penelitian “Fakta dan Prospek Pemanfaatan Jendela Kesempatan dan Bonus Demografis: Suatu Studi Banding di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur” menunjukkan bahwa upaya penurunan tingkat kelahiran di Nusa Tenggara Timur harus ditingkatkan agar Nusa Tenggara Timur dapat memanfaatkan jendela kesempatan dominasi penduduk usia produktif dalam struktur umur penduduk untuk menuai bonus demografi yang lebih besar. Penurunan tingkat kelahiran dapat dilakukan dengan peningkatan akses terhadap dan pemanfaatan informasi, layanan, dan alat/cara keluarga berencana yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga prevalensi kontrasepsi meningkat dan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurun.

Pemanfaatan jendela kesempatan dapat dilakukan dengan peningkatan akses terhadap dan pemanfaatan pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan menengah ke atas, kesehatan, dan ekonomi yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan keterlibatan pihak swasta untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur agar penduduk usia produktif dengan SDM yang berkualitas tetap tinggal dan bekerja di Nusa Tenggara Timur untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga perlu meningkatkan upaya peningkatan etos kerja penduduk Nusa Tenggara Timur supaya jika investasi masuk maka kebutuhan tenaga kerja diisi oleh penduduk usia produktif dari Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Sulawesi Utara perlu meningkatkan upaya peningkatan investasi melalui peningkatan perilaku menabung di kalangan penduduk dalam upaya pemanfaatan jendela kesempatan untuk menuai bonus demografi. Selain itu, upaya pengendalian penyakit degeneratif harus ditingkatkan terutama melalui komunikasi, informasi, dan edukasi makanan sehat dan bergizi.

Berdasarkan hasil penelitian maka strategi pemanfaatan jendela kesempatan demografis di Indonesia adalah dengan meningkatkan investasi, pendidikan, dan kualitas penduduk usia produktif, serta program penanganan tingkat kelahiran. Upaya-upaya ini akan meningkatkan prospek Indonesia untuk menikmati bonus demografis.



Selain itu, advokasi pengintegrasian isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Penguatan kapasitas para perencana pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk penyusunan rencana pembangunan yang mengintegrasikan isu bonus demografi dan pemanfaatan jendela kesempatan juga perlu dilakukan. Penguatan kapasitas para perencana pembangunan di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan pembangunan kritis untuk pemanfaatan jendela kesempatan dalam rangka menuai bonus demografi, khususnya kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pendidikan, dan ekonomi juga perlu dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, D.E., Canning, D., dan Sevilla, J. 2001. *Economic Growth and The Demographic Transition*, NBER Working Paper 8685, tersedia pada: [Http://Www.Nber.Org/Papers/W8685](http://www.nber.org/papers/W8685).
- Deaton, A.S. and C. H. Paxson, C.H. 1997. "The Effects of Economic and Population Growth on National Savings and Inequality," *Demography*, Vol. 34, pp. 97-114.).
- Furuoka, F. 2009. "Population Growth and Economic Development: New Empirical Evidence from Thailand", *Economics Bulletin*, Vol. 29 no.1 pp. 1-14
- Gribble, James dan Bremner, Jason., 2012. "Achieving a Demographic Dividend." *Population Bulletin* 67(2).
- Hausmann, R., dan Székely, M. 1999. *Inequality and the Family in Latin America*, Inter-American Development Bank, Facing up to Inequality in Latin America, Washington DC, IDB.
- Jamison D.T., Wang J., Hill, K. dan Londono J-L. 1996. Income, mortality and fertility in Latin America: country-level performance, 1960-1990. *Revista de análisis económico*, 11: 219-261.
- Kementerian/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik dan *United Nations Population Fund* (UNFPA). 2012. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2007. *Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2007*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. *Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2013*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia.
- Mason, A. 1997. Will Population Change Sustain the 'Asian Economic Miracle'? Analysis from the East-West Center No. 33.
- Mason, A. 2005. Demographic Transitions and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. Proceedings of the United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures, Mexico City, 31 August – 2 September 2005. Hal: 81-101. New York: United Nations.
- Maliki. 2014. Implications of the Demographic Dividend on Government Policy in Indonesia. Dalam *Policy in Focus: National Transfer Accounts and Generational Flows*. No. 30. Hal.: 29-31. United Nations Development Programme.
- Paxson, C.H. 1996. "Savings and Growth: Evidence from Micro Data," *European Economic Review*, Vol. 40, pp. 255-288.
- Ray, D. 1998. *Development Economics*. Princeton University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2014. *Human Development Report. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*. UNDP: New York USA.
- World Bank. 2015. *Indonesia Database for Policy and Economic Research*. [databank.worldbank.org](http://databank.worldbank.org).
- [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Young, A. 1995. The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience. *Quarterly Journal of Economics* No. 110. Hal.: 641-680.

## LAMPIRAN



Kode:

--	--	--	--	--

## KARYA TULIS ILMIAH

### FAKTA DAN PROSPEK PEMANFAATAN JENDELA KESEMPATAN DAN BONUS DEMOGRAFIS: SUATU STUDI BANDING DI SULAWESI UTARA DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Kerjasama:

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
dan  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

## PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

### A. WILAYAH STUDI

No.	Nama	Kode
1.	Provinsi Sulawesi Utara	7100
2.	Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara	7173
3.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5300
4.	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	5303

### B. INFORMAN WAWANCARA MENDALAM

No.	Nama	Kode	No.	Nama	Kode
1.	Kepala Bappeda	1	6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
2.	Dinas Kesehatan	2	7.	Dinas Sosial	7
3.	Dinas Pendidikan	3	8.	Dinas Kesejahteraan Rakyat	8
4.	Dinas Ketenagakerjaan	4	9.	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	9
5.	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	5			

### C. KETERANGAN UMUM INFORMAN DAN WAWANCARA

No.		
1.	Nama	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Jabatan	
5.	Alamat Kantor	
6.	Alamat Rumah	
7.	Alamat <i>e-mail</i>	
8.	Nomor Telepon Kantor	
9.	Nomor Telepon Pribadi	
10.	Periode Waktu Menjabat di Tempat Kerja Sekarang	
11.	Tanggal Wawancara	
12.	Waktu Wawancara	Mulai:
		Selesai:
12.	Tempat Wawancara	
13.	Pewawancara	

## PEMBANGUNAN UMUM/SEKTORAL

1. Apakah permasalahan pembangunan di wilayah kerja Bapak/Ibu?

[illegible]







4. Apakah arah kebijakan pembangunan di wilayah kerja Bapak/Ibu?

[illegible]





## FAKTA DAN PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI

7. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendengar tentang bonus demografi?

1. Sudah pernah      2. Belum pernah (**jika belum pernah, langsung ke pertanyaan No. 12**)

8. Jika sudah pernah, apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bonus demografi?

[illegible]

9. Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pemanfaatan bonus demografi di wilayah kerja Bapak/Ibu?

1. Sudah ada                      2. Belum ada (jika belum ada, langsung ke pertanyaan No. 12)

10. Sebutkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pemanfaatan bonus demografi di wilayah kerja Bapak/Ibu!

[illegible]

11. Mengapa belum ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pemanfaatan bonus demografi di wilayah kerja Bapak/Ibu?

[illegible]

## PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

12. Apakah kebijakan pembangunan di wilayah kerja Bapak/Ibu sudah memperhitungkan situasi penduduk?

1. Sudah                      2. Belum (jika belum ada, langsung ke pertanyaan No. 14)

13. Sebutkan kebijakan pembangunan di wilayah kerja Bapak/Ibu yang sudah memperhitungkan situasi penduduk!

[illegible]

14. Apakah permasalahan pembangunan kependudukan di wilayah kerja Bapak/Ibu?















[illegible]

**TERIMA KASIH BANYAK!**

